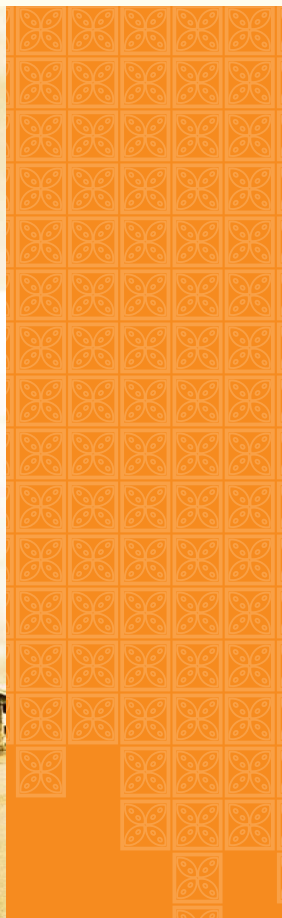


PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE



MEWUJUDKAN ASPIRASI FULFILLING ASPIRATIONS

LAPORAN TAHUNAN 2012 ANNUAL REPORT

DAFTAR ISI

CONTENTS

3.	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	67.	Posisi Keuangan Financial Position
4.	Visi dan Misi Vision & Mission	70.	Kemajuan Inisiatif Strategis Progress of Strategic Initiatives
6.	Sekilas IIF IIF In Brief	70.	Keuangan, TI, dan Operasional Finance, IT, and Operations
10.	Struktur Pemegang Saham Shareholders Structure	76.	Private Sector Advisory Private Sector Advisory
11.	Struktur Organisasi IIF IIF Organizational Structure	76.	Manajemen Risiko Risk Management
12.	Kaleidoskop Tahun 2012 Highlights of The Year	77.	Sosial dan Lingkungan Social and Environmental
14.	2012 Ikhtisar Keuangan 2012 Financial Highlights	78.	Corporate Planning
16.	LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORTS	76.	Sumber Daya Manusia Human Resources
18.	Sambutan Dewan Komisaris Message From The Board of Commissioner	79.	Audit Internal Internal Audit
22.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	80.	Prospek Bisnis 2013 Business Prospect 2013
24.	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	83.	TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
28.	Laporan Direksi Report From The Board of Directors	84.	Penerapan Tata Kelola Perusahaan Implementation of Good Corporate Governance
36.	Direksi dan Manajemen Board of Directors and Management	85.	Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors
38.	Profil Direksi dan Manajemen Board of Directors and Management Profile	86.	Dewan Komisaris Board of Commissioners
43.	MEMPERKOKOH INVESTASI INVESTING WITH RESILIENCE	86.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners meetings
45.	Pasar Utang Yang Kompetitif Competitive Debt Market	87.	Keputusan Sirkular Pemegang Saham dan Akta Circular resolutions and Deeds
46.	Kinerja Tim Investasi 2012 Investment Team Performance in 2012	87.	Direksi Board of Directors
47.	Tantangan Masa Lalu dan Masa Depan Past and Future Challenges	87.	Komite Audit / Audit Committee
51.	DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP	88.	Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting
52.	IIF Public Sector Advisory IIF Public Sector Advisory Group	86.	Pengendalian Sistem Pengawasan Internal control system
56.	Proyek Pasokan Air Semarang Barat West Semarang Water Supply Project	88.	Audit Internal / Internal audit
58.	Proyek KPS Panas Bumi Geothermal PPP Project	89.	Auditor Eksternal / External Auditor
59.	Langkah-langkah Strategi 2013 Strategic Steps in 2013	89.	Manajemen Risiko / Risk Management
61.	ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS	91.	Penyampaian Reguler Laporan Keuangan Regular Submission of Financial Statements
64.	Analisa Laporan Keuangan 2012 Analysis of the 2012 financial statements	91.	Publikasi Laporan Keuangan Publication of Financial Statements
66.	Analisa Keuangan Financial Analysis	93.	LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS



MEWUJUDKAN ASPIRASI FULFILLING ASPIRATIONS

“2012 merupakan tahun yang penuh dengan momentum dan energi bagi PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Pengembangan platform usaha IIF telah tercapai. Melalui momentum ini IIF merealisasikan visi untuk menjadi perusahaan pembiayaan infrastruktur terdepan dan mitra dalam pembangunan proyek infrastruktur yang digagas dengan baik, dan layak secara komersil melalui penyaluran produk pembiayaan yang unggul dan kompetitif.”

“2012 was a year of momentum and energy for PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). IIF business platform establishment truly took root. This momentum is now driving IIF towards realizing its vision to be an acknowledged infrastructure financing and advisory specialist in a position to help accelerating the construction of well-conceived, commercially viable infrastructure projects through excellence in product delivery and competitive funding.”





Jembatan Siak Pekanbaru, Indonesia
Siak Pekanbaru Bridge, Indonesia

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

VISI & MISI

VISION & MISSION

VISI VISION

Menyediakan modal dalam pembangunan Infrastruktur di Indonesia dan mitra bagi Sponsor Infrastruktur, Pasar Keuangan dan Pemerintah Indonesia dalam pembangunan Proyek Infrastruktur yang digagas dengan baik, dan layak secara komersil

To provide capital for infrastructure in Indonesia and to work closely with infrastructure Sponsors, the Financial Sector and the Government of Indonesia to accelerate the construction of well-conceived, commercially viable infrastructure projects.

MISI MISSION

- Menjamin kepentingan pelaku investasi tercermin dalam struktur kontrak dan konsesi.
- Mempelopori ketersediaan beragam instrumen pendanaan jangka panjang yang layak bagi Proyek Infrastruktur.
- Menjadi mitra bagi lembaga keuangan dan investasi Nasional lainnya dalam menyalurkan dana masyarakat ke dalam pembangunan Infrastruktur jangka panjang di Indonesia.
- To ensure investors' needs are reflected in contractual structures and concessions.
- To lead in offering a mix of long term financing instruments appropriate for infrastructure.
- To work with Indonesia's financial institutions and other institutional investors to channel the nation's savings into the long term development of Indonesia's infrastructure.

SEKILAS IIF

IIF IN BRIEF

PRODUK INVESTASI

Investment Products
Fund-Based
Non Fund- Based

JASA ADVISORY

Advisory Services
Public Advisory
Private Advisory



Terminal Bantar Gebang



Jembatan Ampora

"IIF bertujuan untuk
menjadi ujung tombak
investasi Infrastruktur
untuk mendukung MP3EI"

" IIF aims to be
the spearhead of
Infrastructure investment
to support MP3EI"

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) didirikan tanggal 15 Januari 2010. IIF adalah perusahaan swasta nasional berbentuk perusahaan pembiayaan infrastruktur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 100/2009, yang dikelola secara profesional dengan fokus untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial. Pendirian IIF adalah salah satu elemen penting di dalam pengembangan strategis oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan mitra dari lembaga keuangan internasional untuk mengatasi hambatan arus investasi swasta di

PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) was established on 15 January 2010. IIF is a private non-bank financial institution under the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Regulation (PMK) No. 100/2009, with a focus on investing in commercially feasible infrastructure projects. The establishment of IIF is a key element of the strategic move by the Government of Indonesia and development partners among international financial institutions to address the constraints on the flow of

sektor infrastruktur. IIF memperoleh ijin usaha dari Menteri Keuangan melalui Keputusan No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus, 2010.

Tujuan IIF adalah untuk menjawab adanya kesenjangan dalam peranan institusi bagi pengembangan infrastruktur dan pembiayaan di Indonesia. Sebagai badan usaha berorientasi komersial, IIF menyediakan produk *fund based* seperti pinjaman jangka panjang, produk *non fund based* seperti penjaminan serta layanan lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur. Didukung oleh permodalan kuat yang berasal dari para pemegang saham dan pinjaman subordinasi 25 tahun dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia, IIF pada posisi terbaik untuk menciptakan pasar tersendiri sebagai katalisator dalam membiayai proyek infrastruktur baru.

Selanjutnya, IIF memiliki posisi yang unik untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah dalam bentuk pemberian saran mengenai kebijakan infrastruktur. IIF juga dapat memberikan dukungan kepada sponsor proyek serta berkolaborasi dengan institusi keuangan lain dengan menyediakan jasa penasehat keuangan, penyediaan pendanaan jangka panjang, dan instrumen keuangan lainnya.

IIF diharapkan akan berkembang menjadi repositori nasional dalam menggali pengalaman dan keahlian yang berkaitan dengan pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak, termasuk proyek-proyek yang berbasis Kerjasama Pemerintah Swasta ("KPS").

Kedelapan prinsip IIF dalam perlindungan sosial dan lingkungan (*S&E safeguards*), termasuk mengadopsi praktek terbaik dalam tata kelola perusahaan dan kode etik, akan memberikan jaminan tambahan untuk pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan sejalan dengan standar internasional.

private investment in infrastructure. IIF obtained its license from the Minister of Finance through Decree No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010.

IIF's objective is to address a key gap in the institutional landscape for infrastructure development and finance in Indonesia - a commercially oriented entity providing fund based products such as long term financing, non-fund based products such as guarantees as well as fee based services for infrastructure projects. Supported by its strong capital base from shareholders and 25 years subordinated loan on-lending facilities from the World Bank and the Asian Development Bank, IIF is well-positioned to create act as a catalyst to finance infrastructure projects and develop a new market for infrastructure development.

Furthermore, IIF has a unique position to support Government by providing advice on infrastructure policy issues. IIF also well placed to support project sponsors as well as to collaborate with other financial institutions by providing advisory services, extending long tenor financing and a range of other financial instruments.

IIF is expected to emerge as a national repository of experience and skills related to the development and financing of commercially viable projects in infrastructure, including those based on Public Private Partnership ("PPP").

IIF eight principles in social and environmental safeguards as well as its adoption of the highest standards of Corporate Governance and Code of Conduct provide better assurance for sustainable infrastructure development in compliance with international standards.

SEKILAS IIF IIF IN BRIEF

Produk dan Layanan

Dalam kaitan dengan tujuan perusahaan untuk menyediakan pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, IIF memberikan layanan-layanan berikut:

Produk Investasi

1. Fund-based
 - Menyediakan pinjaman dalam bentuk antara lain, utang senior, utang subordinasi / *mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* and/or *refinancing*;
 - Pembiayaan kegiatan lain yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur yang dibenarkan oleh hukum, dan
 - Investasi ekuitas.
2. Non fund-based
 - Menyediakan jaminan dalam bentuk antara lain, pemenuhan tanggung jawab keuangan, perpanjangan kredit, dan/atau Jaminan Pelaksanaan; dan
 - Menyediakan *stand-by- finance*.

Jasa Advisory

1. Jasa Public Sector Advisory
 - Menyediakan jasa konsultasi bagi sektor publik pada pengadaan proyek infrastruktur tertentu, baik di bawah KPS atau kerangka kerja lainnya;
 - Menyediakan jasa konsultasi bagi Pemerintah mengenai isu-isu kebijakan yang lebih luas terkait dengan pembangunan infrastruktur secara umum atau sektor-sektor tertentu; dan
 - Menyediakan jasa konsultasi terkait dengan antara lain, penilaian risiko, analisis kelayakan, penataan proyek, skema pembiayaan, dan/atau pengembangan proyek.

Products and Services

In relation to its objective to provide infrastructure project financing in Indonesia, IIF may provide the following services:

Investment products

1. Fund-based
 - Providing loans in the form of, among others, senior debt, subordinated debt/ *mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* and/or *refinancing*;
 - Financing other activities related to infrastructure projects as permitted by Law; and
 - Equity investment.
2. Non fund-based
 - Providing guarantees in the form of, among others, fulfillment of financial liabilities, credit enhancement, and/or performance bonds; and
 - Providing *stand-by- finance*.

Advisory services

1. Public Sector Advisory services
 - Advising the public sector on the procurement of specific infrastructure projects, whether under the PPP or other framework;
 - Advising Government on broader policy issues relating to infrastructure development generally or in specific sectors; and
 - Providing advisory services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development.

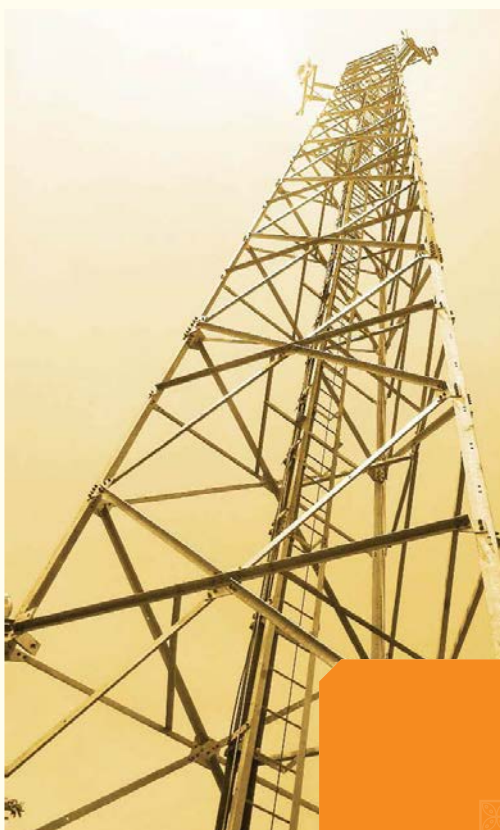
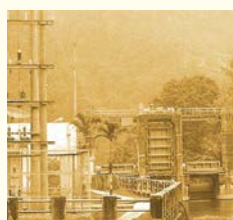
SEKILAS IIF IIF IN BRIEF

2. Jasa Private Sector Advisory

- Menyediakan jasa konsultasi berkaitan dengan antara lain, penilaian risiko, analisis kelayakan, penataan proyek, skema pembiayaan, dan/atau pengembangan proyek; dan
- Menyediakan jasa konsultasi bagi sektor swasta terhadap proyek-proyek khusus dari tahap tender sampai penetapan keuangan.

2. Private Sector Advisory sectors

- Providing advisory services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development; and
- Advising the private sector on specific projects from the tendering stage until financial close.



Dari kiri ke kanan/ From left to right:

Pembangkit Listrik Tenaga Air 2x90 MW / 2x90 MW Hydro Power Plant

Menara Telekomunikasi BTS / BTS telecommunication tower

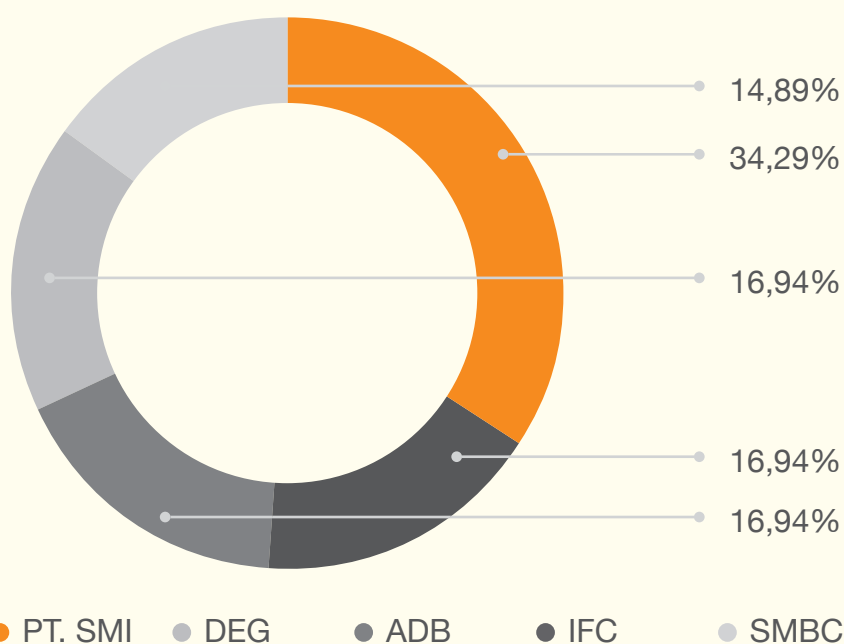
Proyek 900 Ips Pengolahan Air dan Jaringan Distribusi / 900 Ips Water Treatment Plant and Distribution Network

Kunjungan Proyek
Tahun 2012
Project Site Visit in
2012

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PADA 31 DESEMBER 2012

SHAREHOLDER STRUCTURE AS OF DECEMBER 31, 2012

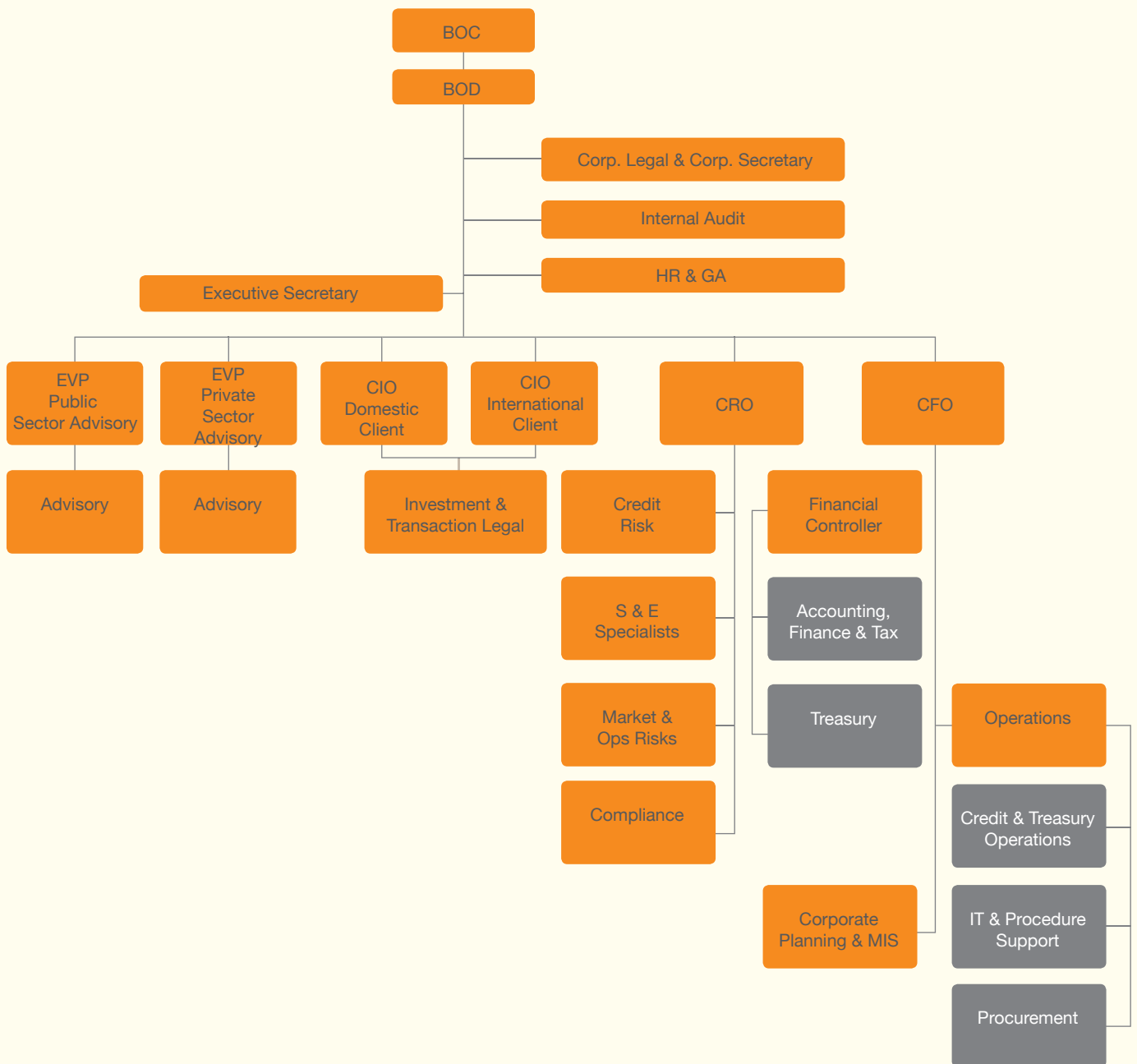
SHAREHOLDER STRUCTURE 2012



Shareholders	Total investment (in Rp million)	(%)
PT. SMI	403,000	34,29%
DEG	199,000	16,94%
ADB	199,000	16,94%
IFC	199,000	16,94%
SMBC	175,000	14,89%
Total	1,175,000	100,00%

STRUKTUR ORGANISASI IIF

IIF ORGANIZATIONAL STRUCTURE



KALEIDOSKOP TAHUN 2012

HIGHLIGHTS OF THE YEAR 2012



20 MARET 2012
20 MARCH 2012

Penandatanganan Penyertaan Modal
SMBC kepada IIF
Signing of Capital Injection by SMBC
to IIF



14 AGUSTUS 2012
14 AUGUST 2012

Buka bersama dengan Panti Asuhan
IIF Breakfasting with the orphanage



3 AGUSTUS 2012
3 AUGUST 2012

Investor Forum IIGF, IIF,
Kementerian Keuangan dan
SMI di Singapore
Investor Forum IIGF, IIF,
MoF and SMI in Singapore



19 SEPTEMBER 2012
19 SEPTEMBER 2012

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting



26 SEPTEMBER 2012
26 SEPTEMBER 2012

Penandatanganan Perjanjian Kredit
Sindikasi PT Lintas Marga Sedaya
Signing of Syndication Agreement
PT Lintas Marga Sedaya



28 SEPTEMBER 2012
28 SEPTEMBER 2012

Peandatanganan Nota Kesepahaman
antara IIF, Bappenas dan Pemkot
Semarang
Signing of MoU Semarang, IIF, Bappenas
& Pemkot Semarang

8 OKTOBER 2012
8 OCTOBER 2012

Penandatanganan Nota Kesepahaman IIF
& PT Permata Bank Tbk
Signing MoU IIF & Permata Bank



11 NOPEMBER 2012
11 NOVEMBER 2012

Rapat Rencana Kerja dan
Outing IIF, Bali
Meeting Business Plan &
Outing IIF, Bali



▲
OKTOBER 2012/
OCTOBER 2012

Halal bihalal IIF
Halal bihalal IIF

13 DESEMBER 2012
13 DECEMBER 2012

Penandatanganan Nota
Kesepahaman antara IIF &
Pemprov Sulawesi Tengah
Signing of MoU IIF & Pemprov
Central Sulawesi



28-31 AGUSTUS 2012
28-31 AUGUST 2012

Konferensi dan Eksibisi Infrastruktur
Internasional Indonesia
Indonesia International Infrastructure
Conference & Exhibition (IIIEC)



2012 IKHTISAR KEUANGAN

2012 FINANCIAL HIGHLIGHTS



180%

▲
peningkatan
Laba Bersih
increase in
Net Income

2012 FINANCIAL HIGHLIGHTS

Kinerja Keuangan Utama

Key Financial Results

Laba bersih PT Indonesia Infrastructure Finance meningkat sebesar 180% dari rugi bersih sebesar Rp 17,69 miliar pada tahun 2011 menjadi laba bersih sebesar Rp 14,24 miliar pada tahun 2012, terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari investasi.

The net income of PT Indonesia Infrastructure Finance has increased by 180% from a net loss of Rp 17.69 billion in 2011 to a net income of Rp 14.24 billion in 2012, mainly due to the increase of the revenue from the investment.

POSISI LAPORAN KEUANGAN / STATEMENT OF FINANCE POSITION

Dalam Jutaan Rupiah/(In million Rupiah)

Keterangan Descriptions	31 Desember December 2012 (Rp Juta / Million)		(%)
Total Aset/ Total Assets	1.969.042	↑	103%
Total Ekuitas/ Total Equity	1.173.578	↑	21%
Pendapatan/ Revenue	65.768	↑	167%
Beban Usaha/ Operation Expenses	50.512	↑	12%
Laba Sebelum Pajak/ Income Before Tax	15.256	↑	175%
Laba Bersih/ Net Income	14.242	↑	180%

Pendapatan dan Beban Operasi

Di tahun 2012, pendapatan IIF tumbuh sebesar 167% dari Rp 24,63 miliar di tahun 2011 menjadi Rp 65,77 miliar di tahun 2012, yang terutama disumbang oleh pendapatan dari penempatan pada deposito berjangka dan reksa dana.

Beban operasi IIF meningkat sebesar 12,36% dari Rp 44,96 miliar menjadi Rp 50,51 miliar terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi, yang berasal dari kenaikan gaji dan tunjangan dari Rp 10,57 miliar menjadi Rp 30,08 miliar. Hal ini tidak bisa dihindari dalam rangka menyelesaikan kesiapan organisasi IIF secara fungsional baik untuk *front-end* maupun *back-end*.

Jumlah Aset dan Ekuitas

Aset tumbuh sebesar 103% dari Rp 970,32 miliar menjadi Rp 1.969,04 miliar. Hal ini terjadi karena pencairan pinjaman subordinasi dari ADB dan World Bank sebesar USD 81 juta.

Ekuitas meningkat sebesar 21% atau Rp 207 miliar, terutama disebabkan oleh masuknya Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai pemegang saham IIF yang baru, dan sebagian karena pencatatan laba bersih tahun 2012 sebesar Rp 14,24 miliar.

Revenue and Operating Expenses

In 2012, IIF's revenue grew by 167% from Rp 24.63 billion in 2011 to Rp 65.77 billion in 2012 which was mainly contributed by the income from placement in time deposits and mutual funds.

The operating expenses of IIF increased by 12,36% from Rp 44.96 billion to Rp 50.51 billion which was mainly due to the increase in general and administrative expenses, contributed by the increase in salaries and benefits from Rp 10.57 billion to Rp 30.08 billion. This is inevitable in order to complete IIF's organizational readiness for both front-end and back-end functions.

Total Assets and Total Equity

Asset grew by 103% from Rp 970.32 billion to Rp 1,969.04 billion. This was due to the drawing of subordinated loans from ADB and World Bank amounting to USD 81 million.

The equity increased by 21% or Rp 207 billion mainly due to the entrance of Sumitomo Mitsui Banking Corporation as a new shareholder of IIF and partly contributed by the booking of net income of Rp 14.24 billion in 2012.



Pada tahun ketiga IIF mulai mencetak Laba Bersih.

In the third year IIF started to generate Net Income.





Stasiun Kereta Api Tanjung Priok
Jakarta, Indonesia
Tanjung Priok Railway Station
Jakarta, Indonesia

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORTS

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONER

Pemegang Saham yang Terhormat,

Sebagai salah satu pelaku perdana di bidang pendanaan infrastruktur di Indonesia, IIF telah berhasil melalui tahun 2012 dengan beberapa pencapaian yang membanggakan dalam hal pengakuan dari pasar, pengembangan organisasi, dan penyelesaian transaksi.

Kehadiran IIF dengan beragam permintaan khas, khususnya menyangkut pengembangan sosial dan lingkungan, tidak memiliki preseden sebelumnya di dalam negeri. Namun demikian IIF menerima tantangan untuk memasarkan konsep tersebut dan hasilnya semakin lama semakin dapat diterima secara positif oleh berbagai klien prospektif. Meskipun kompetisi di pasar pendanaan masih sangat ketat dan para pesaing IIF dapat beroperasi pada tatanan yang lebih baik, patut dicatat bahwa IIF telah meletakkan landasan yang signifikan menuju penyelenggaraan proyek infrastruktur yang lebih baik di Indonesia. IIF optimis untuk dapat menjadi model teladan dengan penerapan tata kelola dan tanggung jawab yang lebih baik atas pendanaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Dalam rangka mendukung penetrasi dan pengembangan pasar, IIF menggarisbawahi bahwa beberapa proses pokok seperti manajemen risiko, sistem informasi *back-office*, sistem pengendalian dan audit, serta perencanaan terhadap pengembangan sosial dan lingkungan pada proyek-proyek yang telah disetujui, telah disiapkan dan diimplementasikan. Posisi-posisi utama telah lengkap dan kebijakan-kebijakan pokok di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas telah disiapkan pula oleh manajemen.

Dear Shareholders,

As an emerging player in infrastructure finance market in Indonesia, IIF have successfully completed the year of 2012 with several notable achievements in terms of market recognition, organizational development, and transaction arrangements.

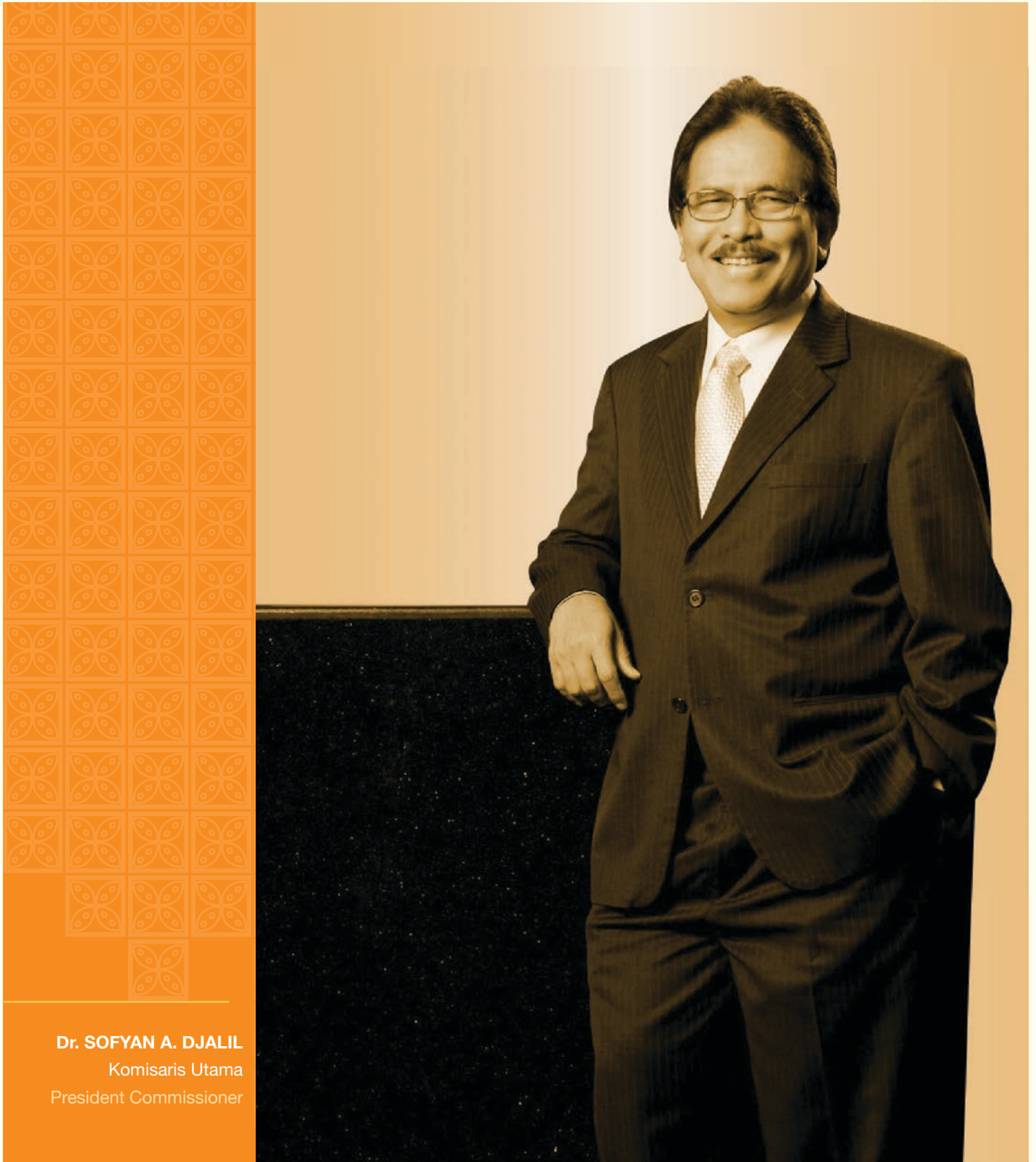
IIF's market presence with its characteristic demands, particularly on social and environment covenants, has been unprecedented for local standards; but IIF has taken the challenge to sell this concept to the market and this has been accepted better and better with growing recognition among prospective clients of its positive aspects. While competition with traditional financiers is still really tight and the competitors may operate at a higher playing field, it must be noted that IIF has put in place a significant milestone towards the better shape of infrastructure projects in Indonesia. We have high expectations that we will be an exemplary role model for better governance and more responsible infrastructure project financing in Indonesia.

In order to support further market penetration and development, IIF would emphasize that several key processes such as risk management, back-office information systems, control systems and audit as well as social and environment plans for approved projects, have been established and implemented. Key organization roles have been fully staffed and key policies on human resources management and capacity building have been put in place as well.



“IIF telah menempatkan tonggak sejarah penting menuju kondisi proyek infrastruktur di Indonesia yang lebih baik.”

“IIF has put in place a significant milestone towards the better shape of infrastructure projects in Indonesia.”



Dr. SOFYAN A. DJALIL
Komisaris Utama
President Commissioner

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONER

Dalam kerangka keseimbangan antara kepatuhan yang tinggi terhadap standar, agenda pembangunan, tujuan komersial, persaingan pasar dan *risk appetite*, patut ditekankan bahwa untuk pertama kalinya pendapatan yang bersejarah dari bisnis inti perusahaan telah dibukukan.

Pada bulan September 2012 untuk **pertama kalinya** IIF menandatangani kontrak penyediaan pinjaman jangka panjang untuk proyek jalan tol di Jawa Barat.

Permintaan atas proyek-proyek infrastruktur yang semakin bertumbuh di Indonesia akan membuka peluang bagi akselerasi pertumbuhan IIF, dan yang lebih meyakinkan bahwa proses transaksi menunjukkan prospek yang cerah. Posisi keuangan saat ini telah memadai untuk mendanai proyek-proyek awal, namun demikian mengingat besaran transaksi prospektif maka tambahan setoran modal merupakan keharusan untuk dapat mendukung komitmen pendanaan investasi yang telah direncanakan.

Kami memahami sepenuhnya bahwa pada saat ini, besaran angka-angka bukanlah hal yang terpenting, akan tetapi semangat pantang menyerah dari seluruh jajaran Direksi IIF dan seluruh karyawan demi pencapaian yang lebih baik di masa yang akan datang sesuai rencana usaha merupakan hal yang mendorong keyakinan kita.

Within the balanced framework of high compliance standards, developmental agenda, commercial objectives, market forces and risk appetite, it must be underlined that historical initial revenue from core business has been booked.

In September 2012 IIF committed its **first deal** by entering into an agreement for the provision of a long term loan to part-finance a toll road project in West Java.

The growing demand for infrastructure projects in Indonesia will open the opportunities to further accelerated growth of IIF and more encouragingly, the transaction pipeline process is showing bright prospects. The current financial position has been sufficient for financing initial projects; however, due to prospective deals, a further capital call requirement will be necessary to cover projected investment commitments.

We understand that for the time being, it is not the numbers that are really the most important thing, but the relentless determination of all IIF board members and employees for future accomplishment as stated in the business plan which is really encouraging us.

SAMBUTAN DEWAN KOMISARIS

MESSAGE FROM THE BOARD OF COMMISSIONER

Atas nama Dewan Komisaris, dalam kesempatan ini saya menghaturkan banyak terima kasih kepada segenap pihak yang berdedikasi penuh sehingga tercapai keberhasilan saat ini. Seluruh anggota Direksi dan karyawan yang penuh perjuangan memang layak untuk mendapatkan apresiasi yang tinggi.

Dengan komitmen penuh dari seluruh Pemegang Saham, kami berharap dapat menyajikan kinerja yang semakin cemerlang di tahun 2013 dan juga tahun-tahun selanjutnya.

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to take this opportunity to thank all those who have already rendered dedication to our achievements. All our committed Board of Directors members and all of our dedicated staffs really deserve high appreciation.

With the full commitment from all of our shareholders, we look forward to an even more remarkable performance in 2013 and beyond.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,



Dr. Sofyan A. Djalil
Komisaris Utama
President Commissioner

DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

Dewan Komisaris
per 31 Desember 2012:
Board of Commissioners
as of 31 Desember 2012:

Dari kiri ke kanan
From Left to Right

Dr. Sofyan Djalil
Komisaris Utama
President Commissioner

Dr. Marwanto Harjowiryo
Komisaris
Commissioner

Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum
Komisaris
Commissioner

Arif Baharudin SE,MBA
Komisaris
Commissioner

Hans-Juergen Hertel
Komisaris
Commissioner

Robert Olivier Dolk
Komisaris
Commissioner

Rajeev Kannan
Komisaris
Commissioner





PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Dr. Sofyan Djalil
Komisaris Utama
President Commissioner

Dr. Sofyan Djalil saat ini menjabat sebagai penasehat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masalah ekonomi khususnya untuk penyelesaian hambatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sebelumnya, beliau adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (2007-2009) dan Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi (2004-2007). Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, gelar MA dalam Kebijakan Publik, MA dalam Hukum dan Diplomasi dan gelar PhD dari Tufts University. Di IIF, beliau juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit.

Dr. Sofyan Djalil currently serves as an adviser to the Vice President of the Republic of Indonesia for economic affairs particularly for debottlenecking infrastructure development in Indonesia. Formerly, he was Minister for State-owned Enterprises (2007-2009) and Minister for Information and Communication Technology (2004-2007). He obtained a Law Degree from the University of Indonesia, an MA in Public Policy, an MA in Law and Diplomacy and a PhD degree from Tufts University. In IIF, he is also the Chairman of Audit Committee.

Saat ini, Dr. Marwanto Harjowiryo menjabat sebagai Direktur Jenderal *Perimbangan Keuangan* di Departemen Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) 2009-2011 dan juga menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Anggota Komite Anggaran ADB. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan gelar Master dari Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat serta gelar Doktor dari Universitas Gadjah Mada.

Currently, Dr. Marwanto serves as Director General of Fiscal Balance under Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. Previously, he served as Executive Director of Asian Development Bank (ADB) from 2009 to 2011 and also served as Chairman of Ethics Committee and Member of Budget Review Committee of ADB. He obtained a Bachelor Degree in Economics from Gadjah Mada University, Yogyakarta, and a Masters Degree from Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, USA as well as a Doctoral Degree from Gadjah Mada University.

Dr. Marwanto Harjowiryo
Komisaris
Commissioner



PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum
Komisaris
Commissioner

Saat ini, Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum adalah penasihat senior untuk Grup Pengawas dan Direktur Khan Bank di Mongolia. Beliau telah menjabat sebagai Wakil Presiden Regional World Bank untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2000-2005 dengan tanggung jawab menyediakan pinjaman dan bantuan teknis di 22 negara termasuk Indonesia. Sebelum bergabung dengan World Bank, beliau bekerja di International Finance Corporation (IFC) selama 25 tahun dan diangkat sebagai Wakil Presiden Operasional Investasi dari tahun 1992 dan seterusnya. Beliau meraih gelar di bidang Teknik Sains dan Ekonomi dari Universitas Oxford dan MBA dari Harvard Business School.

Currently, Jemal is a senior advisor to the Monitor Group and Director of Khan Bank in Mongolia. He has served as the World Bank's Regional Vice President for East Asia and Pacific region in 2000-2005 with responsibility for providing loans and technical assistance in 22 countries including Indonesia. Prior to joining the World Bank, he worked at the International Finance Corporation (IFC) for 25 years and was appointed as Vice President of Investment Operations from 1992 onwards. He earned a degree in Engineering Science and Economics from Oxford University and an MBA from Harvard Business School.

Hans-Juergen Hertel memulai karirnya di DEG (Deutsche Investitions-und mbH) pada tahun 1990 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kantor DEG di Jakarta. Beliau lulus dari Universitas Terbuka Berlin, jurusan Ekonomi Politik & Administrasi Bisnis. Hans juga menjabat anggota Komite Audit di IIF.

Hans-Juergen Hertel began his career in DEG (Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH) in 1990 and has previously served as Director of the DEG Office in Jakarta. He graduated from Free University of Berlin, majoring in Political Economy & Business Administration. In IIF, Hans is also a member of Audit Committee.

Hans-Juergen Hertel
Komisaris
Commissioner



PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Arif Baharudin SE, MBA
Komisaris
Commissioner

Robert Dolk telah memiliki pengalaman yang luas selama lebih dari 30 tahun di bidang jasa keuangan, dengan bekerja di Australia, Eropa dan Asia untuk organisasi seperti BNP Paribas, Banque Nationale de Paris dan Deutsche Bank. Beliau diangkat sebagai Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance pada tanggal 15 Agustus 2012, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Independen Non-Eksekutif Zurich Financial Services Australia Limited (sejak Desember 2008), LawCover Asuransi Pty Limited (sejak April 2010), dan di Amber Holdings (sejak Maret 2011).

Robert Dolk has had extensive experiences for over 30 years in financial services, working in Australia, Europe and Asia for organizations such as BNP Paribas, Banque Nationale de Paris and Deutsche Bank. He was appointed as Commissioner of PT Indonesia Infrastructure Finance on August 15, 2012, and currently he also serves as Independent Non-Executive Director of Zurich Financial Services Australia Limited (since December 2008), LawCover Insurance Pty Limited (since April 2010), and in Amber Holdings (since March 2011).

Saat ini Arif Baharudin SE, MBA menjabat sebagai Direktur Aset Negara II di Direktorat Pengelolaan Aset Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Kaltim Industrial Estate, Bontang. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Kepala Biro Standar Akuntansi dan Keterbukaan, Bapepam-LK, Departemen Keuangan Republik Indonesia dari 2006 hingga 2009. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang, dan gelar MBA di bidang Keuangan dari Universitas Denver, Colorado, Amerika Serikat. Arif Baharudin juga merupakan anggota Komite Audit di IIF.

Currently Arif Baharudin SE, MBA serves as Director of State Assets II in the Directorate of State Assets Management, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and he is also a Commissioner of PT Kaltim Industrial Estate, Bontang. Previously, he served as Head of Accounting Standards and Transparency Bureau, Bapepam-LK, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia from 2006 to 2009. He obtained a Bachelor Degree in Accounting from Brawijaya University, Malang and an MBA Degree in Finance from Denver University, Colorado, USA. In IIF, Arif is also a member of Audit Committee.

Robert Olivier Dolk
Komisaris
Commissioner



PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



▲
Rajeev Kannan
Komisaris
Commissioner

Rajeev baru-baru ini dipromosikan sebagai General Manager, *Project & Export Finance Department* (PEFD) dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) di Tokyo. Beliau juga menjabat sebagai General Manager Investment Banking Department, Asia, yang didirikan pada tanggal 2 April 2012 untuk menyediakan produk dan platform solusi bagi klien di kawasan Asia Pasifik. Sebelum pindah ke Tokyo, beliau bermarkas di Singapura sebagai General Manager & Head dari Structured Finance Asia Pasifik (SFAP) di SMBC. Rajeev memiliki lebih dari 18 tahun pengalaman di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah dalam memberi saran kepada klien di berbagai infrastruktur, KPS dan transaksi energi. Beliau meraih gelar manajemen dan teknik dari Birla

Rajeev has recently been promoted to be the General Manager, Project & Export Finance Department (PEFD) of Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) in Tokyo. Rajeev is also a General Manager of the Investment Banking Department, Asia, which was established on April 2, 2012 to provide a single product and solutions platform for clients in the Asia Pacific region. Prior to moving to Tokyo, Rajeev was based in Singapore and was General Manager & Head of Structured Finance Asia Pacific (SFAP) at SMBC. Rajeev has over 18 years of experience in the Asia Pacific and Middle East region advising clients on various infrastructure, PPP and energy transactions. He earned his management and engineering degrees from Birla

LAPORAN DIREKSI

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Para Pemegang Saham Yang Terhormat,

Dengan penuh rasa syukur saya ingin menyampaikan bahwa IIF di tahun 2012 telah mencanangkan kembali inisiatifnya untuk menjadi salah satu katalis untuk mendorong investasi infrastruktur di Indonesia. Didorong oleh komitmen dan tekad dari tim manajemen baru dan dukungan yang kuat dari Dewan Komisaris, IIF mampu menyusun kesiapan organisasi, memperkuat permodalan dan kembali memasuki pasar pada waktu yang sama. Tahun 2012 ditandai oleh beberapa tonggak: masuknya SMBC sebagai investor baru dari sektor swasta, penandatanganan komitmen pinjaman pertama IIF, penandatanganan beberapa penunjukan IIF sebagai penasihat di sektor publik dan swasta, dan penarikan Pinjaman Subordinasi pertama dari World Bank dan Asian Development Bank melalui Departemen Keuangan dan PT. SMI. Dengan fondasi yang kuat ini, kami percaya bahwa IIF sekarang telah siap untuk mewujudkan visi pemegang saham.



“Pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sehat di Indonesia merupakan peran utama IIF”

“Our role is to establish a sound infrastructure projects in Indonesia”

Kondisi Ekonomi Terkini

Perekonomian Indonesia terbukti kokoh dan relatif tidak terpengaruh oleh perlambatan ekonomi global, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2% di tahun 2012. Tahun 2012 juga ditandai dengan naiknya peringkat penilaian Indonesian *Sovereign Risk to Investment Grade* oleh Fitch dan Moody's. Hal ini terutama didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir, pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang bijaksana dan disiplin, dan konsumsi domestik yang kuat serta realisasi investasi.

Dear Shareholders,

I am pleased to report that in the year of 2012 IIF has re-launched its initiative to become one of the catalysts to drive infrastructure investment in Indonesia. Driven by commitment and determination of the new management team and strong support from the Board of Commissioners, IIF was able to prepare the organization readiness, strengthen its capitalization and re-enter the market at the same time. The year of 2012 is marked by several milestones: entrance of SMBC as a new Private Sector Investor, signing of IIF first loan commitment, signing of several public and private sector advisory mandates, and first drawdown of both World Bank and Asian Development Bank Subordinated Loan through Ministry of Finance and PT. SMI. With those strong foundations, we believe that IIF is now in a position to realize shareholders' vision.

Economic Updates

The Indonesian economy was resilient and relatively unscathed by the global slow down, which was shown by the economic growth of 6.2% in 2012. Year of 2012 is also marked by upgrade of Indonesian Sovereign Risk to investment grade by Fitch and Moody's. This is mainly driven by the sustainable growth of Indonesian economy in the recent years, prudent and discipline fiscal and monetary policy implementation, and continuous strong domestic consumption and investment realization.



KARTIKA WIRJOATMODJO
Direktur Utama
President Director

LAPORAN DIREKSI

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB dikelola dengan baik dibawah 25%, sementara defisit fiskal dipertahankan di angka 2% dari PDB, menunjukkan suatu konsistensi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang konservatif. Investasi telah menjadi faktor pendorong kuat pertumbuhan pada tahun 2012, ditandai dengan pertumbuhan investasi domestik sebesar 21,3% (YoY) dan investasi asing sebesar 26,1% (YoY), dengan total realisasi investasi sebesar Rp 313,2 triliun (lebih dari USD 30 miliar). Pertumbuhan permintaan domestik mencapai 6,2% (YoY) didukung oleh pertumbuhan penduduk kelas menengah yang kuat.

Pada 2012, kredit perbankan memegang peranan penting dalam pembiayaan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan kredit perbankan yang relatif tinggi sebesar 23,1% didukung oleh peningkatan kredit personal, seperti properti dan kendaraan bermotor, serta kredit sektor UKM. Sementara terdapat peningkatan pembiayaan yang cukup signifikan dari pasar modal, perusahaan pembiayaan dan lembaga keuangan non-bank di dalam perekonomian, namun kredit perbankan masih mendominasi total kredit ke sektor swasta.

Walaupun terdapat **pencapaian positif** pada perekonomian Indonesia di tahun 2012, pembangunan infrastruktur tetap menjadi hambatan utama dalam mewujudkan potensi pertumbuhan PDB yang lebih tinggi.

Dengan pengecualian pada pembangunan yang cukup positif di sektor kelistrikan (ditandai dengan naiknya tingkat elektrifikasi menjadi 75,8% pada tahun 2012 dan kemajuan positif dalam proyek *Independent Power Producer* (IPP)), komponen utama lain dari sektor infrastruktur seperti jalan

Government Debt to GDP ratio was well managed under 25%, whilst fiscal deficit was maintained close to 2% of GDP, shown the Government consistency in implementing conservative fiscal policy. Investment has been one of the strong driving factors in 2012 growth, marked by 21,3% (YoY) growth and 26,1% (YoY) growth in domestic and foreign investment respectively, with total actual investment realization of Rp 313.2 trillion (more than USD 30 billion). Domestic demand growth remained buoyant at 6,2% (YoY) supported by strong middle-class population growth.

In 2012, banking credit still played an important role in financing the national economic growth. Relatively high bank's credit growth at 23,1%, was supported by both increasing personal credit, such as property and vehicle, and SME productive loans. While there was quite significant increasing financing role of capital market, finance companies and non-bank financial institutions in the economy, banking credit still dominates the total lending to the private sector.

Despite a relatively **positive achievements** in Indonesian economy in 2012, infrastructure development remained a major bottleneck to realize higher GDP growth potential.

With the exception of reasonably positive development in the electricity sector (marked by increasing electrification rate to 75,8% in 2012 and positive progress in *Independent Power Producer* (IPP) projects), other major components of infrastructure sector such as toll road, port

LAPORAN DIREKSI REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

tol, pelabuhan dan bandara, transportasi kota, pasokan air, tetap tertinggal dalam pembangunan proyek baru. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pelaksanaan KPS guna menarik sektor swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur, meningkatkan anggaran negara yang terbatas dan kapasitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, karena keterbatasan waktu dan kurangnya kemampuan dalam melaksanakan proyek-proyek PPP, ada kecenderungan untuk menunjuk BUMN demi mempercepat penyelesaian hambatan di berbagai sektor, seperti pelabuhan dan bandara.

Penyelesaian Pengembangan Organisasi dan Kesiapan Pertumbuhan

Guna mewujudkan tujuan pendirian IIF sebagai katalisator dalam investasi infrastruktur di Indonesia dan mempromosikan penerapan KPS, IIF harus dilengkapi dengan organisasi yang kuat dan pengetahuan terdepan dalam investasi infrastruktur.

Pada akhir 2012, IIF telah menyelesaikan bagian utama organisasinya, baik di fungsi *front-end* dan *back-end*.

Fungsi *front-end* dibagi menjadi Investasi, *Private Sector Advisory* dan *Public Sector Advisory*. IIF telah memfokuskan upayanya dalam merekrut bakat terbaik (dengan pengalaman perbankan, pasar modal, *advisory*, dan ekuitas swasta) di semua tingkatan guna mempercepat kesiapan tim *front-end*, dan pada saat yang sama melakukan penguatan kemampuan karyawan baru dengan pengetahuan *Project Finance*, yang belum banyak dikembangkan di pasar. Fungsi *back-end* terutama Manajemen Risiko, Operasional Kredit dan Investasi, Keuangan, Tresuri dan IT, yang juga diperkuat oleh karyawan baru yang memiliki pengalaman di industri perbankan dan audit.

and airport, urban transportation, water supply, remained lagging in new project development. Government commits to push PPP implementation to attract private sector involvement in infrastructure project development, to boost the limited state budget and State-Owned Enterprises (SOEs) capacity. However, due to time constraints and lack of capability in implementing PPP projects, there is a tendency to appoint SOEs to speed up the de-bottlenecking in several sectors, such as port and airport.

Establishment of Organization Building and Readiness To Grow

To realize its establishment objective as catalyst in infrastructure investment in Indonesia and promote PPP implementation, IIF has to be equipped with strong organization and leading-edge knowledge in infrastructure investment.

By the end of 2012, IIF has completed major parts of its organizational building, both in front-end and back-end functions.

The front-end functions are divided into Investment, Private Sector Advisory and Public Sector Advisory. IIF has focused its efforts in recruiting good talents from the market (with banking, capital market, advisory, private equity experiences) at all level to fulfill the need to speed-up the readiness of the front end team, and at the same time strengthening the new recruits with Project Finance knowledge, which is less-developed in Indonesian market. The back-end functions are mainly the Risk Management, Credit & Investment Operations and Finance, Treasury & IT functions, which are also staffed with new recruits mainly with banking and audit experiences.

LAPORAN DIREKSI

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

Selama tahun 2012, kami juga melaksanakan berbagai program untuk menjabarkan proses utama dalam organisasi, dari proses investasi *end-to-end*, resiko kredit, sosial & lingkungan (*social & environment*), manajemen risiko, manajemen keuangan, pengadaan, akuntansi dan sistem pelaporan keuangan, fungsi audit internal, sampai dengan Sumber Daya Manusia.

IIF saat ini telah siap menjalankan kegiatan operasionalnya dan mendukung pertumbuhan investasi yang signifikan, dengan tetap menjaga manajemen risiko yang *prudent*, penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sistem operasi terbaik.

Tantangan Utama

Sebagai lembaga yang baru didirikan dengan **karakteristik unik** (baik dalam *risk appetite* dan kebutuhan untuk menerapkan Standar Kinerja Multilateral), IIF menghadapi beberapa tantangan dalam menentukan dan melaksanakan strategi untuk memasuki pasar.

Pada saat menetapkan target pasar dan *pipeline*, IIF perlu menetapkan keseimbangan, di mana beberapa aspek harus dipertimbangkan yaitu: ketersediaan peluang pembiayaan yang sesuai dengan tujuan sektor IIF, *risk appetite* dan tujuan pengembalian risiko yang sepadan, serta kemauan dan kemampuan sponsor proyek untuk mematuhi dan menerapkan Standar Kinerja IIF.

IIF juga menghadapi situasi pasar yang sangat kompetitif, didorong oleh kinerja ekonomi Indonesia dan profil risiko pengembalian yang relatif lebih baik. IIF mengamati agresivitas bank asing, bank

During the year of 2012, IIF has also put various programs to detail-out and launch most of key processes in the organization, from investment end-to-end process, credit and social & environmental, risks management, treasury management, procurement operation, accounting and financial reporting systems, internal audit function, to HR operation.

IIF is now certainly ready to run its operational activity at full speed and supporting a significant growth of investments, whilst maintaining a prudent risk management approach, implementing good corporate governance and implementing best practice operation systems.

Key Challenges

As a newly established institution with **unique characteristics** (both in term of risk appetite objective and the need to implement Multilateral Performance Standards), IIF faces several challenges in determining and executing our strategy to enter the market.

IIF needs to strike a balance when it determines its target market and pipeline, in which it has to consider several aspects: availability of financing opportunities suitable to IIF sector objectives, risk appetite and commensurate risk return objective, and willingness and ability of the project sponsor to comply with and implement IIF Performance Standards.

IIF also faces market situation, which are very competitive, driven by Indonesia good economic performance and relatively better risk return profile. IIF observes the aggressiveness of

LAPORAN DIREKSI REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

domestik, dan cabang atau anak perusahaan bank asing dalam memberikan pembiayaan kepada berbagai proyek dan sponsor proyek di hampir semua segmen dan profil risiko. Selalu ada institusi keuangan kompetitor dalam setiap transaksi, termasuk transaksi *high yield* yang berisiko tinggi.

Selama 2012, IIF mengidentifikasi dan mengusulkan sejumlah proyek potensial yang meliputi: jalan tol, energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga gas, menara telekomunikasi, penyediaan dan distribusi air. Dalam rangka peningkatan asetnya, IIF mengkombinasikan berbagai struktur jenis peluang pembiayaan seperti: proyek pembiayaan *green-field*, *refinancing* dan neraca pembiayaan terhadap operator infrastruktur/pengembang; dan dalam hal produk: pinjaman pembiayaan proyek *senior non-recourse/limited-recourse*, *balance sheet loan* dan pinjaman subordinasi/*mezzanine*. IIF berhasil menandatangani satu kesepakatan komitmen kredit di tahun 2012.

IIF percaya dengan pengalaman yang dimiliki dalam memasuki pasar di tahun 2012 akan membantu IIF dalam menetapkan **target pasar dan pipeline yang lebih fokus** pada tahun 2013

Tim IIF saat ini lebih kuat dan memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam menentukan target *risk-return* dalam profil kredit dan dalam pelaksanaan Standar Kinerja IIF.

Tonggak Sejarah Utama

1. Pada Maret 2012, proses masuknya *Private Sector Investor* (SMBC) pertama telah selesai.

foreign banks, domestic banks, and branches or subsidiary of foreign banks in providing financing to various projects and project sponsors in almost all segments and risk profiles. There are always competing institutions in any deals, including in the high-risk high-yield category deals.

During 2012, IIF has sourced and proposed quite a number of potential projects in several sectors such as: toll road, renewable energy, gas-fired power plant, telecom tower, water supply and distribution. In order to speed up its assets building, IIF combined different types of financing opportunities in term of structure: green-field project financing, refinancing and balance sheet financing to infrastructure operator/developer; and in term of product: senior non-recourse/limited-recourse project finance loan, balance sheet loan and mezzanine/subordinated loan. IIF managed to bring one deal to commitment signing stage in 2012.

IIF believes that its experiences in entering the market in 2012 will give us a more **focused target market and pipeline** in 2013.

IIF team is now stronger and has better knowledge on the targeted risk-return profile and implementation of IIF Performance Standard.

Key Milestones

1. By March 2012, IIF's first Private Sector Investor (SMBC) entrance process was completed.

LAPORAN DIREKSI

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

2. Tim Investasi IIF telah memberikan komitmen pinjaman pertama sebesar Rp 500 miliar untuk mendukung pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan pada September 2012.
3. Tim *Advisory* IIF telah menandatangani tiga perjanjian *advisory*: (i) *Advisory* proyek pengairan swasta Bandar Lampung untuk mendukung salah satu konsorsium penawar pada Agustus 2012, (ii) Perjanjian sebagai *Transaction Advisor* Pemerintah Kota Semarang proyek Air Minum KPS Semarang Barat pada September 2012 dan (iii) Perjanjian sebagai *Transaction Advisor* Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk membantu pelaksanaan Fasilitas Dana Geothermal dan proses transaksi lebih lanjut untuk proyek KPS Bora Pulu Geothermal pada Desember 2012.
4. Perubahan struktur pinjaman subordinasi dari World Bank dan Asian Development Bank telah disetujui dan *tranche* pertama dari pinjaman telah ditarik pada akhir 2012.
2. IIF's Investment team has executed its first signed loan commitment amounting to Rp 500 billion to support development of Cikampek-Palimanan toll road in September 2012.
3. IIF's Advisory teams have signed three advisory agreements: (i) Bandar Lampung Water private project advisory to support one of the consortium bidders in August 2012; (ii) MoU as Transaction Advisor to City of Semarang Government for transaction process of West Semarang Water Supply PPP Project in September 2012 and (iii) MoU as Transaction Advisor to Provincial Government of Central Sulawesi to assist in the implementation of Geothermal Fund Facility and future transaction process of Bora Pulu Geothermal PPP Project in December 2012.
4. The changes in structure of subordinated loans from World Bank and Asian Development Bank were approved and 1st tranche of loans were drawn by end of 2012.

Masa Depan Yang Menjanjikan

Pada 2013 IIF akan terus menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

1. Menciptakan 'Niche Market' - IIF sebagai penyedia *quasi-equity* bagi sponsor proyek dan pengembang.
2. Menyediakan pinjaman jangka panjang - IIF sebagai penyedia pembiayaan jangka panjang. Menjadi katalisator dan menangkap peluang pasar di masa kini, IIF menyediakan pinjaman jangka panjang dalam Rupiah dan USD.
3. Menetapkan alur keputusan proyek yang kuat - khususnya pembiayaan proyek yang *feasible* untuk membangun infrastruktur.
4. Berperan sebagai katalis untuk memperdalam pasar obligasi lokal.
5. Membangun entitas keuangan "One Stop" yang menyediakan instrument pembiayaan dan jasa *advisory*.

A Promising Future

In 2013 IIF will continue to implement its business strategy as follows:

1. Create a 'Niche Market' - IIF as a quasi-equity provider to project sponsors and developers.
2. Provide long term funding - IIF as a long-term financing provider. To catalyze and tap the current market opportunities, IIF provides long-term Rp loan and/or long term USD loan.
3. Establish a strong deal flow of projects - particularly feasible project financing to develop infrastructure.
4. Act as a catalyst to deepen the local bond market
5. Establish a "One Stop" financing entity providing innovative financing instruments and advisory services.

LAPORAN DIREKSI
REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

IIF memiliki **rencana ambisius** untuk pengembangan usaha jangka panjang.

IIF percaya bahwa pertumbuhan akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan tidak hanya bagi IIF dan Pemegang Saham, namun juga untuk perekonomian Indonesia. IIF menyadari bahwa IIF tidak bisa mengabaikan tantangan membangun dan berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur ke depan. Namun, dengan pengembangan organisasi dan pengalaman untuk memasuki pasar pada tahun 2012,

IIF percaya telah berada pada arah yang tepat untuk menciptakan **momentum pertumbuhan** di masa depan.

Dengan fokus pada strategi bisnis, pengetahuan dan kapasitas tim, dan dukungan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, IIF berkomitmen untuk dapat menghasilkan nilai dan menjadi salah satu kontributor utama pembiayaan infrastruktur di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang.

Ijinkan saya menutup laporan ini dengan menyatakan kebanggaan saya pada tim IIF yang telah membawa kita ke titik ini, dan terima kasih kepada para pemegang saham IIF, atas dukungannya yang terus berkelanjutan.

IIF has **ambitious plans** for the long-term development of IIF.

IIF believes that its growth will generate lasting benefits not only for IIF and the Shareholders, but also to Indonesian economy. IIF realizes that it cannot ignore the challenges in building and investing in infrastructure development ahead. However, with the organization building and experience to enter the market in 2012,

IIF believes that we are now on the right path to create **momentum of growth** going forward.

With focused business strategy, knowledge and capacity of IIF team, and the Board of Commissioners and Shareholders' support, IIF looks forward to generating value and becoming one of the major contributors to infrastructure financing in Indonesia in the years to come.

Let me close by expressing my pride in IIF team for bringing us to this point, and my gratitude to you, our shareholders, for your unwavering support.

Atas nama Direksi,

On behalf of the Board of Directors,



Kartika Wirjoatmodjo

Direktur Utama

President Director

DIREKSI DAN MANAJEMEN

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT

Direksi dan Manajemen
per 31 Desember 2012:
Board of Directors
and Management
as of 31 Desember 2012:

Dari kiri ke kanan
From Left to Right

Wito Krisnahadi
Managing Director
Head of Risk

Haruhiko Takamoto
Managing Director
Head of International Client
Investment

Richard Michael
EVP Private Sector Advisory

Harold Tjiptadjaja
Managing Director
Head of Domestic Client
Investment

Kartika Wirjoatmodjo
President Director

Irman Boyle
EVP Public Sector Advisory





PROFIL DIREKSI DAN MANAJEMEN

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT PROFILE



Kartika Wirjoatmodjo
Direktur Utama
President Director

Sebelum bergabung dengan PT Indonesia Infrastructure Finance sebagai Direktur Utama, Kartika Wirjoatmodjo menjabat sebagai *Managing Director* PT Mandiri Sekuritas hingga September 2011. Beliau juga menjabat sebagai *Senior Vice President/Group Head Strategy & Performance* di Bank Mandiri sampai tahun 2008. Sebelumnya, Beliau adalah seorang konsultan strategi di Boston Consulting Group dan penasihat keuangan di PricewaterhouseCoopers. Meraih gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, dan MBA dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Belanda pada tahun 2001.

Prior to joining PT Indonesia Infrastructure Finance as President Director, he served as Managing Director of PT Mandiri Sekuritas until September 2011. He also served as Senior Vice President/ Group Head of Strategy & Performance in Bank Mandiri until 2008. Previously, he was a strategy consultant at Boston Consulting Group and a financial advisor at PricewaterhouseCoopers. He obtained a Bachelor Degree in Accounting from the University of Indonesia in 1996, and an MBA from the Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands in 2001.

Harold Tjiptadjaja diangkat sebagai *Managing Director* dan *Head of Domestic Client Investment* di IIF pada Desember 2011. Sebelum bergabung dengan IIF, beliau adalah *Vice President* untuk *Earth Investment Group* (2010-2011) dan *Corporate Finance Partner* di Indoconsult Prima (2009-2011). Sebelumnya, beliau adalah *Vice President* di Sinarmas Group di Indonesia dan Belanda sejak 2007 hingga 2008. Beliau memperoleh gelar *Master of Science* di bidang Ekonomi Keuangan dari Universitas Erasmus, Rotterdam, Belanda pada tahun 1997.

Harold was appointed as a Managing Director and Head of Domestic Client Investment in IIF in December 2011. Prior to joining IIF, he was a Vice President of Earth Investment Group (2010-2011) and Corporate Finance Partner at Indoconsult Prima (2009-2011). Previously, he was a Vice President of Sinarmas Group in Indonesia and the Netherlands from 2007 until 2008. He obtained a Master of Science Degree in Financial Economics from Erasmus University, Rotterdam, Netherlands in 1997.

Harold Tjiptadjaja
Managing Director,
Head of Domestic Client Investment.



PROFIL DIREKSI DAN MANAJEMEN

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT PROFILE



Haruhiko Takamoto
Managing Director,
Head of International Client Investment

Sebelum bergabung dengan IIF sebagai *Chief Risk Officer*, Wito Krisnahadi menjabat sebagai *Head of Credit Risk* dan *Senior Wholesale Credit Analyst* di PT Rabobank International Indonesia dari tahun 2010. Sebelumnya, beliau adalah seorang *Senior Credit Manager* di PT Bank DBS Indonesia 2008-2010. Beliau adalah profesional keuangan dan risiko kredit yang berdedikasi dengan pengalaman luas baik lokal dan internasional di bidang perbankan, keuangan perusahaan, pembiayaan proyek dan pengelolaan pinjaman. Beliau memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari Curtin University of Technology, Perth di tahun 1996, dan *Master of Business Administration* dari Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Belanda pada tahun 2004.

Prior to joining IIF as Chief Risk Officer, Wito Krisnahadi served as Head of Credit Risk and Senior Wholesale Credit Analyst in PT Rabobank International Indonesia from 2010. Previously, he was a Senior Credit Manager in PT Bank DBS Indonesia from 2008 to 2010. He is a dedicated finance and credit risk professional with extensive local and international experience in banking, corporate finance, project finance and loan workouts. He obtained a Bachelor of Commerce from Curtin University of Technology, Perth in 1996, and Master of Business Administration from the Rotterdam School of Management, Erasmus University, Rotterdam, Netherlands in 2004.

Haruhiko Takamoto diangkat sebagai *Managing Director* dan *Head of International Client Investment* di IIF pada April 2012. Beliau adalah *Deputy General Manager* di *Structured Finance Department*, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) di Tokyo dari Juni 2009 sampai April 2012. Sebelumnya, beliau juga seorang *Deputy General Manager Structured Finance Asia Pasifik*, SMBC di Sydney (Juni 2007 - Juni 2009) dan *Senior Vice President of Structured Finance Department*, SMBC di Osaka (Januari 2006 - Juni 2007). Beliau memperoleh gelar *Master of Business Administration* dari School of Business, New York University, Amerika Serikat pada tahun 1995.

Haruhiko Takamoto was appointed as a Managing Director and Head of International Client Investment in IIF in April 2012. He was a Deputy General Manager in the Structured Finance Department, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) in Tokyo from June 2009 until April 2012. Previously, he was also a Deputy General Manager of Structured Finance Asia Pacific, SMBC in Sydney (June 2007 – June 2009) and Senior Vice President of Structured Finance Department, SMBC in Osaka (January 2006 – June 2007). He obtained a Master of Business Administration Degree from School of Business, New York University, United States of America in 1995.

Wito Krisnahadi
Managing Director,
Head of Risk



PROFIL DIREKSI DAN MANAJEMEN

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT PROFILE



Irman Boyle
Executive Vice President
Head of Public Sector Advisory Group

Irman Boyle joined IIF in April 2012. He has about 15 years experience in multilateral institutions and consulting firms (IFC, ADB, IIE/Energy Group, and PA Consulting), working in advisory service and public sector lending for energy and infrastructure projects. While with IFC, he worked in PPP Transaction Advisory Department in its Jakarta office, advising government clients on a coal-fired IPP project and a water supply project. Until August 2011, he was also Indonesia country representative for Private Finance Advisory Network (PFAN) where he provided project and financial advice for successful financial closings of several renewable energy IPP projects. Irman holds an MBA from Cass Business School at City University London, UK (1999), and an undergraduate degree in electrical engineering from Bandung Institute of Technology, Indonesia (1993).

Irman Boyle bergabung dengan IIF pada April 2012. Beliau memiliki 15 tahun pengalaman bekerja di institusi multilateral dan perusahaan konsultan (IFC, ADB, IIE Energy Group dan PA Consulting) di bidang jasa konsultasi dan pendanaan sektor publik untuk proyek energi dan infrastruktur. Pada saat bersama IFC, beliau berada di Departemen PPP Transaction Advisory di kantor Jakarta, memberikan konsultasi kepada pemerintah dalam proyek coal-fired IPP dan proyek pengadaan air. Sampai bulan Agustus 2011, beliau juga merupakan perwakilan negara Indonesia untuk Private Finance Advisory Network (PFAN) dimana beliau memberikan konsultasi proyek dan keuangan terhadap keberhasilan beberapa penyelesaian pendanaan proyek-proyek energi IPP yang dapat diperbarui. Irman memiliki gelar MBA dari Cass Business School of City University London UK (1999) dan gelar sarjana muda Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung Indonesia (1993).

PROFIL DIREKSI DAN MANAJEMEN

BOARD OF DIRECTORS AND MANAGEMENT PROFILE



Richard Michael
Executive Vice President
Head of Private Sector Advisory

Richard Michael was appointed as Executive Vice President – Head of Private Clients Advisory on 1 April 2012. He has more than 28 years experience in financial services, mainly in infrastructure project finance. Prior to joining IIF, Richard was Managing Director, Head of Infrastructure Finance – Asia Pacific at DEPFA Bank. He also held positions as Head of Structured Trade Finance, NE Asia at Standard Chartered, Executive Director, Global Specialised Finance at WestLB and various positions with Barclays. He has worked in Asia since 1989, of which 10 years have been based in Jakarta, Indonesia. He graduated with a BA in History and Modern Languages from Magdalen College, Oxford and has an MBA degree from Leicester University.

Richard Michael menjabat sebagai Executive Vice President - Head of Private Clients Advisory pada tanggal 1 April 2012. Beliau telah memiliki pengalaman lebih dari 28 tahun dalam institusi keuangan, terutama dalam infrastructure project finance. Sebelum bergabung dengan IIF, Richard merupakan Managing Director, Head of Infrastructure Finance - Asia Pacific di DEPFA Bank. Jabatan beliau yang lain diantaranya adalah sebagai Head of Structured Trade Finance, NE Asia di Standard Chartered, sebagai Executive Director, Global Specialised Finance di WestLB dan berbagai posisi di Barclays. Beliau telah bekerja di regional Asia sejak tahun 1989, dimana sekitar 10 tahun di antaranya di Jakarta, Indonesia. Beliau memperoleh gelar Sarjana Sejarah dan Bahasa Modern (History and Modern Languages) di Magdalen College, Oxford dan gelar MBA di Leicester University.





Pintu Tol Cikarang Cikampek,
Jawa Barat, Indonesia.
Cikarang Cikampek Toll Gate,
West Java, Indonesia.

MEMPERKOKOH INVESTASI
INVESTING WITH RESILIENCE

MEMPERKOKOH INVESTASI

INVESTING WITH RESILIENCE



“IIF merupakan lembaga keuangan non-bank dengan fokus pada investasi di proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.”

“IIF is a non-bank financial institution with focus on investing in commercially feasible infrastructure projects”

Mencapai
Rp 3,8 TRILIUN
peluang pembiayaan

Reached
RP 3.8 TRILLION
financing opportunities

Pengembangan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat. Konstruksi baru jalan tol, pelabuhan dan bandara, transportasi perkotaan dan pengelolaan air minum, masih tertinggal dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan untuk fasilitas tersebut. Pengecualiannya adalah di sektor listrik dan telekomunikasi. Program *Fast Track* 1 dan 2 yang dimulai pada tahun 2006 telah memicu peningkatan kapasitas listrik. Sementara liberalisasi sektor telekomunikasi yang dimulai sejak tahun 1999 telah menyebabkan industri ini mengalami pertumbuhan yang tinggi.

Komitmen Pemerintah untuk mendorong pembangunan infrastruktur tetap tinggi. Skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) diperkenalkan pada tahun 2005 untuk menarik investor dan penyandang dana swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pelaksanaan KPS masih terkendala oleh kurangnya kemampuan dalam mempersiapkan dan menyusun proyek. Perkembangan yang lambat memicu kecenderungan Pemerintah untuk menunjuk BUMN guna mempercepat penyelesaian hambatan di beberapa sektor, seperti pelabuhan, bandara dan jalan tol.

Infrastructure Development

Infrastructure development in Indonesia is progressing slowly. The new constructions of toll road, port and airports, urban transportation, and drinking water remain lagging than their demand growth. The exceptions are in the power sector and telecommunication. The Fast Track programmes 1 and 2 which were started in 2006 have increased the electricity supply. Whilst the liberalization of telecommunication sector initiated in 1999 has caused the industry to experience high growth.

The Government's commitment to push the infrastructure development remains high. Public Private Partnership scheme was introduced in 2005 to attract private investors and lenders to participate in infrastructure development. Nevertheless, the implementation of PPP is still constrained by the lack of capability in the preparing and structuring the project. The slow development triggered the tendency of the Government to appoint State Owned Enterprise to speed up the de-bottlenecking in several sector, such as port and airport, and toll roads.

Pasar Utang yang Kompetitif

Persaingan di pasar utang sangatlah ketat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat dan profil risiko pengembalian yang relatif lebih baik. Fitch Ratings menaikkan Peringkat *Sovereign* Indonesia dari BB+ menjadi BBB- pada Desember 2011, diikuti oleh Moody's yang menaikkan Peringkat *Sovereign* Indonesia dari Ba1 menjadi Baa3 pada Januari 2012. Kedua peringkat *Sovereign* yang baru menyiratkan bahwa Indonesia kini dianggap sebagai negara dengan *investment grade*.

Di sektor perbankan, bank-bank domestik serta cabang atau anak perusahaan bank asing menjadi agresif dalam memberikan pinjaman, terutama untuk perusahaan yang memiliki risiko kredit yang baik. Rata-rata *Prime Lending Rate* untuk kredit korporasi yang ditawarkan oleh bank-bank di Indonesia mengalami penurunan dari 10,18% p.a di bulan Desember 2011 menjadi 9,73% p.a di bulan November 2012. Di sisi lain, saldo pinjaman yang diberikan oleh bank-bank di Indonesia meningkat dari Rp 2.200 triliun pada akhir Desember 2011 menjadi Rp 2.708 triliun pada akhir Desember 2012. Persaingan akan terus terjadi termasuk untuk high-yield transaksi beresiko tinggi.

Namun demikian, IIF memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bank-bank di Indonesia. IIF dapat menyediakan skema pembiayaan untuk proyek infrastruktur, melalui pembiayaan pinjaman jangka panjang dengan tenor hingga 15 tahun. Suatu komitmen dimana ini merupakan hal yang pada umumnya bank-bank di Indonesia belum merasa nyaman untuk menawarkan kepada nasabah. Selain itu, IIF mampu menyediakan pembiayaan *mezzanine* dan investasi ekuitas untuk klien tertentu.

Competitive Debt Market

The competition in the debt market is intense, driven by the robust economic growth and relatively better risk return profile. Fitch Rating upgraded Indonesia Sovereign rating from BB+ to BBB- in December 2011, followed by Moody's that upgraded Indonesia Sovereign rating from Ba1 to Baa3 in January 2012. Both new Sovereign ratings implied that Indonesia is now considered as an Investment Grade country.

In the banking sectors, domestic banks as well as branches or subsidiaries of foreign banks are aggressive to provide loans, especially to corporates that have a good credit risk. The average Prime Lending Rate for corporate loan offered by banks in Indonesia decreased from 10,18% p.a in December 2011 to 9,73% p.a in November 2012. On the other hand, the loan outstanding provided by banks in Indonesia increased from Rp 2,200 trillion by end of December 2011 to Rp 2,708 trillion by end of December 2012. The competition is expected to remain fierce in the debt market, even for the high-risk high-yield transactions.

Nevertheless, IIF has a competitive advantage compared to banks in Indonesia. IIF's nature is to provide project financing scheme to infrastructure projects, whereby IIF can offer term loan financing up to 15 years. This is an area where banks in Indonesia have not yet comfortable to offer to their clients. In addition, IIF is able to provide mezzanine financing and equity investments to certain clients.



Ivan Sumampouw
SVP Investment

"Tim investasi kami terdiri dari manajer investasi yang berdedikasi dan berpengalaman yang dapat memberikan solusi kebutuhan pembiayaan klien dalam proyek-proyek infrastruktur, saya percaya dengan pengalaman saya sebelumnya di bidang investment banking dan kombinasi kemampuan analisis dan interpersonal yang kuat akan memberikan sinergi yang kuat dan memegang teguh visi dan misi IIF dalam komitmennya untuk melayani sektor infrastruktur Indonesia".

"Our investment team consists of dedicated and experienced investment managers who can provide solution to client's financing needs in infrastructure projects, I believe with my previous experience in investment banking and a combination of strong analytical and interpersonal skills will deliver strong synergy and uphold the vision and mission of IIF in its commitment to serving the Indonesia infrastructure sector".

MEMPERKOKOH INVESTASI INVESTING WITH RESILIENCE



Rama A. Panjaitan
VP Investment

“IIF memiliki potensi besar untuk tumbuh. IIF memiliki berbagai macam produk untuk mendukung pengembang infrastruktur yang baik mewujudkan proyek-proyek yang layak secara ekonomis dengan struktur pembiayaan proyek. Saya percaya pengalaman saya dalam pekerjaan sebelumnya sebagai bankir investasi dan bankir perusahaan akan memberikan kontribusi untuk IIF meraih portofolio investasi infrastruktur yang baik.”

“IIF has huge potential to grow. IIF has wide range of products to support good infrastructure developers to realize their economically feasible projects with project finance structure. I believe my experience in previous job as investment banker and corporate banker will contribute to IIF to have good infrastructure investment portfolios.”

Kinerja Tim Investasi di Tahun 2012

Sejalan dengan persiapan kapasitas tim Investasi dan Manajemen Risiko, selama 2012 tim Investasi berhasil mengidentifikasi dan mengembangkan *pipeline* yang terdiri dari proyek-proyek infrastruktur yang beragam dengan peluang pembiayaan sejumlah Rp 3,8 triliun. *Pipeline* tersebut mencakup sektor jalan tol, energi terbarukan, pembangkit listrik tenaga gas, menara telekomunikasi, pelabuhan, dan pasokan & distribusi air. Proyek-proyek tersebut sesuai dengan mandat IIF seperti tercantum dalam PMK 100/2009.

Biasanya pembiayaan proyek membutuhkan *lead-time* yang memakan waktu untuk penutupan transaksi. Dari total *pipeline* yang teridentifikasi, tim Investasi telah mengajukan 18 proposal kepada Komite Kredit IIF untuk mendapatkan persetujuan dengan jumlah nilai pembiayaan sebesar Rp 3.817 triliun, dimana 39% untuk sektor listrik dan energi, 22% sektor telekomunikasi, 18% sektor air minum & industri, 13% sektor jalan tol, dan sisanya 8% sektor pelabuhan. Tiga proyek telah disetujui oleh Komite Kredit IIF dengan jumlah total pembiayaan **Rp 833 miliar**, atau 21,8% dari total proyek yang diajukan. Sisa proposal sebesar Rp 2.115 miliar masih dalam proses persetujuan.

Dari 3 proyek yang disetujui, IIF mencatat tonggak sejarah penting pada tahun 2012 melalui kesepakatan pertama dalam pembiayaan jalan tol dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 500 miliar. Proyek ini merupakan bagian dari jaringan jalan Tol Trans Jawa, yang diharapkan untuk selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2014. Selain menjadi proyek pertama yang disepakati, kami percaya bahwa proyek ini juga merupakan proyek penting bagi Indonesia.

Investment Team Performance in 2012

While building up capacity in Investment and Risk Management, during 2012 Investment team managed to identify and develop pipelines which consist of diverse infrastructure projects with financing opportunities of Rp 3.8 trillion. The pipelines cover sectors of toll road, renewable energy gas-fired power plant, telecommunication tower, seaport, and water supply and distribution. These projects are in line with our mandate as laid out in PMK 100/2009.

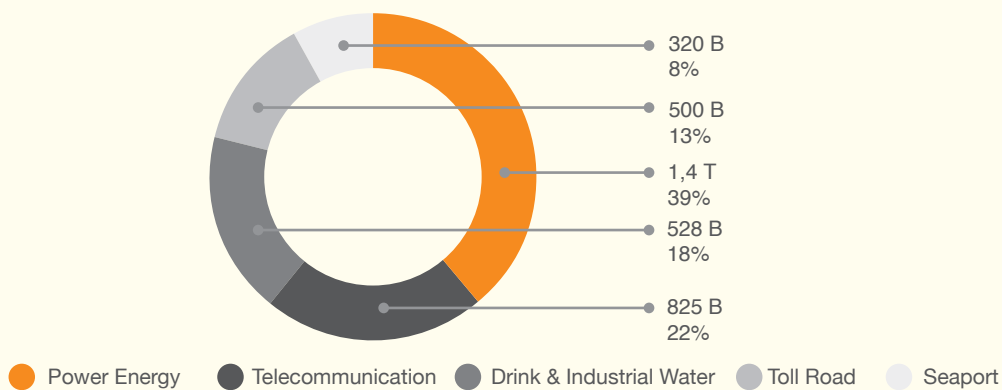
Typically project finance requires a long-lead time to deal closing. From the total identified pipelines, Investment team has submitted 18 proposals to IIF's Credit Committee for approval with total financing amount of Rp 3,817 trillion; of which 39% in power and energy sector, 22% in telecommunication sector, 18% in drinking and industrial water sector, 13% in toll road sector, and the remaining 8% in the seaport sector. Three projects were approved by our Credit Committee with total financing amount of **Rp 833 billion**, equal to 21,8% from the total amount of the submitted projects. The remaining proposals amounting to Rp 2,115 billion are still under approval process.

From the 3 approved projects, IIF achieved a major milestone in 2012 through its first signed deal in toll road financing with a total financing amount of Rp 500 billion. This project is part of the Trans Java Toll Road network, which is expected to complete and commence operation in 2014. Aside from being IIF's first closed project, this is also a landmark project for Indonesia.

MEMPERKOKOH INVESTASI
INVESTING WITH RESILIENCE

Proyek-proyek selebihnya yang masih menunggu proses persetujuan, yang telah disusun dan dipastikan di tahun 2012, akan terwujud pada semester I 2013.

The remaining projects under approval process, that was built-up and secured in 2012, will be significantly materialized in the first semester of 2013.

Total Pipeline 2012**Tantangan Masa Lalu dan Masa Depan**

Melihat perjalanan sepanjang tahun 2012, IIF menghadapi tantangan internal maupun eksternal. Tantangan utama IIF pada tahun 2012 terdiri dari:

- Ukuran pendanaan: jumlah maksimum *single borrower* IIF relatif kecil dibandingkan dengan total biaya proyek dari sebuah proyek infrastruktur;
- Prinsip-prinsip Sosial dan Lingkungan IIF: sebagai lembaga pembiayaan pembangunan, IIF adalah advokat untuk pengembangan proyek-proyek berkelanjutan dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan untuk proyek dalam kaitannya dengan risiko Sosial dan Lingkungan yang melekat namun terkadang tidak diindahkan dalam proyek infrastruktur;

Past and Future Challenges

Reflecting through the whole year of 2012, IIF has faced internal as well as external challenges. IIF main challenges in 2012 consisted of:

- Size of funding: Maximum single borrower exposure is relatively small compared to a typical total project cost of such an infrastructure project;
- IIF's Social and Environment Principles: as an Agent of Development, IIF is the advocate to the development of sustainable and responsible projects. These principles serve as safeguard for the projects in relation to the Social and Environmental risks, that are inherent but often undermined in infrastructure projects;

MEMPERKOKOH INVESTASI INVESTING WITH RESILIENCE



- Proyek infrastruktur dengan alokasi risiko yang efisien: jumlah proyek infrastruktur dengan alokasi risiko yang efisien masih relatif kecil. Kerjasama Pemerintah Swasta membutuhkan waktu lebih lama guna persiapan dan pengembangan, menyebabkan terbatasnya pasokan proyek yang baik dan siap. Kondisi seperti ini tentunya akan mengarah kepada peningkatan persaingan dipasar utang.
- Efficient risk-allocated infrastructure projects: The number of efficient risk-allocated infrastructure projects is still relative small. Public Private Partnerships require longer time to prepare and develop, leads to limited supply of good and ready projects. This condition consequently leads to an increased competition in the debt market.

Pada tahun 2013, IIF akan memfokuskan strateginya pada penyederhanaan proses investasi, penyesuaian proyek yang ditargetkan dan seleksi klien pada preferensi Risiko Investasi IIF, manajemen proyek yang efisien & efektif, dan pemantauan serta kemampuan eksekusi yang kuat.

“In 2013, IIF strategies will focus on streamlining our investment process, aligning targeted projects and clients’ selection to IIF’s Investment Risk preference, pursuing efficient and effective project management and monitoring, as well as strong execution capabilities”

Kami akan mengadopsi skenario moderat sebagai fokus strategis, yang berfokus pada keuntungan dengan menggabungkan *high profile - greenfields project* dengan proyek operasi *brownfields*, dan memberikan fasilitas *mezzanine* dengan jenis risiko yang wajar. Kami telah mengidentifikasi inisiatif berikut untuk mencapai tujuan bisnis pada tahun 2013:

IIF will adopt a moderate scenario as our strategic focus, which means having a moderate focus on profit by combining high profile – green-field projects with brown-field operating projects, and providing a manageable risk type of mezzanine facility. IIF has identified the following initiatives in order to achieve the business objectives in 2013:

- Mengidentifikasi dan membangun hubungan yang kuat dengan klien utama yang potensial, yang merupakan pemain utama di setiap sektor dengan *track record* sejarah yang baik;
- Menerapkan seleksi ketat bagi suatu proyek, dimana kami hanya akan melanjutkan proyek-proyek yang memiliki probabilitas tinggi untuk diselesaikan;
- Identifying and building a strong relationship with potential main clients, which are the main players in each sector that have good historical track record;
- Applying a strict selection in pursuing identified projects, whereby only projects that have high probability to close will be proceed;

MEMPERKOKOH INVESTASI

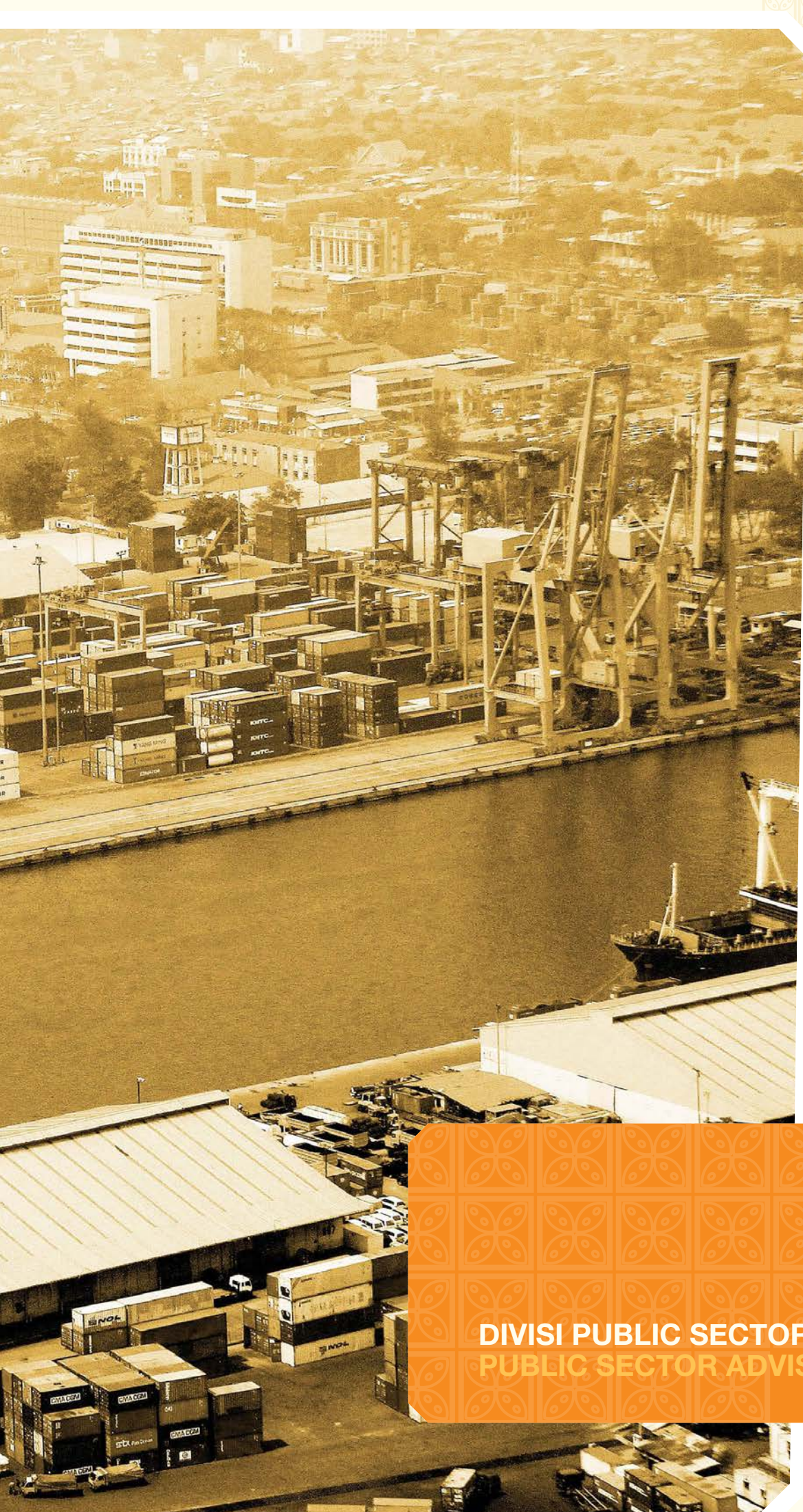
INVESTING WITH RESILIENCE

- Menyederhanakan proses persetujuan internal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses persetujuan investasi;
- Melakukan penilaian dan pemantauan dinamis per kuartal bagi proyek *pipeline*, melalui *update* reguler terhadap *pipeline* yang telah disepakati dengan probabilitas keberhasilan;
- Berfokus pada manajemen portofolio aktif melalui analisis reguler dan rekomendasi pada profil portofolio dengan target diversifikasi sektor, alokasi risiko kredit, margin dan durasi.
- Koordinasi yang erat dengan tim Manajemen Risiko dan Komite Kredit untuk menentukan dan menyepakati *risk appetite*, serta mempertahankan prinsip-prinsip *four eyes* antara tim Investasi dan tim Manajemen Risiko,
- Streamlining internal approval process to increase the efficiency and effectiveness of investment approval process;
- Conducting a quarterly dynamic assessment and monitoring the project pipeline, through regular updates on the profitability of success on each project in the pipeline;
- Focusing on active portfolio management through a regular analysis and recommendation on portfolio targets i.e sector diversification, allocation of credit risks, margin and duration;
- Coordinating closely with the Risk Management team and Credit Committee to determine and agree on risk appetite, while maintaining the four-eye principles between Investment and Risk Management team.

Pada tahun 2014 dan seterusnya, sebagai bagian dari perluasan dan diversifikasi sumber pembiayaan, kami mempertimbangkan untuk memainkan peran yang lebih signifikan dengan menyediakan investasi yang relatif berisiko, yang akan membuahkan hasil yang lebih baik seperti investasi dalam ekuitas untuk proyek-proyek infrastruktur kepada project company ataupun sponsor.

In 2014 onwards, as part of IIF's funding base enlargement and diversification, IIF is considering to play a more significant role by providing relatively risky investments which generate better yield such as equity investment in the infrastructure projects in both the project company and the sponsor.





Pelabuhan Peti Kemas Tanjung Priok
Jakarta, Indonesia
Tanjung Priok Port
Jakarta, Indonesia

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY
PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY

PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP



terminal Balikpapan

PSA dibentuk untuk berperan sebagai Agen Pengembangan Infrastruktur.

PSA was established to take the role of Agent of Infrastructure Development

Di tahun 2012, IIF menandatangani dua Nota Kesepakatan dengan Pemerintah.

In 2012, IIF has signed two Memorandum of Understanding with the Government

Kebutuhan atas Jasa Konsultasi Dalam Persiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Infrastruktur

Pemerintah Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur demi mencapai target pertumbuhan ekonomi negara sebesar 6-7% per tahun. Diakui juga pentingnya bekerja sama dengan sektor swasta, tidak hanya untuk memaksimalkan efisiensi layanan dan inovasi, namun juga untuk menyediakan jumlah modal yang dibutuhkan guna membiayai investasi besar yang diperlukan untuk proyek-proyek infrastruktur. Sehingga, yang dibutuhkan meliputi (i) kerangka kerja kondusif yang akan mendorong partisipasi sektor swasta, perangkat kebijakan, regulasi, dan insentif yang akan menarik investasi swasta, (ii) *pipeline* untuk proyek-proyek di berbagai sektor infrastruktur, dimana struktur dan model transaksi dapat direplikasi secara nasional.

Upaya telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir untuk mengubah dan memperbaiki kerangka hukum bagi transaksi proyek infrastruktur agar menjadi lebih transparan, adil, dan akuntabel

The Need For Advisory Services In the Preparation and Transaction Phase of Infrastructure Projects

The Government of Indonesia realizes the urgent need for investment in infrastructure development to achieve the country's economic growth target of 6-7% per annum. It also recognizes the importance of collaborating with the private sector, not only to maximize service efficiencies and innovations, but also to provide the much needed capital to finance the huge investment required for public infrastructure projects. What required is then (i) a conducive framework that will encourage private sector participation, a set of policy, regulation, and incentives that will attract private investment, (ii) a pipeline of bankable projects across infrastructure sectors, whose structure and transaction model may be replicable nation-wide.

Efforts have been made in the past several years to amend and improve the legal framework for infrastructure project transactions in order to make them more transparent, fair, and accountable thus

sehingga mampu menarik investor swasta dan kreditor. Suatu peraturan penting yang dibuat dalam konteks ini adalah skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), yang secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Presiden (PePres) No 67/2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir melalui PePres No. 56/2011, yang mengatur mekanisme proses tender dan penyediaan dukungan Pemerintah, yaitu dalam bentuk dukungan fiskal langsung dan kontijensi melalui jaminan Pemerintah.

Namun demikian, modalitas KPS terlaksana pada tempo yang relatif lambat. Sejak dikeluarkannya peraturan KPS, hanya satu proyek yang telah mencapai penandatanganan Perjanjian KPS, yaitu Proyek PLTU 2x1000 MW Jawa Tengah, di mana PLN berfungsi sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Kondisi ini merupakan akibat dari beberapa faktor, yang paling umum adalah (i) terbatasnya jumlah proyek KPS yang terstruktur dengan baik di Indonesia, dan (ii) kurangnya kapasitas PJPK untuk mempersiapkan dan melaksanakan transaksi. Hal ini dapat dipahami karena skema KPS merupakan skema yang kompleks dibandingkan dengan pengadaan publik secara tradisional yang keseluruhannya dibiayai oleh APBN.

Menyadari pentingnya penawaran proyek yang disiapkan dengan baik, dan proses pengadaan/tender yang kredibel untuk calon investor,

IIF melihat adanya **peluang bisnis** untuk menjadi penasihat bagi Pemerintah dalam pelaksanaan transaksi.

able to attract private sector investors and lenders. A prominent regulation issued in this context is public-private-partnership (PPP) scheme, formally established through the Presidential Regulation (PR) No. 67/2005 on Public-Private-Partnership on Infrastructure Procurement, as has been amended twice, the last one through PR No. 56/2011, in which it governs among others, the mechanism of the tender process and the provision of government supports, i.e. in the form of direct fiscal support and contingent support through government guarantee.

Nevertheless, the PPP modality is picking up at a relatively slow rate. Since the issuance of the PPP regulation, only one PPP project has reached the signing of the PPP Agreement, that is the 2x1000 MW Central Java Coal-Fired Power Plant, at which PLN serves as the contracting agency. This predicament is a result of several factors, the most common ones are (i) limited number of well-conceived, well-structured PPP projects in Indonesia, and (ii) the lack of capacity within the contracting agencies to prepare and execute the project transactions. This is understandable as PPP scheme by default is a more complex procurement process compared to the traditional public procurement entirely funded by the state budget.

Realizing the importance of offering well-prepared projects and credible procurement/tender process to potential investors,

IIF sees a **business opportunity** to advise government contracting agencies with the transaction implementation.

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY

PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP

Selain kemampuan perbankan terhadap proyek, persiapan dengan kualitas yang baik dan penasehat transaksi yang kredibel adalah sangat penting dalam menarik minat investor untuk berpartisipasi dalam transaksi proyek KPS. Hal ini, pada gilirannya akan melengkapi berbagai inisiatif Pemerintah yang komprehensif dalam rangka peningkatan dan percepatan pembangunan infrastruktur, dengan mengatasi *barrier to entry* dan mengupayakan adanya kesetaraan kesempatan demi memperluas basis investor swasta. Pemahaman IIF atas sektor swasta, pemahaman yang baik tentang hubungan lokal dan internasional serta kedekatan dengan Pemerintah, mampu menciptakan kapasitas yang diperlukan bagi IIF untuk mengisi peran *transaction advisory*. IIF kerap berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi dengan Pemerintah terkait berbagai kebijakan mengenai infrastruktur, sehingga dapat memberikan perspektif dan advis yang baik pada klien dalam hal penstrukturan dan pelaksanaan transaksi.

Peluang tersebut mendorong IIF untuk membentuk Divisi Public Sector Advisory (PSA) pada awal 2012. Peranan divisi PSA lebih lanjut dikonfirmasi dan didukung oleh Pemerintah, seperti yang ditunjukkan dalam surat Menteri Keuangan Nomor S-388/MK.011/2012 tanggal 1 Juni 2012. Surat Menteri Keuangan tersebut menegaskan tujuan utama pendirian IIF, yaitu

IIF diharapkan bertindak sebagai **Agen Pembangunan Infrastruktur**, bagi proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan partisipasi sektor swasta.

In addition to bankability of the project itself, high quality project preparation and credible transaction advisor are critical to soliciting investors' appetite to participate in a PPP project transaction. This in turn will complement the government's comprehensive initiatives in promoting and accelerating infrastructure development by removing barrier to entry and leveling playing field for a wider base of private sector investors. IIF's private-sector skills, on-the-ground team, good understanding of local and international as well as close relationship with the government provide IIF with the required capacity to fill in the role of transaction advisor. IIF often acts as a sounding board to government ministries for policy and project consultation and thus is able to offer its public and private sector clients a front-row perspective and advise in project structuring and transaction execution.

Such opportunity and urgency drove IIF to set up the Public Sector Advisory (PSA) Group in early 2012. The intended role for the PSA Group were further confirmed and supported by the government, as pointed out in the Minister of Finance letter No. S-388/MK.011/2012 dated 1 June 2012. The letter reaffirms the main and initial objective of IIF's establishment, and that

IIF is expected to act as an **Agent of Infrastructure Development**, for infrastructure projects involving private sector participation.

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY

PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP

Tugas yang diberikan tidak hanya mencakup kegiatan investasi, tetapi juga konsultasi untuk sektor swasta dan sektor publik. Mandat ini juga secara khusus menyebutkan peran *transaction advisory* bagi pihak Pemerintah/PJPK dalam transaksi KPS, dan bagi BUMN/BUMD dalam transaksi *Business-to-Business*.

Divisi Public Sector Advisory IIF

Tahun 2012 menandai pembentukan Divisi PSA, yang merupakan wakil IIF dalam memberikan jasa *advisory* kepada klien sektor publik, yaitu sektor kementerian, Pemerintah daerah, atau dalam hal tertentu, BUMN/BUMD, dalam penataan dan implementasi transaksi dan pengadaan proyek infrastruktur, terutama yang dilakukan melalui skema KPS.

Dalam suatu jasa *advisory*, divisi PSA akan melakukan *due diligence* proyek secara lengkap, mencari umpan balik dari pasar yang berkaitan dengan proyek, menyiapkan struktur proyek yang *bankable*, dan membantu PJPK dalam menyiapkan dan melaksanakan proses tender secara kompetitif, transparan, dan akuntabel. Proses ini juga akan melibatkan penilaian kebutuhan atas dukungan Pemerintah, dalam bentuk dukungan langsung dan/atau dukungan kontinjensi, dan/atau fasilitas lain yang di sediakan Pemerintah, seperti Fasilitas Dana Geothermal dan *land funds*. Setelah penilaian, IIF akan membantu PJPK dalam penyusunan dan pengajuan setiap jenis dukungan Pemerintah yang dianggap diperlukan bagi proyek untuk mendapatkan pendanaan yang dibutuhkan dari perbankan. Diagram berikut menunjukkan seluruh keterkaitan (*value chain*) dari proyek KPS dimana IIF dapat membantu PJPK atau departemen/instansi atau BUMN/BUMD:

The assigned task covers not only investment activities but also advisories to both private and public sectors. The mandate also specifically mentioned the role of transaction advisor to contracting authorities in PPP transactions, and to state-owned/regional-owned enterprises in *Business-to-Business* transactions.

IIF Public Sector Advisory Group

The year 2012 marks the set up of PSA Group, through which IIF provides advisory services to public sector clients, i.e. sector/line ministries, local governments, or in certain cases, state/regionally owned enterprises, in structuring and implementing infrastructure project transactions and procurements, especially those conducted through the PPP scheme.

In a typical advisory mandate, PSA Group will conduct a complete project due diligence, seek market feedback for interest in the project, prepare a bankable project structure, and eventually assist the Government client in preparing and executing the tender process in a competitive, transparent, and accountable manner. The process will also involve assessment of requirement for the Government supports, in the form of direct support and/or contingent support, and/or other Government-provided facility, such as geothermal and land funds. Once the necessary assessment is made, IIF will assist the Government client in the preparation and submission of each type of the Government support deemed required for the bankability of the project. The following diagram shows the entire value chain of a typical PPP project where IIF can assist the contracting authorities or the Government departments/agencies or state-owned/regional-owned companies:



Yayi Rasjid

SVP Public Sector Advisory

“Dengan lebih dari 17 tahun pengalaman di sektor keuangan, terutama dalam pekerjaan saya yang terakhir, memberi saya pengalaman dan pemahaman tentang proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia, khususnya dalam hal penyediaan penjaminan Pemerintah. Dengan bekal tersebut saya berharap dapat membawa nilai tambah dan kontribusi yang signifikan terhadap Divisi Public Sector Advisory.”

“With over 17 years of experience in the financial sector, especially the recent one which gave me the rare exposure and thus has enabled me to become a Public Private Partnership (PPP) project specialists in Indonesia, specifically in regards to the provision of government guarantees, I hope to bring added values and significant contribution to the Public Sector Advisory Group.”

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY

PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP



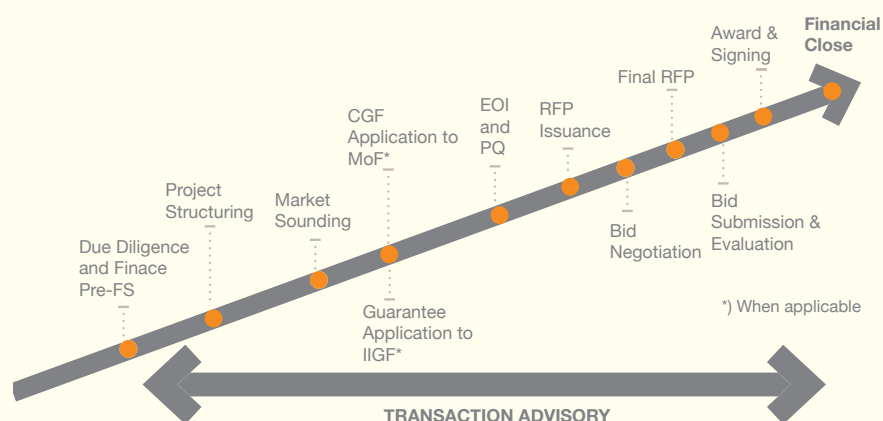
Novianus V. Santoso

VP Public Sector Advisory

“Saya memiliki pengalaman selama 8 tahun dalam bidang *corporate finance* dan mengerjakan transaksi-transaksi M&A dan *investment banking* untuk perusahaan-perusahaan di berbagai sektor unggulan seperti infrastruktur, telekomunikasi, properti, dan lembaga keuangan.

Saya harap saya dapat memberikan nilai tambah bagi Divisi Public Sector Advisory dengan pengetahuan dan keahlian yang saya miliki demi mendukung salah satu tujuan IIF sebagai lembaga strategis dalam pengembangan infrastruktur dan keuangan di Indonesia untuk mendorong realisasi proyek infrastruktur di pasar”.

“I have 8 years of experience in corporate finance consulting, executing M&A and investment banking transactions for companies across leading sectors such as infrastructure, telecommunication, property and financial institutions. I hope I can add value to the public sector advisory team with my knowledge and expertise and support one of IIF's goals as the strategic institution for infrastructure and financial development in Indonesia to push the realization of more well-conceived infrastructure projects to be available in the market”.



IIF percaya bahwa memasuki bisnis jasa penasehat transaksi tidak hanya akan mewujudkan perannya sebagai agen pembangunan dengan membantu Pemerintah dalam menawarkan proyek-proyek infrastruktur yang *bankable*, namun juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang terkena dampak proyek serta menarik lebih banyak investasi baru ke Indonesia sebagai efek *multiplier* dari proyek yang telah berhasil, di mana IIF berperan sebagai *advisor*.

Proyek Penyediaan Air Bersih Semarang Barat

Proyek Penyediaan Air Bersih Semarang Barat dapat menjadi mandat pertama yang diterima IIF. Proyek ini bertujuan untuk memasok air berkualitas bagi wilayah barat Kota Semarang, yang meliputi 31 kecamatan di Kabupaten Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Ngaliyan, yang saat ini belum sepenuhnya dikembangkan oleh PDAM. Kapasitas dari proyek ini mencapai 1.050 liter air bersih per detik, yang bersumber dari Bendungan Jatibarang di Sungai Kreo. Bendungan Jatibarang saat ini masih dalam

IIF believes that entering transaction advisory business will not only realize its role as an agent of development by helping the Government clients in supplying the infrastructure market with bankable projects, but also in increasing the quality of life of people impacted by the projects as well attracting further new investments to Indonesia as a result of multiplier effects of successful projects in which IIF takes part as advisor.

West Semarang Water Supply Project

West Semarang Water Supply Project is potentially the first mandate to be awarded to IIF. The Project is to supply quality water to western area of Semarang City, covering 31 sub-districts in Semarang Barat District, Tugu District, and Ngaliyan District, which currently have not been fully developed by PDAM. The capacity of the project is 1,050 liter per second of clean and safe water supply, sourced from Jatibarang Dam at Kreo River. The Jatibarang Dam is currently still under construction, with expected completion in 2013, while the West

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY

PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP

pembangunan dan diharapkan selesai pada tahun 2013, sedangkan Proyek Penyediaan Air Semarang Barat ditargetkan mulai dibangun pada tahun 2015 dan mulai beroperasi secara komersial pada 2017. Total biaya Proyek Penyediaan Air Semarang Barat diperkirakan sekitar US\$ 78 juta. Pemerintah kota Semarang, sebagai PJP, telah menetapkan bahwa proses pengadaan untuk proyek ini akan dilaksanakan dengan menerapkan skema KPS.

Pemerintah Kota mengidentifikasi kebutuhan **transaction advisor** akan membantu dalam melaksanakan seluruh spektrum proses transaksi dan pengadaan.

Didorong oleh kebutuhan, surat permohonan bantuan untuk *transaction advisory* dikirim oleh Pemerintah Kota Semarang kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dimana kemudian Bappenas meminta kesediaan IIF untuk memberikan jasa. Selanjutnya, Nota Kesepahaman ditandatangani pada September 2012 antara IIF, Bappenas dan Pemerintah Kota Semarang untuk menandai kolaborasi para pihak dalam tahap pengadaan/transaksi proyek.

Berdasarkan kerjasama yang disepakati, selain menjadi *Lead & Coordinating Advisor*, IIF bertanggungjawab untuk menyediakan ahli keuangan, konsultan hukum, konsultan lingkungan & sosial, dan konsultan analisis risiko & Penjaminan Pemerintah, sementara Bappenas melalui *Project Development Facility - Transaction Advisory Services* akan bertanggung jawab untuk memberikan dukungan teknis analisa ekonomi, dan konsultan analisa kerja PDAM.

Semarang Water Supply Project is targeted to start construction in 2015 and commence commercial operation in 2017. The total project cost of West Semarang Water Supply Project is estimated at approximately US\$ 78 million. The Semarang City Government, as the contracting agency, has opted to conduct the procurement process for the project by implementing the PPP scheme.

The City Government identified the need for a **transaction advisor** to assist the City in carrying out the whole spectrum of transaction and procurement process.

Built on the need, a letter requesting assistance for a transaction advisor was sent by the City Government to the National Development Planning Agency (Bappenas), based on which Bappenas inquired the availability of IIF to serve the part. Eventually, a Memorandum of Understanding was signed in September 2012 between IIF, Bappenas and Semarang City Government to mark the collaboration of the parties in the procurement/ transaction phase of the project.

Under the agreed collaboration, aside from being Lead & Coordinating Advisor, IIF is responsible for providing financial specialist, legal consultant, environment & social consultants, and risk & guarantee specialist, while Bappenas through its Project Development Facility – Transaction Advisory Services will be responsible for providing technical, economic, and PDAM specialists.

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY

PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP



Proyek KPS Panas Bumi

Di sektor energi terbarukan, IIF telah bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan diakui sebagai kontributor dalam menciptakan struktur transaksi untuk pelaksanaan program Fasilitas Dana Geothermal (FDG) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada awal 2012. Divisi PSA juga ikut berpartisipasi dalam rangkaian *roadshow* oleh tim Kemenkeu untuk memperkenalkan FDG kepada Pemerintah daerah.

Pada Desember 2012, IIF menandatangani Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang memberikan mandat awal kepada IIF untuk jasa *advisory* dalam proyek panas bumi Borapulu yang berencana untuk mengusulkan penerapan dan pemanfaatan FDG. Dalam prosesnya, Divisi PSA juga memfasilitasi komitmen bersama antara PT PLN (Persero) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk bekerja sama dalam pelaksanaan proyek, sebagai salah satu prasyarat penyediaan FDG.

Proyek Borapulu akan memulai proses tender KPS setelah kegiatan eksplorasi yang didanai FDG yang akan memakan waktu sekitar 2 tahun. Data panas bumi yang merupakan hasil dari tahap eksplorasi yang didanai oleh FDG ini diharapkan membuat proyek lebih menarik bagi calon investor dan lebih *bankable* bagi pemberi dana. Proyek Borapulu diharapkan menjadi proyek percontohan dan model untuk KPS panas bumi lain di Indonesia.

Geothermal PPP Project

In the renewable energy sector, IIF has been working closely with the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance (MoF) and is recognized as the thought leader in creating a transaction structure for the implementation of the Geothermal Fund Facility (GFF) as established by MoF in early 2012. PSA Group also participated in a series of roadshows by the MOF team to introduce GFF to local governments.

In December 2012, IIF entered into an MoU with the Provincial Government of Central Sulawesi, giving IIF initial mandate to advise them in the Borapulu geothermal project which plans to propose the application and utilization of the GFF. In the process, PSA Group also facilitated the joint commitment between PT PLN (Persero) and the Central Sulawesi Provincial Government to cooperate in the project implementation, as one of the prerequisite for the provision of the GFF.

The Borapulu project will commence its PPP tender process after the GFF-funded exploration activities that will take approximately 2 years. The geothermal data yielding from the exploration phase funded by GFF is expected to make the project more attractive to potential investors and more bankable to financiers. The Borapulu project is expected to be the pilot and model project for other geothermal PPPs in Indonesia.

DIVISI PUBLIC SECTOR ADVISORY
PUBLIC SECTOR ADVISORY GROUP**Langkah Strategis di Tahun 2013**

Melangkah ke depan di tahun 2013, Divisi PSA akan memperluas kapasitas untuk dapat memainkan peran lebih besar dalam mendorong dan mempercepat realisasi proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial dan lebih dapat diterima, baik untuk modalitas KPS, maupun non-KPS.

Salah satu strategi utama untuk mendapatkan mandat adalah melalui kerja sama yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan Pemerintah dan terus mengembangkan *franchise* sebagai kontributor dalam konsultasi kebijakan dan transaksi.

Tujuan jangka panjang IIF, antara lain melalui Divisi PSA, untuk **menjadi repositori nasional** atas pengalaman dan keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

Strategic Steps in 2013

Going forward in 2013, PSA Group will expand its capacity further to be able to play greater role in pushing and accelerating the realization of more well-conceived, commercially viable infrastructure projects, for both PPP and non-PPP modalities.

One of the main strategies to secure mandates would be to work closely with various government stakeholders and to continue developing its franchise as a thought leader in policy and transaction consultation.

The long-term goal for IIF, among others through its PSA Group, is **to be the national repository** of experience and skills related to the development and financing of commercially viable infrastructure projects.

A photograph of the Sultan Syarif Kasim Stadium, featuring a large 'X' sculpture and the name 'SULTAN SYARIF KASIM' in large letters. The stadium has a modern design with a curved roof and large glass windows. The sky is blue with white clouds. In the foreground, there is a road with a black and white striped curb and some small plants.

SULTAN SYARIF KASIM

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION AND ANALYSIS

Bandara Sultan Syarif Kasim II
Pekanbaru, Indonesia
Sultan Syarif Kasim II International Airport
Pekanbaru, Indonesia



ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS



Tahun 2012 merupakan tahun ketiga IIF beroperasi. IIF telah membukukan Laba Bersih sebesar Rp 14,33 miliar pada tahun 2012 dibanding Kerugian sebesar Rp 17,69 miliar pada tahun 2011. Pertumbuhan kinerja IIF yang semakin baik menghasilkan tingkat profitabilitas yang lebih baik pula.

2012 represents the 3rd year of IIF's operations. IIF has recorded a Net Profit of Rp 14.33 billion in 2012 compared to a Loss of Rp 17.69 billion in 2011. This is due to IIF's improved performance growth which led to enhanced profitability level.

Ditengah kondisi ekonomi global yang masih mengalami perlambatan, Indonesia berhasil melewati tahun 2012 dengan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan sebesar 6,2%. Pertumbuhan ini banyak ditopang oleh kuatnya sektor konsumsi dan investasi domestik yang didukung oleh daya beli masyarakat serta optimisme pelaku usaha terhadap prospek ekonomi Indonesia. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat pertumbuhan 21,29% untuk investasi domestik (PMDN) dan 26,14% untuk investasi asing (PMA) dibanding pada tahun 2011.

Meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 cukup menggembirakan dan Pemerintah telah berkomitmen untuk memacu pembangunan infrastruktur sebagai upaya akselerasi investasi, keadaan infrastruktur di Indonesia masih belum memadai. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang positif seperti sektor Listrik dan Telekomunikasi. Sektor Listrik memperlihatkan pertumbuhan yang positif selama 5 tahun terakhir, walaupun sedikit stagnan pada tahun 2012 dengan

Amidst the downturn of global economic condition, Indonesia succeeded in sailing through the year of 2012 with a satisfactory economic growth of 6,2%. This growth was mainly supported by strong domestic consumption and investment, which were achieved through consumers spending as well as optimism of business players on Indonesian economic prospect. The Investment Coordinating Board (BKPM) recorded a growth of 21,29% in domestic investment (PMDN) and 26,14% in foreign investment (PMA) compared to 2011.

Despite positive domestic economic growth in 2012, infrastructure condition in Indonesia remained inadequate. The Government has committed to accelerate the infrastructure development as an effort to boost investment in the sector and eventually economic growth. Notwithstanding this Government's commitment and solid economic growth only electricity sector has shown a remarkable growth for the past 5 years, even though it was somewhat stagnant in 2012

hanya kenaikan elektrifikasi sebesar 4%. Sementara pencapaian di sektor-sektor pembangunan infrastruktur yang lain seperti jalan tol, pelabuhan dan bandara, transportasi kota dan pasokan air masih belum menggembirakan.

Data Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional mencatat sepanjang tahun 2012 total pembiayaan infrastruktur mencapai Rp 385,2 triliun atau hanya sekitar 4,51% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Belum baiknya infrastruktur Indonesia juga terekam dalam peringkat infrastruktur dari Global Competitiveness Index tahun 2012-2013 dimana Indonesia masih ada pada urutan ke 78 dari 114 negara, yang meletakkan Indonesia diperingkat kedua terbawah di antara negara-negara asia, hanya lebih baik sedikit dari Filipina.

Realisasi infrastruktur jalan tol menurut Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) diperkirakan hanya bertambah 19.7 km. Rencana pengoperasian 24 ruas tol Trans Jawa yang ditargetkan pada tahun 2013 diperkirakan akan meleset karena masih terkendala berbagai persoalan, terutama terkait masalah pembebasan tanah. Pada sektor listrik, 10.000 MW yang terangkum pada Fast Track 1 program secara kumulatif hanya mencapai 4.510 MW atau belum mencapai separuh dari targetnya. Sedangkan Fast Track 2 program untuk 10.000 MW juga yang didominasi oleh energi terbarukan masih terus dikembangkan.

Salah satu aspek penting dari pembangunan infrastruktur adalah kebutuhan akan dana yang cukup besar dengan jangka panjang. Dana jangka panjang yang besar tidak mungkin sepenuhnya ditopang dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Disisi lain, walaupun persaingan dipasar utang cukup ketat, bank-bank di Indonesia masih belum nyaman untuk memberikan pendanaan jangka panjang. Oleh karena itu, Pemerintah sangat mendukung implementasi dari Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), yang antara lain dapat mengatasi masalah yang ada. KPS dapat menarik sektor swasta yang mampu menyediakan kapital yang besar untuk pembangunan infrastruktur.

marked by only 4% growth in electrification rate. Whilst the achievement of development in other infrastructure sectors such as toll road, ports, urban transportation, and water supply has been far from encouraging.

The Ministry of Planning and National Development posted that during 2012 the total infrastructure financing reached only Rp 385.2 trillion or a mere 4,51% of Gross Domestic Product (GDP). The slow progress of Indonesian infrastructure development was also recorded in the Infrastructure Rating from Global Competitiveness Index 2012-2013, which placed Indonesia at the 78th position out of 114 nations, effectively putting Indonesia as the bottom two amongst Asian nations, slightly better than the Philippines.

The realization of toll roads development, according to the Highways Agency (BPJT), was projected to reach only 19.7 km in 2012. It is doubtful that the completion of 24 lanes of Trans Java Toll Road, targeted for commercial operation in 2014, will be met due to several issues, especially the land acquisition constraints. On the electricity sector, only 4.510MW of the 10.000 MW power plants as part of Fast Track 1 programme completed as of 2012, which is half of the original target. Meanwhile, the construction of the Fast Track 2 programme, another 10.000 MW power plants dominated by private participation and relying on renewable energy is still on going.

One of the important aspects in the infrastructure development is a requirement of a substantial funding with an especially long tenure, a scheme that may not be fully allocated from the State Budget. On the other hand, in spite of a very competitive debt market in Indonesia, banks in Indonesia are still not fully comfortable in providing financing with such a long tenure. Therefore, the Government strongly promotes the implementation of Public Private Partnership (PPP), among others, to address the issue. PPP may attract private sectors contribution in providing substantial capital needed for infrastructure development.



Andi Faizal

VP Financial Controller

“Sebelum bergabung dengan IIF, saya menghabiskan lebih dari 14 tahun bekerja dengan dua dari empat kantor akuntan publik besar (Big 4). Selama masa jabatan tersebut, saya terlibat dalam berbagai penugasan audit di berbagai sektor industri, di mana sepuluh tahun terakhir mengembangkan pengalaman yang luas di bidang jasa keuangan yang meliputi perbankan, sekuritas, pembiayaan dan dana pensiun. Saya percaya dengan pengalaman yang saya peroleh sebelumnya dapat berkontribusi dalam menyiapkan proses standar, serta pengendalian dan pengawasan di divisi akuntansi dan keuangan”.

“Prior to joining IIF, I spent more than 14 years working with two of the “Big 4” accounting firms. During my tenure in those firms I was involved in a range of audit assignments in various industry sectors, in which the last ten years was spent in developing extensive experiences in financial services which include banking, securities, multi finance and pension funds. I believe my experiences could contribute in setting up a standardized process, and control and monitoring for the accounting and finance division”.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS



IIF didirikan sebagai dukungan strategis bagi program Pemerintah, sebagai katalisator investasi infrastruktur di Indonesia, dengan menyediakan pembiayaan infrastruktur alternatif dan mempromosikan implementasi dari proyek infrastruktur berbasis KPS ataupun tidak. IIF menyediakan *fund-based* produk seperti pinjaman senior jangka panjang, pembiayaan proyek, pinjaman *balance-sheet* dan pinjaman *subordinated/mezzanine*, dan *non-fund based* produk seperti garansi. Struktur yang ditawarkan IIF antara lain adalah pembiayaan *green-field* proyek, *refinancing* dan pinjaman *balance-sheet* untuk *operating brown-field* proyek. IIF juga menawarkan jasa *Advisory* terkait dengan pembangunan infrastruktur, dalam memberikan advis untuk implemementasi suatu transaksi baik untuk agen Pemerintah dan sektor swasta.

Selama tahun 2012, IIF telah membentuk bagian utama dari persiapan organisasi. IIF telah merekrut pegawai yang handal dengan latar belakang yang bervariasi dari bidang Keuangan, Banking dan Pembiayaan Proyek, Audit, dan Operasional. IIF juga telah menyelesaikan bagian utama dari sistem dan prosedur untuk back-office, dan menyusun pendekatan manajemen risiko dan audit prosedur yang prudent. Sekarang IIF sudah siap untuk secara total mendukung pertumbuhan investasi yang pesat di Indonesia.

ANALISA LAPORAN KEUANGAN 2012

Hasil Keuangan Utama

Tabel berikut adalah informasi keuangan dari PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") yang diambil dari Laporan Keuangan di tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011. Laporan Keuangan ini telah diaudit oleh KAP Osman Bing Satrio & Eny (sebelumnya KAP Osman Bing

IIF was established as a strategic support for the Government program, a catalyst to infrastructure investment in Indonesia, by providing alternative infrastructure financing and promote implementation of infrastructure projects, both PPP and otherwise. IIF offers both fund based products, such as long terms senior loan, project finance loan, balance sheet loan and subordinated/mezzanine loan, and non-fund based products such as guarantees. In term of structure, IIF has solutions in green-field project financing, refinancing and balance sheet financing/operating brown-field project financing. IIF also provides advisory services related to infrastructure development and advice on the transaction implementation, both to government agencies as well as to private sectors.

During 2012, IIF has established major part of its organizational building. IIF has recruited talents with a variety of back ground in Finance, Banking and Project Financing, Audit and Operations. It has also completed the establishment of main part of back office system and procedure, as well as development of a prudent risk management approach and internal audit procedure. Now IIF is ready to fully support a significant investment growth in Indonesia

ANALYSIS OF THE 2012 FIANCIAL STATEMENTS

Key Financial Results

The following tables represent the financial information of PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF") extracted from the financial statements as of and for the years ended December 31, 2012 and 2011. The financial statements have been audited by KAP Osman Bing Satrio & Eny (previously KAP

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Satrio & Rekan), firma anggota dari Deloitte, Touche Tohmatsu Limited, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan yang masing-masing bertanggal 6 Maret 2013 dan 6 Maret 2012.

Osman Bing Satrio & Rekan), a member firm of Deloitte, Touche Tohmatsu Limited, with an unqualified opinion in its reports dated March 6, 2013 and March 6, 2012, respectively.

LAPORAN POSISI KEUANGAN (dalam jutaan Rupiah)		STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (in million Rupiah)		
	2012 (Rp)	2011 (Rp)	2010 (Rp)	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	1.783.281	948.276	74.879	Cash and cash equivalents
Unit penyertaan reksadana	152.487	-	-	Investment in mutual funds unit
Piutang usaha	645	-	-	Account receivable
Aset tetap - bersih	3.578	3.261	3.998	Property and equipment - net
Deposito berjangka - dibatasi	-	-	559.698	Time deposits - restricted
Aset pajak tangguhan	19.435	7.544	-	Deferred tax assets
Beban tangguhan	-	5.549	7.506	Deferred charges
Aset lain-lain	9.616	5.690	1.400	Other assets
JUMLAH ASET	1.969.042	970.320	647.480	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang lain-lain	1.673	279	4.802	Other payables
Utang pajak	506	257	267	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lainnya	10.896	2.947	25	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.022	-	-	Provision for employee benefit
Pendapatan diterima dimuka	3.750	-	-	Unearned revenue
Liabilitas di bawah CSL	-	-	557.855	Liability under CSL
Pinjaman subordinasi	777.616	-	-	Subordinated loan
Jumlah Liabilitas	795.464	3.484	562.949	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham	1.175.000	1.000.000	100.000	Capital stock
Agio saham	17.500	-	-	Additional paid-in capital
Rugi komprehensif lain	(85)	-	-	Other comprehensive loss
Akumulasi kerugian	(18.837)	(33.164)	(15.469)	Accumulated deficit
Jumlah Ekuitas	1.173.578	966.836	84.531	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.969.042	970.320	647.480	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF (dalam jutaan Rupiah)		STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME (in million Rupiah)		
	2012 (Rp)	2011 (Rp)	2010 (Rp)	
PENDAPATAN USAHA				PENDAPATAN USAHA
Penghasilan investasi	65.377	24.620	24.523	Investment income
Pendapatan jasa advisory	384	-	-	Advisory fee
Pendapatan lainnya	6	21	-	Other income
BEBAN USAHA				OPERATING EXPENSE
Umum dan administrasi	(49.770)	(31.931)	(17.513)	General and administrative
Beban bunga	(742)	(13.025)	(22.479)	Interest expense
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	15.256	(20.315)	(15.469)	Income (Loss) Before Tax
(Beban) Manfaat Pajak	(930)	2.620	-	Tax (Expense) Benefit
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	14.326	(17.695)	(15.469)	Income (Loss) For The Year
Rugi komprehensif lain				Other comprehensive loss
Kerugian aktuarial - bersih setelah efek pajak	(85)	-	-	Actuarial loss - net of tax effect
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	14.242	(17.695)	(15.469)	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

ANALISA KEUANGAN

Laba Komprehensif

Pendapatan

Pendapatan IIF terdiri dari pendapatan dari investasi, konsultasi dan pendapatan lainnya. Pada 2012, pendapatan IIF tumbuh sebesar 166,91% dari Rp 24,64 miliar menjadi Rp 65,77 miliar yang terutama disumbang oleh pendapatan investasi dari penempatan pada deposito berjangka. Pendapatan investasi tahun 2012 juga sebagian disumbang oleh pendapatan sebesar Rp 1,7 miliar yang berasal dari penempatan IIF dalam unit penyertaan reksa dana sebesar Rp 152 miliar.

Pada 2012, IIF mulai menghasilkan pendapatan konsultasi sebesar Rp 384 juta dari Bandar Lampung Water Project Advisory tahun 2012.

FINANCIAL ANALYSIS

Comprehensive Income

Revenue

IIF revenue consists of revenue from investment, advisory and other income. In 2012, IIF's revenue grew by 166,91% from Rp 24.64 billion to Rp 65.77 billion which was mainly contributed by the investment income from placement in time deposits. The investment income in 2012 was also partially contributed by the income amounting to Rp 1.7 billion derived from IIF's placement in mutual funds units amounting to Rp 152 billion.

In 2012, IIF started to generate advisory income amounting to Rp 384 million from Bandar Lampung Water Project Advisory in 2012.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Beban Usaha

Beban usaha terdiri dari beban umum dan administrasi serta beban bunga. Pada tahun 2012, beban usaha IIF meningkat sebesar 12,36% dari Rp 44,96 miliar menjadi Rp 50,51 miliar yang terutama disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi.

Beban umum dan administrasi terutama terdiri dari gaji dan tunjangan, biaya profesional, sewa kantor dan transportasi. Kenaikan beban umum dan administrasi disumbangkan oleh kenaikan gaji dan tunjangan dari Rp 10,57 miliar menjadi Rp 30,08 miliar. Ini tidak bisa dihindari dalam rangka untuk melengkapi kesiapan organisasi IIF baik untuk *front-end* maupun *back-end*.

Beban bunga IIF sebesar Rp 741 juta di tahun 2012 merupakan bunga yang berasal dari penarikan pinjaman subordinasi pada pertengahan Desember 2012. Beban bunga tahun 2011 merupakan bunga yang dibayarkan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (pihak terkait) dalam kaitannya dengan Convertible Subordinated Loan (CSL) yang telah dilunasi oleh IIF tahun pada 2011.

Laba Tahun Berjalan

Secara garis besar, IIF melaporkan peningkatan laba komprehensif sebesar 180% dari rugi bersih sebesar Rp 17,69 miliar pada tahun 2011 menjadi laba komprehensif sebesar Rp 14,24 miliar pada tahun 2012.

POSISI KEUANGAN

Aset

Aset bertumbuh sebesar 102,93% dari Rp 970,32 miliar menjadi Rp 1.969,04 miliar. Hal ini sebagian besar dikarenakan penarikan pinjaman subordinasi dari ADB dan World Bank sejumlah USD 81 juta.

Operating expense

The operating expenses consist of general and administrative expenses and interest expense. In 2012, the operating expenses of IIF increased by 12,36% from Rp 44.96 billion to Rp 50.51 billion which was mainly due to the increase in general and administrative expenses.

General and administrative expenses mainly consist of salaries and benefits, professional fees, offices rent and transport. The increase in general and administrative expenses was contributed by the increase in salaries and benefits from Rp 10.57 billion to Rp 30.08 billion. This is inevitable in order to complete IIF's organizational readiness for both front-end and back-end functions.

IIF incurred interest expense of Rp 741 million in 2012 which represents accrued interest from the drawing of subordinated loans in mid December 2012. Interest expense in 2011 represents interest paid to PT Sarana Multi Infrastruktur (related party) in relation to the Convertible Subordinated Loan (CSL) which had been fully paid by IIF in 2011.

Profit for the year

As the bottom line, IIF reported an increase in comprehensive income of 180% from net loss of Rp 17.69 billion in 2011 to a comprehensive income of Rp 14.24 billion in 2012.

FINANCIAL POSITION

Assets

Asset grew by 102,93% from Rp 970.32 billion to Rp 1,969.04 billion. This was mainly due to the drawing of subordinated loans from ADB and World Bank amounting to USD 81 million.



Eduard Batubara

VP Corporate
Planning & MIS

"Saya memiliki lebih dari 9 tahun pengalaman, di bidang audit, konsultasi dan industri perbankan, penanganan bidang perencanaan korporasi dan strategi bisnis. Dengan pengalaman tersebut, saya bertekad untuk selalu berkontribusi dalam pengaturan strategi & anggaran perusahaan, termasuk MIS serta standar pengukuran kinerja perusahaan".

"I have more than 9 years of experience, spread in auditing, consulting and the banking industry, handling the areas of corporate planning and business strategy. With my past experience, I will contribute in the setting up of IIF corporate strategy & budgeting, as well as in the MIS and company performance measurement standards".

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS



1. Kas dan Setara Kas

Saldo kas IIF pada tanggal 31 Desember 2013 memberi kontribusi sebesar 90% dari total aset yang terutama ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka. Dalam hal mata uang, 56% dari kas adalah dalam Rupiah sementara sisanya dalam US Dolar. IIF mengantisipasi ketidakcocokan nilai tukar dengan menjaga komposisi yang seimbang antara aset dan kewajiban dalam mata uang asing.

2. Unit Penyertaan Reksadana

Pada tanggal 31 Desember 2012, IIF memiliki beberapa unit penyertaan reksadana dalam bentuk *protected mutual fund* dengan jangka pendek sebesar Rp 152,49 miliar. Aset yang menjadi *underlying* dari reksadana ini adalah obligasi korporasi berperingkat AA.

Kewajiban

Liabilitas perusahaan meningkat menjadi sebesar Rp 795,46 miliar pada tanggal 31 Desember 2012 terutama disebabkan oleh penarikan *tranche 1* pinjaman subordinasi dari ADB dan World Bank sebesar USD 81 juta dari total komitmen sebesar USD 200 juta. Pinjaman subordinasi dari ADB dan World Bank ini masing-masing akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034 dan 1 November 2033. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari ADB dan World Bank untuk mendukung IIF dalam menyediakan sumber dana pembiayaan infrastruktur jangka panjang.

Ekuitas

Ekuitas meningkat sebesar Rp 207 miliar terutama disebabkan masuknya Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai pemegang saham baru IIF dan sebagian disumbangkan oleh pembukuan laba komprehensif sebesar Rp 14,24 miliar pada tahun 2012.

1. Cash and cash equivalents

IIF's cash balance as of 31 December 2012 represented 90% of the total assets which mainly placed in form of time deposits. In term of currency, 56% of cash is in Indonesian Rupiah while the remaining is in US Dollar. We mitigate the currency mismatch by maintaining a balanced composition of foreign currency assets and liabilities.

2. Investments in Mutual Funds

As of December 31, 2012, IIF has investments in several units of short-term protected mutual funds amounting to Rp 152.49 billion. The underlying assets of the mutual funds are AA-rated corporate bonds.

Liabilities

The Company's liabilities increased to Rp 795.46 billion as of 31 December 2012 mainly due to the drawing of 1st tranche of subordinated loans from ADB and World Bank amounting to USD 81 million from total commitment of USD 200 million. The subordinated loans from ADB and World Bank will mature on 1 March 2034 and 1 November 2033, respectively. This shows a strong commitment from ADB and World Bank to support IIF in providing a long term source of fund for infrastructure financing.

Equity

The equity increased by Rp 207 billion mainly due to the entrance of Sumitomo Mitsui Banking Corporation as a new shareholder of IIF and partly contributed by the booking of comprehensive income of Rp 14.24 billion in 2012.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Seiring dengan pertumbuhan kinerja keuangan IIF, kemampuan IIF dalam **menghasilkan laba** dari aset yang dimiliki semakin baik.

Rasio Keuangan

Hal ini terlihat dari angka Imbal Hasil Terhadap Aset (Return On Assets - ROA) IIF tahun 2012 yang sebesar **1,04%** atau jauh lebih baik dibanding tahun 2011 dan 2010 dimana masing masing secara berurutan masih negatif 2,51% dan negatif 2,39%.

Pada tahun yang sama, kemampuan IIF dalam menghasilkan laba, melakukan efisiensi dalam mengelola aset, serta mengelola utang untuk mendukung operasional juga semakin baik. Hal ini terlihat dari rasio Imbal Hasil terhadap ekuitas (Return On Equity - ROE) yang sebesar **1,34%**.

Aligned with IIF financial performance growth, IIF is in an excellent position **to record profit** from its assets.

Financial Ratios

This can be seen from figure of Return On Assets (ROA) of the Company in 2012 which amounted to **1,04%** which is significantly better than in 2011 and 2010 which in each sequence was negative 2.51% and negative 2.39 %.

In the same year, the Company's ability to generate income, improve efficiency in managing assets, as well as in managing debt for operational support. This can be seen from ratio of Return On Equity (ROE) which is **1,34%**.

	RATIO	2012	2011	2010
Imbal Hasil Terhadap Aset Return on assets		1,04%	-2,51%	-2,39%
Imbal Hasil Terhadap Ekuitas Return on equity		1,34%	-3,37%	-18,30%

Arus Kas

Pada tanggal 31 Desember 2012, saldo kas dan setara kas IIF berjumlah Rp 1.783,28 miliar, meningkat sebesar Rp 835 miliar. Peningkatan saldo tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas yang berasal dari aktivitas operasional dan pendanaan.

Cash flows

As of 31 December 2012, the balance of cash and cash equivalents of IIF was Rp 1,783.28 billion which increased by Rp 835 billion. The increase in the balance was mainly due to the increase in cash from operating and financing activities.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

1. Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

IIF menghasilkan kas bersih sebesar Rp 11,31 miliar dari aktivitas operasi pada tahun 2012. Kenaikan kas bersih ini terutama berasal dari pendapatan investasi sebesar Rp 65,22 miliar yang sebagian dikurangi dengan pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp 45,06 miliar.

2. Kas Bersih digunakan untuk Aktivitas Investasi

IIF menggunakan kas bersih sebesar Rp 153,37 miliar dari aktivitas investasi pada tahun 2012. untuk membeli reksa dana sebesar Rp 151,69 miliar dan memperoleh aset tetap sebesar Rp 1,69 miliar.

3. Kas bersih dari Aktivitas Pendanaan

IIF menghasilkan kas bersih sebesar Rp 977,06 miliar dari aktivitas pendanaan pada tahun 2012. Kenaikan kas bersih dari aktivitas pendanaan ini terutama disebabkan pencairan pinjaman subordinasi sebesar Rp 784,57 miliar dan injeksi modal pemegang saham baru sebesar Rp 192,50 miliar.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

IIF tidak terlibat dalam transaksi apapun yang mengandung benturan kepentingan dengan pihak lain manapun di tahun 2012.

KEMAJUAN INISIATIF STRATEGIS

Keuangan, TI dan Operasional

Keuangan, TI dan Operasional memainkan peran penting dalam fungsi *back office*. Kemajuan dari inisiatif strategis di fungsi *back office* adalah sebagai berikut :

1. Net cash from Operating Activities

IIF generated a net cash of Rp 11.31 billion from operating activities in 2012. The increase in net cash from operating activities in 2012 was mainly from investment income of Rp 65.22 billion which is partially offset by the payment to suppliers and employees of Rp 45.06 billion.

2. Net cash used in Investment Activities

IIF used a net cash of Rp 153.37 billion from investment activities in 2012. to purchase mutual funds of Rp 151.69 billion and acquire fixed assets of Rp 1.69 billion.

3. Net cash from Financing Activities

IIF generated a net cash of Rp 977.06 billion from financing activities in 2012. The increase in net cash from financing activities in 2012 was mainly due to the drawing of subordinated loans of Rp 784.57 billion and the new shareholder's capital injection of Rp 192.50 billion.

Transactions containing a conflict of interest

IIF was not involved in any transactions that contained a conflict of interest with any other party in 2012.

PROGRESS OF STRATEGIC INITIATIVES

Finance, IT and Operation

Finance, IT and Operation play a significant role in the back office function. Progress of the strategic initiatives in back office is described below.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

a. Pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Operasional

Sebagai bagian dari pembangunan sistem Teknologi Informasi di *back office*, IIF telah **memiliki sistem keuangan back office** yang terdiri dari sistem akuntansi, pembayaran dan *cash management* pada tahun 2012.

Sistem Akuntansi dan Operasional Keuangan didukung oleh *Sun System* efektif sejak Mei 2012. *Sun System* adalah Sistem General Ledger dimana pembukuan dan pencatatan semua transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Selain berfungsi sebagai sistem GL, *Sun System* juga melakukan perhitungan otomatis penyusutan aset tetap, biaya amortisasi dibayar di muka, beban dan potongan pajak, serta revaluasi mata uang asing.

IIF juga telah menggunakan sistem *Budget Realization* (BR) yang merupakan sistem pembayaran. Sistem BR mengelola proses pembayaran yang dimulai dari proses permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan faktur, sampai pembayaran akhir. Pendelegasian Wewenang (DoA) juga diterapkan untuk memastikan adanya pemisahan tugas dan mengawasi proses pembayaran berjalan sesuai dengan tingkat otorisasi. Sistem BR sudah terintegrasi dengan *Sun System* dan sistem *Cash Management*.

a. Implementation of Accounting and Operation Systems

As part of the establishment of Information Technology system in back office, IIF **has set up back office financial systems** which consist of accounting, payment and cash management systems in 2012.



IIF's accounting and finance operation is supported by the *Sun System* effectively since May 2012. The *Sun System* is a General Ledger System which books and records all transaction in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards. Beside functioning as a GL system, the *Sun System* has also other functions which includes the automatic calculation of fixed assets depreciation, prepaid expenses amortization, charges and withholding of taxes, and foreign currency revaluation.

IIF has also implemented the *Budget Realization* (BR) system which particularly represents the payment system. The BR system manages the payment process from purchase requisition, purchase order, invoice receipt, until the final payment. The Delegation of Authority (DoA) is also implemented to ensure a clear segregation of duties and to control the payment process in accordance with authorization level. The BR system is already integrated with the *Sun System* and the *Cash Management System*.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Untuk pengelolaan dana, IIF telah mengembangkan Workbook internal untuk membantu perhitungan dan pencatatan bunga sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS).

Di kuartal keempat 2012, IIF menandatangani perjanjian *Cash Management* dengan Standard Chartered Bank Indonesia (SCB). Sistem *Cash Management* (disebut sistem *Straight 2 Bank* atau S2B) adalah sistem berbasis internet yang disediakan oleh SCB yang mengintegrasikan sistem pembayaran (BR) di IIF dengan rekening bank IIF di SCB. Dengan sistem S2B, proses manual dihilangkan dan diganti dengan sebuah proses terintegrasi dari sistem BR ke S2B untuk mengurangi risiko operasional. Hal ini juga untuk memastikan pengawasan yang terinterasi serta menjamin pemisahan fungsi yang tepat sesuai dengan tingkat otorisasi yang ditetapkan dalam DoA.

b. Penunjukan Agen Fasilitas dan Workbook untuk Pengelolaan Kredit

Untuk mendukung sistem pengelolaan Kredit yang handal, pada kuartal ketiga 2012 IIF **menandatangani Nota Kesepahaman** untuk Jasa *Agency* dengan PT Bank Permata Tbk.

To manage IIF's funds, IIF has developed an internal Workbook to assist the calculation and recording of interest in accordance with the Indonesian accounting and International Financial Reporting Standards (IFRS).

In Q4 2012, IIF signed a cash management agreement with Standard Chartered Bank – Indonesia Branch (SCB). The cash management system (called *Straight to Bank* or S2B system) is an internet-based system provided by SCB which integrates the payment system (BR) in IIF with IIF's bank accounts in SCB. With the S2B system, manual process is eliminated and replaced with an integrated process from the BR system to the S2B which reduces operational risks. It also addresses an integrated control and accommodates a proper segregation of duties in accordance with authorization level set in the DoA.

b. Appointment of Facility Agency and implementation of Workbook for Loan Management

IIF entered into a **Memorandum of Understanding** for Agency Services with PT Bank Permata Tbk in Q3 2012, which provides a reliable system support for Loan Management.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Nota kesepahaman tersebut mencakup lingkup jasa proses manajemen kredit yang menjamin ketepatan waktu dan akurasi data bagi IIF. Kolaborasi antara PT Bank Permata Tbk dan Standard Chartered Bank juga menyediakan layanan terpadu bagi sistem Pengelolaan Kredit IIF. Pembayaran yang diterima dari klien ke PT Bank Permata Tbk akan secara otomatis disalurkan ke rekening virtual IIF di SCB, yang secara efektif menjalankan fungsi monitoring atas dana yang diterima.

Sehubungan dengan *Loan Management*, *internal Workbook* disusun oleh IIF guna memastikan mekanisme *check-and-balance*. *Workbook* internal meliputi perhitungan fee dan bunga, proses review, pembayaran kembali, dan pembayaran, dan perhitungan penalti lewat jatuh tempo bagi portofolio pinjaman IIF. *Workbook* ini juga mengelola informasi statis atas proyek-proyek/klien serta fasilitas informasinya. Selain itu, *Workbook* juga membantu perhitungan setiap pencairan, bunga akrual harian, jumlah jatuh tempo, *flagging* untuk pembayaran yang lewat jatuh tempo/pembayaran dan perhitungan jumlah jatuh tempo, yang secara efektif menjadi fungsi *check* atas perhitungan yang dilakukan oleh PT Bank Permata, Tbk.

Di tahun 2013, IIF akan melanjutkan program pengembangan strategis, melalui *back-office system* yang terus disempurnakan dengan inisiatif sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem BR yang akan mampu mendukung peninjauan kinerja per divisi dan sistem informasi manajemen secara bulanan.

The Memorandum of Understanding covers a scope of services, which ensures timely and accurate loan management services for IIF. An existing collaboration between PT Bank Permata Tbk with the Standard Chartered Bank provides a seamless service for IIF's Loan Management system. Repayments received from clients to PT Bank Permata Tbk will be automatically channeled to our virtual account at SCB, which effectively enables a proper monitoring on IIF's cash receipts.

With respect to Loan Management, IIF also established an Internal Workbook to put in place a check-and-balance mechanism. The internal Workbook features management of fees and interests calculation, reminders for review, repayments, and payments, and past-due penalty calculation for IIF's loan portfolio. The Workbook manages static information on projects/clients as well as their Facility Information. It is capable of providing, among others, calculation of each disbursements, daily accrual interests, amount due at maturity, flags for past due repayments/payments and past due amount calculations, effectively serving as a checking mechanism for figures provided by PT Bank Permata, Tbk.

IIF will continue with other strategic development programs to take place in 2013, with the back-office systems to be further enhanced through implementation of the following initiatives:

1. BR system capable of supporting performance review per division and management information systems on monthly basis.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

2. *Covenant dan Document Monitoring system* yang mencakup *monitoring* atas *covenant* jatuh tempo dan kepatuhan terhadap *covenant*, serta mengawasi dan memberikan notifikasi atas dokumen yang masih pending dan/atau telah kadaluarsa untuk segera ditindaklanjuti oleh tim Investasi.
3. Mengintegrasikan *Workbook* untuk Kredit, Pinjaman dan Treasury ke dalam Sistem Akuntansi yang otomatis membukukan jurnal akuntansi secara bulanan.
4. *Cash Collection system* untuk pengelolaan penerimaan kas dari debitur IIF melalui virtual account IIF di SCB, yang akan membantu IIF, dalam mengontrol dan memantau pembayaran dari debitur dan mencatatnya dalam sistem akuntansi IIF. Sistem ini akan diintegrasikan dengan sistem *Cash Management* IIF di SCB dan sistem *Loan Management* di PT Bank Permata Tbk.
5. Sistem *Asset Liability Management*, yang akan disusun bersama dengan Tim Manajemen Risiko.

Teknologi Informasi adalah bidang strategis lain yang fokus pengembangannya terus diupayakan oleh IIF. Perencanaan dan penerapan sistem TI yang hati-hati menjadi pilar dalam menangani akurasi dan kelengkapan transaksi proses dan catatan, yang menjadi alat pengawasan utama dalam pengelolaan dan mitigasi risiko operasional. Oleh karena itu, IIF akan merekrut Kepala TI sebagai prioritas. Kepala TI bertanggung jawab kepada Operations Head, yang tugasnya mencakup pengembangan program strategis TI, terutama untuk memastikan efektifitas, efisiensi, pengendalian dan keamanan dari prosedur dan sistem TI, serta penerapan terpadu dari rencana pengembangan TI.

2. *Covenant and Document Monitoring system* for covenants due and compliance with such covenants, which will also observe and notify on pending and/or expired documents for immediate follow up by Investment team.
3. Integration of the *Workbook* for Loans, Borrowing, and Treasury into the Accounting System for automatic accounting journal entry on monthly basis.
4. *Cash Collection system* for management of cash receipts from our borrowers through IIF virtual accounts in SCB, enabling control and monitoring of payments from our borrowers and their proper records in the Accounting System. It will be an integrated system conjoined with the *Cash Management* system at SCB and *Loan Management* system with PT Bank Permata Tbk.
5. *Asset Liability Management* system, to be jointly developed with the Risk Management team.

Information Technology is another strategic area which Operations continues to put its development focus on. Careful planning and implementation of IT systems are cornerstones in addressing accuracy and completeness of transactions processes and records, serving as one of critical control tools in the management and mitigation of operational risks. In this respect, hiring for the Head of IT function is in expeditious progress. Reporting to the Operations Head, the Head of IT will focus on improvement of IT strategic programs, primarily aiming at ensuring that an effective, efficient, controlled and secured IT procedures and systems, and steadfast implementation of IT development plans.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Program pengembangan strategis pada area ini juga mencakup pelaksanaan *Business Contingency Plan* dan *Disaster Recovery Plan*, serta peningkatan infrastruktur jaringan dan server utama untuk mendukung aplikasi yang diperlukan dalam waktu dekat.

c. Pengembangan *Standard Operating Procedures*

Penyusunan *Standard Operating Procedures* merupakan kunci untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk memastikan semua proses dalam Bisnis dan *Back office* dapat mendukung Rencana Usaha IIF
2. Untuk memiliki pedoman operasional yang jelas dan standar untuk Proses Bisnis dan *Back Office*
3. Untuk membangun *Good Corporate Governance* (pemisahan fungsi, 4-eyes principle)
4. Untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko yang tepat dalam Proses Bisnis dan *Back Office*

Pada tahun 2012 IIF telah menyelesaikan sebanyak 40% dari *Standard Operating Procedures* (SOP) yang dibutuhkan. Dengan adanya SOP, proses bisnis yang jelas, serta karyawan yang bertanggung jawab untuk setiap proses dan koneksi dengan proses terkait lainnya diatur secara rinci. Pada kuartal pertama 2013, IIF akan terus mengembangkan SOP yang tersisa, *batch* pertama yang meliputi keuangan dan akuntansi, operasi kredit, sisi kredit investasi, sisi kredit manajemen risiko, treasury, penganggaran dan pengadaan. Batch pertama ini ditargetkan untuk implementasi penuh pada bulan April 2013.

Strategic development programs in this area include implementation of the Business Contingency Plan and the Disaster Recovery Plan and enhancement of network infrastructure and primary server to accommodate future applications.

c. Development of *Standard Operating Procedures*

Establishment of the *Standard Operating Procedures* is key to achieve the following objectives:

1. To ensure all Business and Back Office processes support IIF's Business Plan
2. To have a clear and standardized operational guidelines for Business and Back Office Processes
3. To establish Good Corporate Governance (segregation of duties, 4-eyes principles)
4. To ensure proper Risk Management in Business and Back Office processes

40% of required the *Standard Operating Procedures* have been established in 2012, clearly describing business process, persons responsible for each process, and interrelation between processes. In 2013 IIF will put in place the remaining SOPs, including financial and accounting, credit operations, credit side of investment, credit side of risk management, treasury, budgeting, and procurement as the first batch to be fully implemented by April 2013.



Myria Y. Ariandri
VP Operations

"Saya berharap latar belakang dan pengalaman saya selama lebih dari 15 tahun di kredit dan operasional perbankan akan memberikan kontribusi dalam mendirikan platform operasi dan ICT yang solid, originasi, kontrol, dan proses monitoring yang standar untuk membantu IIF mencapai tujuan bisnis dan pada saat yang sama mengurangi operasional risiko dan menjaga Good Corporate Governance".

"I expect my background and experience for more than 15 years in credit and banking operations will contribute in setting up a solid operation and ICT platform, standardized origination, control, and monitoring processes to help IIF achieve business objectives and at the same time mitigate operational risk and maintain Good Corporate Governance".

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS



Puri Minari

Environmental Manager

"Saya memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman berurusan dengan penilaian dampak lingkungan dan sosial, sistem manajemen serta perizinan lingkungan dan kepatuhan. Dengan pengetahuan yang luas dan mendalam dan keterampilan saya, saya berharap bahwa saya dapat membawa nilai tambah dan memperkuat tim IIF dalam masalah lingkungan keberlanjutan yang menantang di Indonesia".

"I have more than 15 years of experience dealing with environmental and social impact assessment, management system and environmental permitting and compliance. With my broad and in-depth knowledge and skills, I hope that I can bring added value and strengthen IIF's team in the challenging sustainability environmental issues in Indonesia".

Pada kuartal kedua 2013, IIF berencana untuk mengembangkan SOP *batch* kedua, yang meliputi Manajemen Risiko, Investasi, *Private Sector Advisory*, *Public Sector Advisory*, Sumber Daya Manusia, Kebijakan dan Prosedur TI, Internal Audit dan Sekretaris Perusahaan.

Private Sector Advisory

Di tahun 2013, IIF akan terus mencari peluang sebagai *Private Sector Advisory* dalam mendukung pihak penawar (bidder) untuk proyek-proyek utama KPS demi membangun pengalaman yang diperoleh dari peran pertama untuk KPS proyek Air Bandar Lampung. Tim juga menargetkan untuk mendapatkan pekerjaan konsultasi untuk membantu klien utama dalam mengembangkan proyek-proyek swasta murni. *Private Sector Advisory* akan terus fokus pada peran yang dapat memberikan peluang pembiayaan bagi Tim Investasi IIF.

Manajemen Risiko

Manajemen Risiko IIF ditetapkan mulai akhir kuartal kedua 2012, dimana *Chief Risk Officer* mulai bertugas. Beberapa inisiatif telah dicapai pada tahun 2012, seperti: merekrut manajer risiko kredit yang berpengalaman, meninjau dan merinci kerangka dasar analisis risiko kredit, serta memastikan operasional IIF mematuhi Operating Manual yang ada. Dokumentasi tinjauan risiko, *template* usulan kredit dan memorandum, proses persetujuan, otoritas kredit dan kerangka kerja peringkat risiko juga telah diselesaikan selama 2012. Kemajuan Manajemen Risiko lebih rinci terdapat dalam bagian pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Second batch of the SOPs will be in place in Q2 2013, including Risk Management, Investment, *Private Sector Advisory*, *Public Sector Advisory*, Human Resources, IT Policy and Procedures, Internal Audit, and Corporate Secretary.

Private Sector Advisory

In 2013, IIF will continue to seek private sector advisory roles in support of bidders for the key PPP projects to build on the experience gained from the first role for the Bandar Lampung Water PPP project. The team will also target advisory work to assist key clients to develop purely private projects. *Private Sector Advisory* will continue to focus on roles that also present attractive financing opportunities for IIF Investment Team.

Risk Management

IIF's Risk Management was established starting at the end of Q2 2012, initiated by the appointment of the Chief Risk Officer. Some initiatives have been achieved in 2012, such as: recruiting experienced credit risk managers, reviewing and detailing basic credit risk analysis framework, as well as ensuring IIF's operations to adhere to the existing Operating Manual. The risk review documentation, template of credit proposal and memorandum, approval process, credit authority and risk rating framework have also been finalized during 2012. The progress of Risk Management is further detailed in the Implementation of Good Corporate Governance Section.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Pada tahun 2013, selain melanjutkan fungsi utamanya sebagai *credit reviewer*, Manajemen Risiko juga akan fokus dalam menyiapkan unit risiko pasar dan unit risiko operasional, dan untuk lebih menjaga risiko *counterparty*, dengan cara antara lain: (i) menetapkan persyaratan asuransi standar untuk proyek-proyek yang akan dibahas lebih lanjut dengan kreditur, (ii) menyelesaikan SOP Manajemen Risiko, yang meliputi Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional.

Sosial dan Lingkungan

Delapan prinsip IIF dalam perlindungan sosial dan lingkungan (S&E) memberikan **standar tertinggi tata kelola perusahaan** bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sesuai dengan standar internasional.

Selama 2012, IIF bekerjasama dengan konsultan eksternal terkemuka untuk membantu IIF dalam proses review S&E serta mentransfer ilmu bagi tim internal IIF. Di kuartal keempat 2012, IIF mulai mempekerjakan spesialis S&E internal yang bertanggung jawab dalam menyiapkan kerangka dasar penilaian dan format pelaporan untuk standar *safeguards* S&E.

Pada 2013, IIF berencana untuk merekrut seorang spesialis lingkungan yang berpengalaman dengan latar belakang sektor swasta. Dengan memiliki total dua spesialis S&E internal, saat ini kami memiliki sumber daya yang memadai, sehingga kontrak konsultan eksternal akan dihentikan pada kuartal

In 2013, aside from continuing its main function as credit reviewer, Risk Management is also focusing in setting up market risk and operational risk units, and to further safeguard IIF's counterparty risk among others by: (i) setting standard insurance requirement for projects, which will be further discussed with borrowers for implementation; (ii) finalizing SOP for Risk Management, which include Credit Risk, Market Risk, and Operational Risk.

Social and Environmental

Our eight principles in social and environmental safeguards provide the **highest standards of corporate governance** for sustainable infrastructure development in compliance with international standards.

During 2012, IIF engaged a reputable consultant as outsource service provider and agent for transfer of knowledge for internal capacity building. In Q4 2012, we started to hire an internal S&E specialist who has the responsibility to detail our basic assessment framework and reporting format for S&E safeguards standards.

In 2013, IIF plans to further recruit an experienced environment specialist with a private sector background. By having in total two internal S&E specialists, for the time being we deem to have a sufficient resource, and hence the contract of the outsource consultant will be terminated in Q1

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

pertama 2013 sampai proses pengembangan lebih lanjut yang mungkin membutuhkan sumberdaya S&E tambahan. IIF juga berencana untuk menetapkan S&E checklist/kuesioner, metodologi penilaian, parameter dan format standar pelaporan sebagai pedoman bagi *officer* investasi dalam penilaian proyek. S&E spesialis yang dimiliki IIF juga akan mengembangkan dan melaksanakan pelatihan S&E untuk manajemen IIF dan staf di 2013.

Corporate Planning

Tujuan dari departemen ini adalah untuk menterjemah visi dan misi IIF dalam bentuk pengembangan rencana usaha tahunan dan mengawasi hasil kinerja IIF dibandingkan dengan rencana bisnis.

Sebagai bagian dari inisiatif strategis SDM dalam menerapkan Key Performance Indicators (KPI) yang berlaku untuk seluruh manajemen dan karyawan, Corporate Planning berencana untuk mengembangkan Pengelolaan Kinerja dan SIM yang akan mendukung analisa kuantitatif KPI. Analisa meliputi perbandingan antara analisa aktual dengan anggaran dan analisa varians.

Kami telah mempercepat proses perekrutan dan **telah mengisi posisi kunci** yang dibutuhkan di kuartal keempat 2012 dan awal 2013.

2013 until further development on the need of additional S&E resource. IIF also plan to set up a basic S&E checklist/questionnaire, assessment methodology, parameters and standard reporting format as guidance for investment officers in project assessment. IIF S&E specialists will also develop and conduct S&E training for IIF management and staffs in 2013.

Corporate Planning

The purpose of this department is to interpret the vision and mission of IIF through a development of the annual business plan and monitor the results of performance compared with the initial business plan.

As part of the HR strategic initiative to implement Key Performance Indicators (KPIs) which apply to all management and employees, Corporate Planning plans to develop Performance Management and MIS which will support the quantitative analysis of KPIs. The analysis includes the comparison between actual and budget and variance analysis.

We have sped up the recruitment process and **fulfilled the major requirements** of key organization roles by Q4 2012 and early 2013.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Sumber Daya Manusia

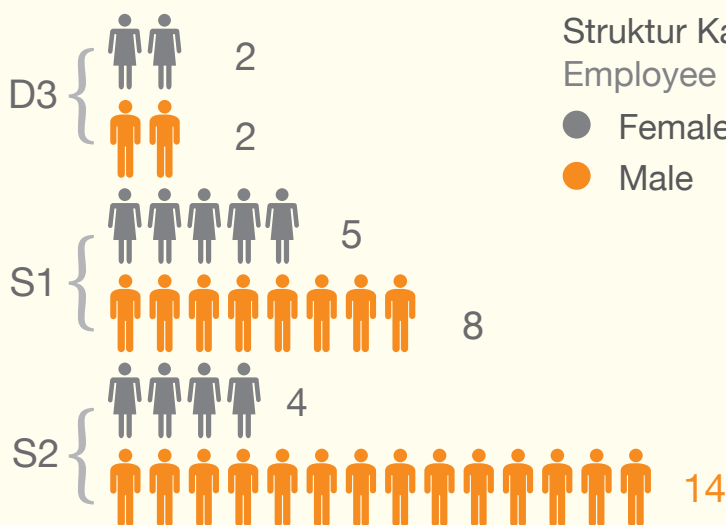
Peran utama dalam organisasi IIF adalah investasi, manajemen risiko, dan fungsi *back-office*. SDM juga telah menyelesaikan kebijakan dan prosedur yang terdiri dari *job grading*, jenjang karir, kompensasi, manfaat dan operasional SDM. SDM juga telah melakukan beberapa sesi pelatihan eksternal dan internal khususnya di KPS dan pembiayaan proyek.

Pada 2013, SDM memiliki inisiatif strategis untuk menyiapkan modul pelatihan dasar yang meliputi bidang keuangan proyek, model keuangan, analisis kredit untuk proyek-proyek infrastruktur dan *soft skill* (misalnya keterampilan negosiasi). SDM juga berencana untuk menyusun dan mengatur rencana insentif jangka panjang, menerapkan Key Performance Indikator dan Evaluasi Kinerja untuk semua manajemen dan staf.

Human Resources

The key organization roles include investment, risk management, and back-office functions. HR also has completed the major HR policies and procedures consisting of job grading, career path, compensation, benefits and HR operations. HR also conducted several external and internal training sessions particularly in PPP and project finance.

In 2013, HR has strategic initiatives to put in place basic training modules which cover areas of project finance, financial modeling, credit analysis for infrastructure projects and soft skills (e.g. negotiation skills). HR also plans to structure and set up a long-term incentive plan, implement Key Performance Indicators and Performance Evaluation for all management and staff.



Catatan/Note:

*(Termasuk Karyawan Kontrak/ Include Temporary Employee)

D3: Diploma, S1: Bachelor, S2: Master

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Internal Audit

Sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Internal Audit telah menyusun Internal Audit Charter dan Rencana Kerja Audit tahun 2012. Internal Audit juga memainkan peran penting dalam menelaah desain SOP. Kemajuan Audit Internal lanjut lanjut dirinci dalam bagian pelaksanaan Good Corporate Governance.

Prospek Bisnis 2013

Menurut laporan WEF, indeks daya saing Indonesia meningkat pesat sejak 2005. Indonesia kini berada di peringkat ke-44 dari 139 negara. Posisi Indonesia berada di atas Thailand (38) dan di bawah Vietnam (59) tetapi jauh tertinggal dari Singapura (3) dan Malaysia (26). Namun di dalam laporan juga ditekankan bahwa Indonesia masih perlu berbenah diri di beberapa bidang termasuk infrastruktur, pemberantasan korupsi dan kesehatan masyarakat.

Dalam RAPBN tahun 2013, Pemerintah berkomitmen membenahi kualitas infrastruktur. Hal ini terlihat dari alokasi belanja modal yang mencapai Rp 193,8 triliun atau 11,76% dari anggaran belanja negara sebesar Rp 1.657,9 triliun. Angka ini meningkat 14,9% dari alokasi belanja modal dalam APBN-P tahun 2012.

Alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp 188,4 triliun. Alokasi ini belum memperhitungkan Rp 24 triliun dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) tahun 2012, dan rencana target Rp 12 triliun dari pengalihan subsidi listrik untuk belanja modal. Besaran alokasi belanja negara ini ekuivalen dengan 13,8 % (Rp 229,8 triliun) dari total anggaran belanja negara 2013.

Internal Audit

As part of good corporate governance, Internal Audit has established an Internal Audit Charter and 2012 audit work plan. The Internal Audit also plays a key role in reviewing the design of SOPs. The progress of Internal Audit is further detailed in the Implementation of Good Corporate Governance section.

Prospek Bisnis 2013

According to the WEF report, Indonesia's competitiveness index increased rapidly since 2005. Indonesia is now ranked 44th out of 139 countries. Indonesia's position is on top of Thailand (38) and under Vietnam (59) but far behind Singapore (3) and Malaysia (26). But the report also emphasized that Indonesia still needs to improve in several areas including infrastructure, corruption eradication and public health.

In the 2013 State Budget, the Government committed to improve the quality of infrastructure. It is seen from the allocation of capital expenditure of Rp 193.8 trillion, or 11.76% of the State Budget amounted to Rp 1,657.9 trillion. This figure increased by 14.9% compared to that in 2012.

Allocation of infrastructure spending amounted to Rp 188.4 trillion. This does not include allocation of Rp 24 trillion of the SAL (the Budget Surplus) in 2012, and the reallocation for the electricity subsidy amounted to Rp 12 trillion for capital expenditures. Expenditure allocation amount is equivalent to 13.8% (USD 229.8 billion) of the total state budget 2013.

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT'S DISCUSSION & ANALYSIS

Sementara itu, Bappenas memproyeksikan adanya tambahan anggaran infrastruktur yang berasal dari realokasi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 96 triliun (18% dari total transfer ke daerah sebesar Rp 518 triliun), kontribusi BUMN sebesar Rp 77 triliun dan peran swasta diharapkan dapat mencapai minimal Rp 60 triliun. Dengan demikian besaran alokasi pembangunan infrastruktur secara agregat dapat mencapai Rp 457,4 triliun atau sebesar 4,9% dari target PDB 2013 sebesar Rp 9.300 triliun (1 triliun dollar AS).

Agenda pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RAPBN-2013 meliputi pembangunan jalan, pelabuhan, penyediaan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP), bandar udara baru, rehabilitasi sekitar 120 bandar udara, pembangunan lebih dari 380 kilometer jalur Kereta Api baru, termasuk jalur ganda, pembangunan terminal transportasi jalan pada 24 lokasi, dan pembangunan prasarana 61 dermaga penyeberangan, serta pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan di 25 lokasi. Upaya untuk mendukung keterhubungan antar-wilayah (domestic connectivity) dalam RAPBN 2013 juga menargetkan sejumlah pembangunan bandar udara baru serta rehabilitasi sekitar 120 bandar udara lama.

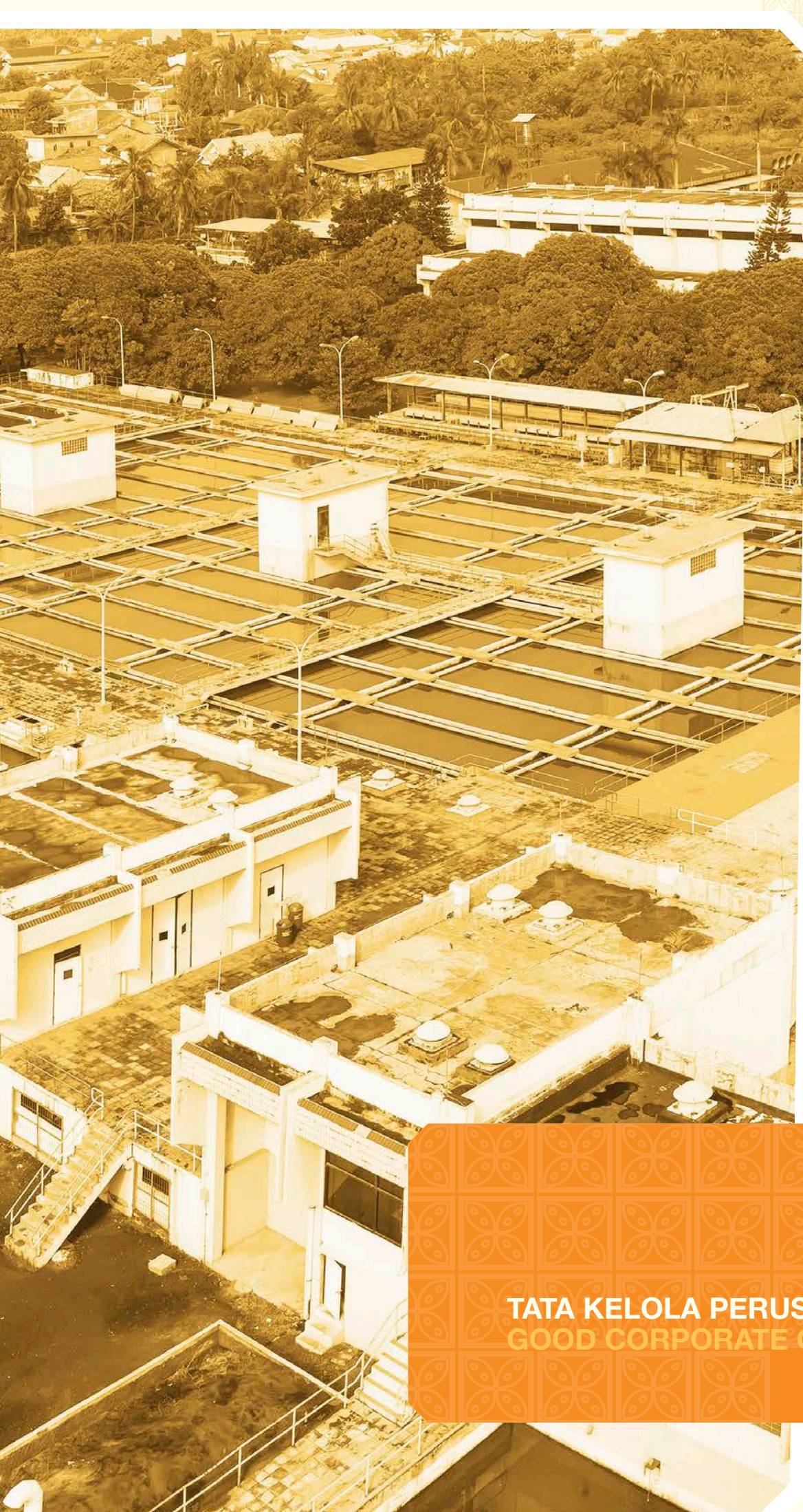
Terkait dengan semua rencana tersebut, IIF optimis prospek Bisnis IIF tahun 2013 dan dalam beberapa tahun kedepan masih sangat baik. Didukung oleh investor yang memiliki kemampuan permodalan sangat baik, IIF optimis mampu berperan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang secara otomatis akan meningkatkan kinerja IIF dimasa-masa yang akan datang.

Meanwhile, Bappenas projected that there will be additional budget for infrastructure from reallocation of regional budget amounted to Rp 96 trillion (18% of total transfers to the regions of Rp 518 trillion), from the contribution of SOEs amounted to Rp 77 trillion and from the private sector is expected to reach at least Rp 60 trillion. Thus the total aggregate amount of infrastructure development will be reaching Rp 457.4 trillion or 4,9% of the 2013 GDP target of Rp 9,300 trillion (1 trillion dollars).

Infrastructure development agenda set out in the draft budget-2013 which includes the construction of roads, ports, infrastructure on rivers-transport provision, lakes and transit (SDP), new airport, the rehabilitation of about 120 airports, construction of more than 380 kilometers of new railway lines, including double track, road transport terminal development at 24 locations, and the construction of 61 transit port infrastructure, and the construction and management of fishing ports in 25 locations. As an effort to support domestic connectivity, the 2013 draft budget also targets a number of new airport construction and rehabilitation of 120 old airports.

Related to all of these plans, IIF is optimistic that the business outlook of IIF in 2013 and in the next few years is still very promising. Powered by investors who have a very good ability of capital, IIF is optimistic to play a role in accelerating infrastructure development in Indonesia that will automatically improve its performance in the years to come.





Instalasi Pengolahan Air Bersih Buaran
Jakarta, Indonesia
Water Treatment Facility Buaran
Jakarta, Indonesia

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham, IIF menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Kode Etik dalam mengelola bisnisnya. Implementasi dan kebijakan IIF terus ditingkatkan, baik dari segi komitmen maupun kepatuhan terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik.

With aiming to create a long-term value for its shareholders, IIF implements principles of the Good Corporate Governance and the Code of Conduct in managing its business. The implementation and policies within IIF are continuously improved, in terms of both the commitments to and compliance with the Good Corporate Governance practices and the Code of Conduct.

Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Kode Etik

Tata Kelola Perusahaan merupakan panduan untuk menjalankan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Kesetaraan. Kode Etik mencerminkan filosofi nilai-nilai kemanusiaan seperti saling menghormati, kejujuran dan integritas. Kesemuanya mempengaruhi bagaimana sasaran perusahaan ditetapkan dan dicapai, bagaimana risiko dipantau dan dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan. Tata kelola perusahaan dan Kode Etik yang baik menjadi semakin penting, terutama di industri keuangan di mana setiap keputusan yang dibuat memiliki unsur ketidakpastian dan risiko, namun, ini semua dapat dikelola melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik menyediakan fungsi pemantauan yang komprehensif untuk IIF melalui prosedur kerangka kerja, infrastruktur, sistem dan operasional. Kode Etik berlaku untuk semua karyawan IIF, orang-orang dan pihak-pihak yang bertindak atas nama IIF.

Implementation of Good Corporate Governance and Code of Conduct

The Corporate Governance is a guide to operating a business by applying the principles of Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. The Code of Conduct reflects the philosophies of human values such as mutual respect, honesty and integrity. Both the Corporate Governance and the Code of Conduct affect how corporate objectives are set and achieved, how risks are monitored and assessed, and how performances are optimized, all of which have become increasingly important, especially in the financial industry where every decision made has an element of uncertainty and risk; nevertheless, these can be managed through effective oversight and internal controls.

The implementation of the Good Corporate Governance provides a comprehensive monitoring function to IIF through framework, infrastructure, system and operating procedures. Whilst the implementation of the Code of Conduct is through imposing the Code of Conduct to all IIF employees, people and parties who act on behalf of IIF.

IIF memahami pentingnya menanamkan budaya sadar risiko dan pengendalian internal yang kuat ke seluruh elemen organisasi. Sejalan dengan kerangka tata kelola perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi mengambil peran utama meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, mengevaluasi kebijakan risiko, menetapkan target kinerja, memantau efektivitas tata kelola perusahaan dalam praktek dan memastikan bahwa IIF memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di IIF ditunjukkan melalui penilaian yang komprehensif tentang peran dan komposisi komite yang memberikan dukungan pengelolaan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Keterbukaan dan transparansi merupakan elemen penting dalam tata kelola perusahaan, IIF selalu menerapkan transparansi sesuai dengan peraturan dan memastikan bahwa semua pengungkapan material disampaikan secara akurat dan pada waktu yang tepat, termasuk kinerja keuangan IIF, aksi korporasi dan pelaporan manajemen risiko yang berlaku.

Kode Etik ditunjukkan dengan memiliki perilaku yang sesuai dengan hukum dan menghormati martabat pribadi, privasi dan hak-hak pribadi setiap individu. Budaya kepatuhan dan integritas dalam sebuah organisasi mengalir dari atas ke bawah.

Dewan Komisaris dan Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi telah jelas didefinisikan dalam Anggaran Dasar. Pemantauan tata kelola perusahaan oleh Dewan Komisaris meliputi penilaian berkelanjutan dari struktur internal IIF dan memastikan kejelasan dan akuntabilitas pengelolaan di setiap lini organisasi.

IIF understands the importance of instilling a risk awareness culture and strong internal controls throughout all elements of the organization. In line with the framework of the corporate governance, the Board of Commissioners and the Board of Directors take up the primary roles of reviewing and directing corporate strategy, evaluating risk policy, setting performance targets, monitoring the effectiveness of corporate governance in practice and ensuring that IIF complies with all current laws and regulations.

The implementation of the Good Corporate Governance in IIF is demonstrated through IIF's comprehensive assessment of the roles and composition of the committees that provides governance support to the Boards of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities. Openness and transparency are important elements in the corporate governance. IIF always adopts transparency in accordance with prevailing regulations and ensures that all disclosures of any material are accurately submitted in a timely manner, including IIF's financial performance, corporate actions and risk management reporting.

The Code of Conduct is demonstrated by having legally compliant behaviour and respecting the personal dignity, privacy and personal rights of every individual. The culture of compliance and integrity in IIF flows from the top Management to bottom.

Board of Commissioners and Board of Directors

The authorities and responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors have been clearly defined in the Articles of Association. The monitoring of corporate governance by the Board of Commissioners includes continuous assessment of IIF's internal structure and ensures clarity and accountability of the Management in every line of the organization.

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan dibawah Dewan Direksi. Seperti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap Direksi dan memberikan nasihat tentang isu-isu manajemen. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS, yang juga memiliki kewenangan untuk mempercayakan Dewan Komisaris dengan tugas lain dari waktu ke waktu.

Dewan Komisaris harus memiliki minimal lima anggota, yang terdiri dari satu Presiden Komisaris dan minimal empat Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris

Menurut Anggaran Dasar, rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap saat. Selama 2012, Dewan Komisaris telah mengadakan 10 kali rapat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Date	Description
1	January 18, 2012	Physical meeting
2	March 7 – 8, 2012	Physical meeting
3	March 27, 2012	AGMS- Teleconference
4	April 25, 2012	Teleconference
5	May 22, 2012	Teleconference
6	June 13, 2012	Physical meeting
7	July 17, 2012	Teleconference
8	September 19, 2012	Physical meeting
9	October 18, 2012	Teleconference
10	December 5, 2012	Physical meeting

Board of Commissioners

The Board of Commissioners (BoC) supervises the management of IIF by the Board of Directors (BoD). As prescribed in the Articles of Association, the BoC exercises oversight supervision of the BoD and advises the BoD on management issues. The BoC is accountable to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), which also has the authority to entrust the BoC with other duties from time to time.

The BoC must have a minimum of five members, comprising of one President Commissioner and a minimum of four Commissioners.

Board of Commissioners meetings

According to the Articles of Association, BoC meetings may be held at any time. During 2012, the BoC has conducted 10 meetings with details as follows:

TATA KELOLA PERUSAHAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham dan Akta**

Berikut Circular Resolution of Shareholders (CRoS) and Deeds yang disetujui di tahun 2012:

Circular resolutions and Deeds

The following Circular Resolution of Shareholders (CRoS) and Deeds were approved in 2012:

No.	Date	Description
CRoS 001	July 6, 2012	Appointment of Mr. Takamoto as Director
CRoS 002	July 6, 2012	Appointment of Mr. Wito Krisnahadi as Director (effective May 15, 2012)
CRoS 003	September 11, 2012	Third Amendment and Restatement to the SHA
CRoS 004	August 15, 2012	Resignation of Mr. Robert V. Zwieten and appointment of Mr. Robert Dolk as Commissioner
CRoS 007	Nov 27, 2012	Amendment to SLA agreement
Deed No. 7	Mar 27, 2012	Resignation of Mr. Bibin Busono and appointment of Mr. Kartika Wirjoatmodjo as CFO

Direksi

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengaturan arah strategis IIF, mengelola, memanfaatkan dan memelihara aset IIF dalam cara yang konsisten terhadap tujuan IIF. Direksi juga berwenang untuk mewakili IIF pada setiap masalah, termasuk di Pengadilan, untuk mengikat IIF kepada pihak lain dan untuk melakukan setiap dan semua tindakan berkaitan baik dengan manajemen maupun urusan lainnya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar serta hukum dan peraturan yang berlaku. Direksi bertemu setidaknya sebulan sekali dan pada waktu lain yang dianggap perlu.

Board of Directors

The BoD is responsible to manage and set the strategic direction of IIF, and to manage, utilize and maintain IIF's assets in a manner consistent with IIF's objectives. The BoD is also authorized to represent IIF on any matter, including in a Court of Justice, to bind IIF to other parties and to perform any and all actions, pertaining both to the Management as well as other affairs within the boundaries set by the Articles of Association and prevailing laws and regulations. The BoD meets at least once a month and at any other time deemed necessary.

Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan pengawasan operasional IIF itu. Untuk itu, Komite Audit memiliki tanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit akan melakukan tugas pengawasan secara aktif untuk Dewan Komisaris melalui pertemuan rutin dengan unit audit internal dan juga mengadakan pertemuan dengan manajemen dan perusahaan akuntan publik.

Audit Committee

The Audit Committee is responsible to support the Board of Commissioners in conducting the monitoring and supervision of IIF's operations. Therefore, the Audit Committee has a direct responsibility to the Board of Commissioners. The Audit Committee undertakes active oversight duties of the BoC through regular meetings with the internal audit unit and also convenes meeting with the Management and public accounting firms.

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE



Nastantio Hadi
VP Legal & Corporate
Secretary

Dengan lebih dari 15 tahun pengalaman di firma hukum terkemuka yang mengekspos baik transaksi domestik dan transnasional serta hukum perusahaan secara umum, saya percaya saya dapat memberikan kontribusi keahlian saya ke IIF, perusahaan high-profile dengan budaya yang unik, di mana kepentingan Pemerintah Indonesia dan perusahaan multilateral bersatu untuk mengatasi kendala investasi swasta di bidang infrastruktur.

With more than 15 years of experience in prominent law firms with exposures in both domestic and transnational transactions as well as general corporate law, I believe I am able to contribute my expertise to IIF, a high-profile company with unique culture, where the interest of the Government of Indonesia and multilateral companies are united to address the constraints of private investment in infrastructure.

Struktur, Komposisi, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Belum ada perubahan dalam komposisi Komite Audit sejak tahun 2011 sebagai berikut:

1. Sofyan Djalil, sebagai Kepala Komite Audit dan Komisaris Independen
2. Arif Baharudin, sebagai anggota
3. Hans-Juergen Hertel, sebagai anggota
4. Agus Kretarto, sebagai anggota independen
5. Darminto, sebagai anggota independen

Rapat Komite Audit

Selama 2012, Komite Audit telah melakukan 5 kali pertemuan termasuk rapat internal dengan Dewan Komisaris dan pertemuan dengan auditor eksternal. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mengevaluasi dan meninjau transparansi kegiatan IIF dan laporan keuangan serta laporan kepada Dewan Komisaris secara obyektif dan independen.

Sistem Pengendalian Internal

IIF memahami bahwa kegiatan operasional harus sesuai dengan kebijakan, prosedur operasional serta peraturan internal dan eksternal yang berlaku. Meskipun manajemen menyadari bahwa sistem pengendalian internal tidak dapat menghilangkan semua potensi risiko, namun manajemen melakukan upaya terbaik untuk mengelola dan mengendalikan risiko tersebut.

Internal Audit

Direksi bertanggung jawab untuk desain sistem audit internal yang meliputi mekanisme komprehensif prosedur operasi standar dan struktur akuntabilitas. IIF memiliki Departemen Audit Internal yang berdiri secara independen dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Internal Audit juga memiliki sinergi dengan Komite Audit.

Structure, Composition, Expertise and Independence of the Audit Committee

There has been no change in the composition of Audit Committee since 2011. The composition is as follows:

1. Sofyan Djalil, as Chairman of Audit Committee and Independent Commissioner
2. Arif Baharudin, as member
3. Hans-Juergen Hertel, as member
4. Agus Kretarto, as independent member
5. Darminto, as independent member

Audit Committee Meeting

During 2012, the Audit Committee conducted 5 meetings which included internal meetings with the Board of Commissioners and meetings with the external auditor. The meetings were conducted to evaluate and review the transparency of IIF's activities financial statements and report to the Board of Commissioners in an objective and independent manner.

Internal control system

IIF understands that the operational activities have to comply with policies, operating procedures and prevailing internal and external regulations. Although the Management is aware that the internal control systems cannot eliminate all potential risks, nevertheless the Management made its best effort to manage and control such risks.

Internal audit

The Board of Directors is responsible for the design of the internal audit system which includes the comprehensive mechanism of standard operating procedures and accountability structure. IIF has an Internal Audit Department which stands independently and has a direct responsibility to the President Director. The Internal Audit also has a synergy with the Audit Committee.

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Internal Audit memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut, antara lain:

- Mengembangkan rencana audit tahunan yang fleksible dengan menggunakan methodologi berdasar resiko dengan wajar.
- Melaksanakan rencana audit tahunan yang disetujui.
- Memberi penilaian terhadap efektifitas dan efisiensi di bidang keuangan, sumber daya manusia, operasi dan teknologi, dan yang lain.
- Menjalankan audit ketaatan terhadap peraturan dan hukum terkait.
- Memonitor, menganalisa, dan melaporkan progress kegiatan tindak lanjut.

Pada tahun 2012, Audit Internal memiliki peran sebagai Mitra Bisnis Strategis untuk memberikan nilai tambah dengan unit bisnis yang mencakup evaluasi menyeluruh dari standar prosedur operasi IIF untuk prosedur pemberian kredit / investasi, manajemen, akuntansi, pelaporan risiko keuangan dan sistem dokumentasi.

Auditor Eksternal

Melalui Surat Edaran Pemegang Saham No 001/IIF/SHR-RES/2013 tanggal 30 Januari 2013, pemegang saham menyetujui dan mengesahkan pengangkatan KAP Osman Bing Satrio & Eny (Deloitte Touche Tohmatsu Terbatas) sebagai Auditor Independen untuk IIF untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012. Firma ini tidak memberikan layanan non-audit untuk IIF selama tahun tersebut.

Pada tanggal 6 Maret 2013, auditor eksternal mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan 2012 IIF.

Manajemen Risiko

IIF mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola berbagai risiko yang timbul dari lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Untuk itu, IIF telah membentuk Divisi Manajemen

Internal Audit has the following main responsibilities, amongst others:

- Develop a flexible annual audit plan using an appropriate risk-based methodology.
- Implement the approved annual audit plan.
- Assess the efficiency and effectiveness in areas of finance, accounting, operation, human resources, IT and other activities.
- Perform an audit of compliance to related regulations and laws.
- Monitor, analyze, and report the progress of recommended follow up actions.

In 2012, the Internal Audit served as a Strategic Business Partner to provide added value to business units which included a thorough evaluation of standard operating procedures of IIF from lending/investment procedures, risk management, accounting, financial reporting and documentation systems.

External Auditor

Through Circular Resolution of Shareholders No. 001/IIF/SHR-RES/2013 dated January 30, 2013, the Shareholders approved and ratified the appointment of KAP Osman Bing Satrio & Eny (a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) as IIF's Independent Auditor for the financial year ended December 31, 2012. This firm did not render any non-audit services for IIF during the year.

On March 6, 2013, the external auditor issued an unqualified opinion on IIF's 2012 financial statements.

Risk Management

IIF takes proactive measures to manage various risks that arise from the rapidly changing business environment. For this purpose, IIF has established a Risk Management Division that is led by the Chief

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Risiko yang dipimpin oleh Direktur Risiko. Selama tahun 2012, Risiko yang ada terutama berfokus pada pengembangan organisasi serta menjaga aset IIF dalam hal investasi dalam bentuk pinjaman dan produk treasuri.

Fungsi manajemen risiko IIF merupakan tugas yang harus tertanam dalam organisasi. Fungsi ini dalam organisasi dilaksanakan berdasarkan tiga baris konsep pertahanan. Dimulai dengan Tim Investasi sebagai unit pengambil risiko di garis pertahanan pertama, diikuti oleh Tim Manajemen Risiko yang menyediakan garis pertahanan kedua untuk meninjau kembali risiko yang diambil dalam setiap transaksi individual maupun perusahaan. Baris ketiga pertahanan dilakukan oleh tim Audit yang berfungsi untuk meninjau kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko.

IIF mengadopsi konsep manajemen risiko perusahaan dengan pandangan terintegrasi terhadap risiko yang melibatkan risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, serta risiko reputasi, yang dikelola oleh Tim Manajemen Risiko.

Khusus untuk mengelola risiko kredit, Tim Risiko Kredit IIF (sebagai bagian dari Tim Manajemen Risiko) memiliki tanggung jawab utama untuk pelaksanaan kebijakan risiko kredit dan untuk meyakinkan bahwa analisis yang tepat terhadap manajemen risiko kredit, struktur, dan keputusan telah diimplementasikan selama proses kredit dilaksanakan. Tim Risiko Kredit berfungsi secara independen dari Departemen Investasi sehingga manfaat IIF dari penilaian kredit investasi dapat dipastikan independen dan obyektif.

Dalam mengelola risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko bersama dengan Operasional (di bawah Departemen Keuangan) dan Departemen Investasi mendirikan sistem yang jelas dan

Risk Officer. During 2012, the Risk Management Division of IIF mainly focuses on organizational development as well as safeguarding IIF's assets in terms of investments in loans and treasury products.

IIF's risk management function is a task that shall be embedded in the organization. This function in the organization is implemented based on the three lines of defense concept. It starts with the Investment team as a risk taking unit in the first line of defense, followed by the Risk Management team that provides second line of defense to independently review risks taken in each individual transaction as well as per company wide. The third line of defense is undertaken by the Audit team that functions to review the adequacy and effectiveness of the risk management processes.

IIF adopts an enterprise risk management concept with an integrated risk view involving credit risk, operational risk, market risk, as well as reputational risk, which are managed by the Risk Management team.

Specifically for managing credit risk, IIF's Credit Risk team (as part of the Risk Management team) has primary responsibility for implementation of credit risk policy and for assuring that appropriate credit risk management analysis, structures, and decisions are implemented throughout IIF's credit process. The Credit Risk team is functioning independently from the Investment team so as to assure that IIF benefits from independent and objective credit investment assessment.

In managing operational risk, Risk Management team together with Operations team (under the Finance Division) and Investment team established clear and well-communicated system and

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

dikomunikasikan dengan baik serta prosedur operasional yang memiliki pemeriksaan yang memadai dan mekanisme seimbang, yang bertujuan untuk meminimalkan risiko operasional pada tingkat yang aman. Adapun untuk risiko pasar, meskipun eksposur risiko pasar saat ini dapat dianggap minimal, IIF tetap aktif melakukan pemantauan kesenjangan bunga, mata uang dan likuiditas untuk meminimalkan dampak merugikan dari perubahan kondisi pasar.

Selanjutnya, mengingat tingginya standar perhatian pemegang saham terhadap isu-isu sosial dan lingkungan (S&E), IIF menerapkan delapan prinsip S&E bahwa peminjam harus mematuhi untuk memastikan tidak ada dampak yang merugikan bagi reputasi IIF. S&E Manager merupakan bagian dari Tim Manajemen Risiko yang mempunyai tanggung jawab untuk menilai kesenjangan antara pelaksanaan proyek dengan prinsip-prinsip S&E IIF, mengembangkan Rencana Aksi korektif untuk memperbaiki kekurangan yang mungkin terjadi dan untuk memantau kepatuhan proyek dengan prinsip IIF dari waktu ke waktu.

Penyampaian Umun Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang "Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur", IIF telah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2011, laporan keuangan triwulanan untuk tahun 2012 dan laporan tengah tahunan kegiatan usaha untuk tahun 2012 ke Bapepam-LK.

Publikasi untuk Laporan Keuangan

IIF mempublikasikan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2011 in Harian Tempo pada bulan Maret 2012.

operational procedures that have an adequate checks and balances mechanism. The goal is to minimize operational risk to an acceptable level. As for market risk, although the market risk exposure can currently be regarded as minimal, IIF actively conducts monitoring of interest, currency and liquidity gaps to minimize any adverse impact from changes in market conditions.

Furthermore, given the high standards of its shareholders with regards to Social and Environmental (S&E) issues, IIF applies eight S&E principles that its borrowers need to comply with and to ensure that there is no adverse reputational impact for IIF. The S&E Managers are part of the Risk Management team that are charged with responsibility to assess potential gaps in projects to IIF's S&E principles, to develop a Corrective Action Plan to rectify these gaps and to monitor compliance of the projects with IIF's principles from time to time.

Regular Submission of Financial Statements

In accordance with Regulation of Ministry of Finance No. 100/PMK.010/2009 dated May 27, 2009 regarding "Infrastructure Financing Company", IIF has submitted audited financial statements for the year 2011, quarterly financial statements for the year 2012 and semiannual report of business activity for the year 2012 to the Bapepam-LK.

Publication of financial statements

IIF published the audited financial statements for the year 2011 in Harian Tempo in March 2012.



Diah Kurniawati
SVP Risk Management

"Saya telah bekerja di industri perbankan sejak tahun 1995, dan telah mengemban berbagai tugas di segmen Corporate Banking, termasuk Investment Banking, Special Asset Management, dan Manajemen Risiko. Saya percaya saya sekarang siap untuk menghadapi tantangan yang lebih tinggi dengan mendukung IIF dalam menyediakan produk pembiayaan infrastruktur lebih beragam kepada klien".

"I have been in the banking industry since 1995, and have taken various assignments in Corporate Banking segment, including in Investment Banking, Special Asset Management, and Risk Management. I believe I am now ready to take higher challenge by supporting IIF in providing more diverse infrastructure financing products to its clients".





Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton
Jawa Timur, Indonesia
Steam Turbine Power Plant Paiton
East Java, Indonesia

LAPORAN KEUANGAN FINANCIAL STATEMENTS

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2012 DAN 2011/
*DECEMBER 31, 2012 AND 2011***

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
*AND INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***

	<u>Halaman/ Pages</u>	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	1	INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
LAPORAN KEUANGAN – Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011		FINANCIAL STATEMENTS – For the years ended December 31, 2012 and 2011
Laporan Posisi Keuangan	2	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi Komprehensif	3	Statements of Comprehensive Income
Laporan Perubahan Ekuitas	4	Statements of Changes in Equity
Laporan Arus Kas	5	Statements of Cash Flows
Catatan Atas Laporan Keuangan	6	Notes to Financial Statements

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE/
*DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011*
P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE

Kami yang bertanda tangan di bawah ini/We, the undersigned:

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nama/ Name | : | Kartika Wirjoatmodjo |
| Alamat kantor/Office address | : | 15 th Floor Energy Building, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 |
| Alamat domisili sesuai KTP atau
kartu identitas lain/
Domicile as stated in ID Card | : | Jl. DurenTiga Selatan No. 14 RT. 004 RW. 002 DurenTiga
Pancoran, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon/Phone Number | : | 021-29915060 |
| Jabatan/Position | : | President Director/Chief Financial Officer |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|--|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements; |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct; |
| b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts. |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. We are responsible for the Company's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 6 Maret/March 6, 2013

Presiden Director/Chief Financial Officer



Kartika Wirjoatmodjo

Laporan Auditor Independen

No. GA113 0075 IIF OS

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
P.T. Indonesia Infrastructure Finance

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan P.T. Indonesia Infrastructure Finance tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan P.T. Indonesia Infrastructure Finance tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report

No. GA113 0075 IIF OS

The Stockholders, Board of Commissioners and Directors
P.T. Indonesia Infrastructure Finance

We have audited the accompanying statements of financial position of P.T. Indonesia Infrastructure Finance as of December 31, 2012 and 2011, and the related statements of comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the years then ended. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits.

We conducted our audits in accordance with auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly in all material respects, the financial position of P.T. Indonesia Infrastructure Finance as of December 31, 2012 and 2011, and the results of its operation and its cash flows for the years then ended, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

OSMAN BING SATRIO & ENY



Drs. Osman Sitorus

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.0567

6 Maret 2013 / March 6, 2013

The accompanying financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than those in Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

Osman Bing Satrio & Eny

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2012 AND 2011

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2012 Rp	31 Desember/ December 31, 2011 Rp	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.783.281.186.137	948.276.379.452	Cash and cash equivalents
Unit penyertaan reksadana	6	152.486.732.750	-	Investments in mutual funds
Piutang usaha	7	644.647.850	-	Accounts receivable
Piutang lain-lain	8	2.387.987.013	3.101.483.673	Other receivables
Uang muka		941.751.176	-	Advances
Beban dibayar dimuka	9	1.929.389.210	205.692.889	Prepaid expenses
Pajak dibayar dimuka	22	1.968.142.117	822.707.669	Prepaid tax
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 2.625.200.606 tahun 2012 dan Rp 1.253.207.177 tahun 2011	10	3.578.138.814	3.260.829.345	Property and equipment - net of accumulated depreciation of Rp 2,625,200,606 in 2012 and Rp 1,253,207,177 in 2011
Aset pajak tangguhan	22	19.434.957.048	7.544.287.557	Deferred tax assets
Beban tangguhan	11	-	5.548.784.658	Deferred charges
Aset lain-lain	12	2.388.679.958	1.559.860.048	Other assets
JUMLAH ASET		1.969.041.612.073	970.320.025.291	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang lain-lain	13	1.672.882.680	279.067.754	Other payables
Utang pajak	22	506.123.895	257.484.918	Taxes payable
Beban masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	14	10.895.953.145	2.947.189.377	Accrued expenses and other liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	23	1.022.442.839	-	Post-employment benefits obligation
Pendapatan diterima dimuka	15	3.750.000.000	-	Unearned revenue
Pinjaman subordinasi	16	777.616.242.268	-	Subordinated loan
Jumlah Liabilitas		795.463.644.827	3.483.742.049	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham				Capital Stock - par value of Rp 1,000,000 per share
Modal dasar 2.000.000 saham tahun 2012 dan 2011				Authorized 2,000,000 shares in 2012 and 2011
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.175.000 saham tahun 2012 dan 1.000.000 saham tahun 2011	17	1.175.000.000.000	1.000.000.000.000	Subscribed and paid up 1,175,000 shares in 2012 and 1,000,000 shares in 2011
Agio saham	17	17.500.000.000	-	Additional paid-in capital
Rugi komprehensif lain		(84.678.666)	-	Other comprehensive loss
Akumulasi kerugian		(18.837.354.088)	(33.163.716.758)	Deficit
Jumlah Ekuitas		1.173.577.967.246	966.836.283.242	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.969.041.612.073	970.320.025.291	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2012</u> Rp	<u>2011</u> Rp	
PENDAPATAN USAHA				REVENUES
Penghasilan investasi	18	65.377.470.143	24.619.722.229	Investment income
Pendapatan jasa <i>advisory</i>	19	384.490.000	-	Advisory fee
Pendapatan lainnya		6.177.636	20.848.012	Other income
BEBAN USAHA				EXPENSES
Umum dan administrasi	20	(49.770.498.248)	(31.930.848.184)	General and administrative
Beban bunga	21	<u>(741.570.160)</u>	<u>(13.024.872.174)</u>	Interest expense
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		15.256.069.371	(20.315.150.117)	INCOME (LOSS) BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	22	<u>(929.706.701)</u>	<u>2.620.343.111</u>	TAX BENEFIT (EXPENSE)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		14.326.362.670	(17.694.807.006)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR
Rugi komprehensif lain				Other comprehensive loss
Kerugian aktuarial - bersih setelah efek pajak	22,23	<u>(84.678.666)</u>	<u>-</u>	Actuarial loss - net of tax effect
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		<u><u>14.241.684.004</u></u>	<u><u>(17.694.807.006)</u></u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.				See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Capital Stock Rp	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital Rp	Akumulasi kerugian/ Deficit Rp	Kerugian aktuarial - bersih setelah efek pajak/ Actuarial loss - net of tax effect Rp	Jumlah Ekuitas/ Total Equity Rp	
Saldo 1 Januari 2011		100.000.000.000	-	(15.468.909.752)	-	84.531.090.248	Balance as of January 1, 2011
Modal ditempatkan dan disetor	17	900.000.000.000	-	-	-	900.000.000.000	Issued and paid-up capital
Rugi komprehensif tahun berjalan		-	-	(17.694.807.006)	-	(17.694.807.006)	Total comprehensive loss during the year
Saldo 31 Desember 2011		1.000.000.000.000	-	(33.163.716.758)	-	966.836.283.242	Balance as of December 31, 2011
Modal ditempatkan dan disetor	17	175.000.000.000	-	-	-	175.000.000.000	Issued and paid-up capital
Tambahan modal disetor	17	-	17.500.000.000	-	-	17.500.000.000	Additional paid-in capital
Laba tahun berjalan		-	-	14.326.362.670	-	14.326.362.670	Income during the year
Rugi komprehensif lain Kerugian aktuarial - bersih setelah pajak	22,23	-	-	-	(84.678.666)	(84.678.666)	Other comprehensive loss Actuarial loss - net of tax
Jumlah laba komprehensif		-	-	14.326.362.670	(84.678.666)	14.241.684.004	Total comprehensive income
Saldo 31 Desember 2012		1.175.000.000.000	17.500.000.000	(18.837.354.088)	(84.678.666)	1.173.577.967.246	Balance as of December 31, 2012

Lihat catatan atas laporan keuangan
yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial
statements which are an integral
part of the financial statements.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011

	2012 Rp	2011 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(45.063.858.201)	(31.733.963.940)	Payment to suppliers and employees
Penerimaan pendapatan bunga - <i>Convertible Subordinated Loan</i>	-	13.023.482.205	Receipt from interest income - <i>Convertible Subordinated Loan</i>
Penerimaan pendapatan investasi	65.219.131.034	8.535.390.709	Receipt from investment income
Penerimaan pendapatan diterima di muka	3.750.000.000	-	Receipt from unearned revenue
Penerimaan jasa <i>advisory</i>	200.691.150	-	Receipt from advisory fee
Pembayaran pajak final	(12.792.149.970)	(4.923.944.446)	Payment of final tax
Pembayaran beban bunga	-	(13.024.872.174)	Payment of interest expenses
Arus kas bersih yang diperoleh (digunakan) dalam aktivitas operasi	11.313.814.013	(28.123.907.646)	Net cash provided (used) in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penarikan deposito berjangka - <i>Convertible Subordinated Loan</i>	-	559.698.000.000	Withdrawal of time deposit - <i>Convertible Subordinated Loan</i>
Pembelian unit penyertaan reksadana	(151.685.687.500)	-	Purchase of investment in mutual funds
Perolehan aset tetap	(1.689.302.898)	(322.569.450)	Acquisition of property and equipment
Arus kas bersih diperoleh (digunakan) untuk aktivitas investasi	(153.374.990.398)	559.375.430.550	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran utang <i>Convertible Subordinated Loan</i>	-	(557.854.628.145)	Payment of <i>Convertible Subordinated Loan</i>
Penerimaan pinjaman subordinasi	784.565.983.070	-	Received of subordinated loan
Setoran modal	192.500.000.000	900.000.000.000	Paid up capital
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	977.065.983.070	342.145.371.855	Net cash provided by financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	835.004.806.685	873.396.894.759	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	948.276.379.452	74.879.484.693	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	1.783.281.186.137	948.276.379.452	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.			See accompanying notes to financial statements which are an integral part of the financial statements.

1. UMUM

P.T. Indonesia Infrastructure Finance ("Perusahaan") didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian No. 34 tanggal 15 Januari 2010, dari Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, bersama dengan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 April 2010 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 20 tanggal 11 Maret 2011, Tambahan No. 5123. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 3 dari Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, tanggal 7 Maret 2012 mengenai peningkatan modal disetor dan akta No. 9 dari Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, tanggal 14 September 2012 mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menjalankan kegiatan usaha berikut ini:

- a. memberikan pinjaman dalam bentuk, antara lain, pinjaman senior, pinjaman subordinasi/*mezzanine financing*, *bridge financing*, *take out financing* dan/atau pembiayaan kembali;
- b. memberikan jaminan dalam bentuk, antara lain, pemenuhan liabilitas keuangan, *credit enhancement* dan/atau *performance bonds*;
- c. penyertaan modal;
- d. memberikan jasa dalam mencari pasar swap yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- e. memberikan jasa konsultasi yang berkaitan dengan, antara lain, penilaian risiko, analisa kelayakan, struktur proyek, model pembiayaan, dan/atau pengembangan proyek; dan
- f. melakukan kegiatan pembiayaan lain yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur sebagaimana diizinkan oleh Undang-undang.

1. GENERAL

P.T. Indonesia Infrastructure Finance ("the Company") was established under the laws of Republic of Indonesia as mentioned in the Deed of Establishment No. 34 dated January 15, 2010, of Aulia Taufani, S.H., as substitute of Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, and had been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by virtue of his decree No. AHU-21503.AH.01.01.Tahun 2010 dated April 28, 2010 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 20 dated March 11, 2011, Supplementary No. 5123. The Company's Articles of Association has been amended several times, most recently with notarial deed No. 3 of Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, dated March 7, 2012 concerning the increase in additional paid-up capital and notarial deed No. 9 of Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, dated September 14, 2012 concerning change in the composition of Board of Commissioners.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the objective of its activities is to engage in infrastructure projects financing in Indonesia.

The Company may perform the following activities to achieve its objectives:

- a. providing loans in the form of, among others, senior debts, subordinated debts/*mezzanine financing*, *bridge financing*, *take-out financing* and/or refinancing;
- b. providing guarantees in the form of, among others, fulfilment of financial liabilities, *credit enhancement*, and/or *performance bonds*;
- c. equity investment;
- d. providing services in searching for swap market related to infrastructure financing companies;
- e. providing consultation services related to, among others, risk assessment, feasibility analysis, project structuring, financing scheme, and/or project development; and
- f. financing other activities related to infrastructure projects as permitted by Law.

Perusahaan telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatannya melalui Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-439/KM.10/2010 tanggal 6 Agustus 2010.

The Company has obtained a license from the Minister of Finance through Decree No. KEP-439/KM.10/2010 dated August 6, 2010.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Gedung Energi lantai 15, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta, Indonesia.

The Company's head office is located at Energy Building, 15th floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, Indonesia.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

The members of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2012 and 2011 are as follows:

	2012	2011	
Dewan Komisaris Presiden Komisaris Komisaris	Sofyan Djalil Arif Baharudin Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum Robert Olivier Dolk Hans Juergen Hertel Marwanto Harjowiryo Rajeev Kannan	Sofyan Djalil Arif Baharudin Jemal-Ud-Din Al Noor Kassum Robert van Zwieten Hans Juergen Hertel Marwanto Harjowiryo -	Board of Commissioners President Commissioner Commissioner
Direksi Presiden Direktur Direktur	Kartika Wirjoatmodjo Harold J.D. Tjiptadjaja Haruhiko Takamoto Wito Krisnahadi	Kartika Wirjoatmodjo Bibin Busono Harold J.D. Tjiptadjaja -	Directors President Director Director

Komite audit Perusahaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

The Company's audit committee as of December 31, 2012 and 2011 were as follows:

	2012	2011	
Ketua Anggota	Sofyan Djalil Arif Baharudin Hans Juergen Hertel	Sofyan Djalil Arif Baharudin Hans Juergen Hertel	Chairman Members
Anggota independen	Agus Kretarto Darminto	Agus Kretarto Darminto	Independent members

Pada tanggal 15 Agustus 2012, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui pengunduran diri Bapak Robert van Zwieten dari jabatannya sebagai Komisaris Perusahaan dan menunjuk Bapak Robert Olivier Dolk sebagai Komisaris baru Perusahaan yang berlaku efektif sejak tanggal 15 Agustus 2012.

On August 15, 2012, the Shareholders of the Company approved the resignation of Mr. Robert van Zwieten from his position as Commissioner and appointed Mr. Robert Olivier Dolk to serve as the new Commissioner of the Company effective from August 15, 2012.

Pada tanggal 18 Juli 2012, Pemegang Saham Perusahaan mengangkat Bapak Wito Krisnahadi sebagai Direktur Perusahaan yang berlaku efektif sejak 15 Mei 2012.

On July 18, 2012, the Shareholders of the Company appointed Mr. Wito Krisnahadi as Director of the Company effective from May 15, 2012.

Pada tanggal 27 Maret 2012, Pemegang Saham Perusahaan menyetujui pengunduran diri Bapak Bibin Busono dari jabatannya sebagai Direktur Perusahaan dan menunjuk sementara Bapak Kartika Wirjoatmodjo untuk merangkap sebagai Direktur Keuangan Perusahaan yang efektif sejak 4 April 2012.

Pada tanggal 7 Maret 2012, Pemegang Saham Perusahaan mengangkat Bapak Haruhiko Takamoto dan Bapak Rajeev Kannan masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris Perusahaan yang berlaku efektif sejak 3 April 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2012 jumlah karyawan Perusahaan adalah 31 orang (31 Desember 2011: 6 orang).

Total jumlah remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah Rp 14.286.815.808 dan Rp 7.520.353.381.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan semua standar baru dan revisi serta interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012. Penerapan standar baru dan revisi serta interpretasi telah berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Standar baru ini menggantikan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 50 (revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan.

Standar baru ini mengakibatkan pengungkapan mengenai (a) signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan Perusahaan, dan (b) sifat dan luasnya risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana Perusahaan terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut (Catatan 30).

On March 27, 2012, the Shareholders of the Company approved the resignation of Mr. Bibin Busono from his position as Director and appointed temporarily Mr. Kartika Wirjoatmodjo to serve concurrently as Chief Financial Officer of the Company effective from April 4, 2012.

On March 7, 2012, the Shareholders of the Company appointed Mr. Haruhiko Takamoto and Mr. Rajeev Kannan as Director and Commissioner of the Company effective from April 3, 2012.

As of December 31, 2012, the Company had 31 employees (December 31, 2011: 6 employees).

Total remuneration paid to the Company's Board of Commissioners and Directors for the years ended December 31, 2012 and 2011 amounted to Rp 14,286,815,808 and Rp 7,520,353,381, respectively.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION OF PSAK ("ISAK")

a. Standards effective in the current year

In the current year, the Company has adopted all of the new and revised standards and interpretations issued by the Financial Accounting Standard Board of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and effective for accounting periods beginning on January 1, 2012. The adoption of these new and revised standards and interpretations has resulted in changes to the Company's accounting policies in the following area, and affected the financial statement presentation and disclosures for the current or prior years:

PSAK 60, Financial Instruments: Disclosures

This new standard supersedes the disclosure requirements of PSAK 50 (revised 2006), Financial Instruments: Presentation and Disclosure.

This new standard resulted in the disclosures concerning (a) the significance of financial instruments for the Company's financial position and performance; and (b) the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the Company is exposed during the period and at the end of the reporting period, and how the Company manages those risks (Note 30).

Berikut ini standar baru dan standar revisi serta interpretasi yang relevan dengan operasional Perusahaan dan diterapkan dalam laporan keuangan. Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi mempengaruhi akuntansi untuk transaksi masa depan:

- PSAK 10 (revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK 16 (revisi 2011), Aset Tetap
- PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja
- PSAK 26 (revisi 2011), Biaya Pinjaman
- PSAK 30 (revisi 2011), Sewa
- PSAK 46 (revisi 2010), Pajak Penghasilan
- PSAK 50 (revisi 2010), Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK 53 (revisi 2010), Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK 55 (revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK 56 (revisi 2011), Laba Per Saham
- PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- ISAK 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK 18, Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya
- ISAK 23, Sewa Operasi - Insentif
- ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa.
- ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat

b. Standar dan interpretasi telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013 adalah PSAK 38 (revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali.

Penerapan ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan atas jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

The following new and revised standards and interpretations which are relevant to the Company's operations have also been adopted in these financial statements. Their adoption has not had any significant impact on the amounts reported in these financial statements but may impact the accounting for future transactions or arrangements:

- PSAK 10 (revised 2010), The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
- PSAK 16 (revised 2011), Property, Plant and Equipment
- PSAK 24 (revised 2010), Employee Benefits
- PSAK 26 (revised 2011), Borrowing Costs
- PSAK 30 (revised 2011), Lease
- PSAK 46 (revised 2010), Income Taxes
- PSAK 50 (revised 2010), Financial Instruments: Presentation
- PSAK 53 (revised 2010), Share-based Payments
- PSAK 55 (revised 2011), Financial Instruments: Recognition and Measurement
- PSAK 56 (revised 2011), Earnings per Share
- PSAK 61, Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance
- ISAK 15, PSAK 24 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction
- ISAK 18, Government Assistance – No Specific Relation to Operating Activities
- ISAK 20, Income Taxes – Change in Tax Status of an Entity or its Shareholders
- ISAK 23, Operating Leases – Incentives
- ISAK 24, Evaluating the Substance of Transactions involving the Legal Form of a Lease
- ISAK 26, Reassessment of Embedded Derivatives

b. Standards and interpretation in issue but not yet adopted

Effective for periods beginning on or after January 1, 2013 is PSAK 38 (revised 2012), Business Combination Under Common Control.

The adoption has not had any significant impact on the amounts reported in these financial statements.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk menyajikan laporan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan standar akuntansi dan pelaporan yang berlaku di negara dan yuridiksi lain.

b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan entitas pelapor; atau

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such financial statements are not intended to present the financial position, result of operations and cash flows in accordance with accounting standards and reporting practices in other countries and jurisdictions.

b. Financial Statements Presentation

The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting. The financial statements are prepared based on the historical cost, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies.

The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

c. Foreign Currency Transactions and Translation

The books of accounts of the Company are maintained in Indonesian Rupiah which is the Company's functional currency. Transactions during the year involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the rates of exchange prevailing at that date. The resulting gains or losses are credited or charged to current operations.

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (the reporting entity):

- a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or

- | | |
|--|---|
| <p>iii. personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.</p> <p>b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:</p> <p>i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).</p> <p>ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).</p> <p>iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.</p> <p>iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.</p> <p>v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.</p> <p>vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).</p> <p>vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).</p> | <p>iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.</p> <p>b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:</p> <p>i. The entity, and the reporting entity are members of the same Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).</p> <p>ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a Company of which the other entity is a member).</p> <p>iii. Both entities are joint ventures of the same third party.</p> <p>iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.</p> <p>v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.</p> <p>vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).</p> <p>vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).</p> |
|--|---|

Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

All transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)
- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

e. Financial Assets

All financial assets are recognised and derecognised on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the time frame established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit and loss, which are initially measured at fair value.

The Company's financial assets are classified as follows:

- Fair Value Through Profit and Loss (FVTPL)
- Loans and receivables

Fair Value Through Profit Or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as at FVTPL when the financial asset is either held for trading or it is designated as at FVTPL.

A financial asset is classified as held for trading if:

- it has been acquired principally for the purpose of selling in the near term; or
- on initial recognition it is part of an identified portfolio of financial instruments that the entity manages together and has a recent actual pattern of short-term profit-taking; or
- it is a derivative that is not designated and effective as a hedging instrument.

A financial asset other than a financial asset held for trading may be designated as at FVTPL upon initial recognition if:

- such designation eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency that would otherwise arise; or

- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Perusahaan disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi), misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 6.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Piutang nasabah dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai 'Pendapatan bunga'.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

- a group of financial assets, financial liabilities or both is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the Company is provided internally on that basis to the entity's key management personnel (as defined in PSAK 7: Related Party Disclosures), for example the entity's board of directors and Chief Executive Officer.

Financial assets at FVTPL are stated at fair value, with any gain or loss recognised in profit and loss. Fair value is determined in the manner described in Note 6.

Loans and receivables

Receivables from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as "loans and receivables". Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment. Interest is recognised by applying the effective interest rate method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Interest income on financial assets classified as loans and receivables is included in the statement of comprehensive income and is reported as 'Interest income'.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and allocating of interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and commissions paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan restrukturisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu yang memiliki karakteristik yang sama, akan dilakukan penurunan nilai secara kolektif. Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh kewajiban yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Revenue is recognized on an effective interest basis for financial instruments.

Impairment of financial assets

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset and the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For financial assets, the objective evidence of impairment may include:

- significant financial difficulty of the issuer or counterparty; or
- default or delinquency in interest or principal payments; or
- it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial restructuring.

For certain categories of financial assets which have similar characteristics, the assets are assessed for impairment on a collective basis. The financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering credit segmentation and past-due status. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets by being indicative of the debtor or counterparts' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment is the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Perusahaan dan entitas anak setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognised in statements of comprehensive income.

Derecognition of financial assets

The Company derecognises a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognises its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognise the financial asset and also recognises a collateralised borrowing for the proceeds received.

f. Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Company are classified according to the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of the Company and its subsidiaries after deducting all of its liabilities.

Equity instruments are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.

Liabilitas keuangan

Utang lain-lain dan pinjaman subordinasi pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset Tetap – Pemilikan Langsung

Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah sebagaimana mestinya, hanya apabila kemungkinan besar Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan handal. Nilai tercatat komponen yang diganti tidak lagi diakui.

Financial liabilities

Other payables and subordinated loans are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method, with interest expense recognised on an effective yield basis.

Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the settlement or redemption of borrowings is recognized over the term of the borrowings.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognises financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged or cancelled or they expire.

g. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

h. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Property and Equipment – Direct Acquisition

Property and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or are recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Komputer	4	Computers
Peralatan kantor	4	Office equipment
Kendaraan	4	Vehicles
Perabotan dan peralatan kantor	4	Office furniture and fixtures

Apabila nilai tercatat aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

Akumulasi biaya konstruksi serta pemasangan peralatan kantor dan komputer, dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal yang sama. Biaya pemeliharaan dan perbaikan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya.

j. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan mencakup semua pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tidak berwujud.

k. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara harga jual neto atau nilai pakai. Jika jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

Depreciation of property and equipment is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives as follows:

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

The accumulated costs of the construction of and the installation of office equipment and computers are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to property and equipment accounts when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from such date. Maintenance and repair cost are charged as an expense when incurred.

j. Intangible Assets

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and impairment. Historical cost includes expenditures that are directly attributable to the acquisition of the items.

k. Impairment of Non-Financial Assets

At reporting date, the Company reviews the carrying amounts of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. If the recoverable amount of a non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

I. Sewa

I. Leases

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Sebagai Lessee

As lessee

Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Perusahaan yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Company at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the statements of financial position as a finance lease obligation.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontijen dibebankan pada periode terjadinya.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line* basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

m. Recognition of Revenues and Expenses

Jasa advisory

Advisory fee

Jasa *advisory* diakui ketika jasa-jasa telah diberikan sesuai dengan kontrak perjanjian.

Advisory fee is recognized when the services are rendered in accordance with the respective engagement contracts.

Pendapatan bunga

Interest revenue

Pendapatan bunga diakui berdasarkan waktu terjadinya dengan acuan jumlah pokok terhutang dan tingkat bunga yang berlaku.

Interest revenue is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the applicable interest rate.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya.

n. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas, kecuali perbedaan yang berhubungan dengan pajak penghasilan final. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan bersih di laporan posisi keuangan, kecuali aset dan liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang berbeda, atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

o. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Imbalan kerja karyawan jangka pendek

Imbalan kerja karyawan jangka pendek diakui pada saat terhutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual.

Liabilitas pensiun

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 yang pada dasarnya merupakan program imbalan pasti. Untuk usia pensiun normal, Perusahaan menghitung imbalan kerja karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Expenses

Expenses are recognized when incurred.

n. Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year, computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statements carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the reporting date. Deferred tax is charged or credited in the statements of comprehensive income, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities, except for deferred tax assets and liabilities for different entities, are offset in the statements of financial position in the same manner the current tax assets and liabilities are presented.

o. Post-Employment Benefit Obligation

Short-term employee benefit

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

Pension obligation

The Company provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") which in substance represent a defined benefit plan. For normal pension scheme, the Company calculates the employee benefits under the Labor Law.

Sejak tanggal 1 Januari 2012, PSAK 24 (revisi 2010), Imbalan Kerja, juga memperkenankan pengakuan akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial sebagai pendapatan komprehensif lain di ekuitas, selain pendekatan koridor dan laba rugi. Perusahaan mengakui akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial sebagai pendapatan komprehensif lain di ekuitas.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode Projected Unit Credit. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau vested, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi vested.

Keuntungan atau kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman, perubahan asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya di pendapatan komprehensif lainnya.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN ESTIMASI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diharuskan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan dijelaskan dibawah ini:

Perusahaan mengakui aset pajak tangguhan dari akumulasi rugi fiskal. Manajemen memperkirakan bahwa rugi fiskal tersebut akan dapat dikompensasi terhadap laba fiskal untuk lima tahun mendatang sejak terjadinya. Dalam menyusun perkiraan tersebut mengharuskan manajemen mengestimasi laba fiskal yang diharapkan akan dihasilkan dari operasi Perusahaan. Perubahan signifikan terhadap asumsi dapat secara material mempengaruhi nilai aset pajak tangguhan.

Perhitungan akumulasi rugi fiskal dan aset pajak tangguhan disajikan pada Catatan 22.

Beginning January 1, 2012, PSAK 24 (revised 2010), Employee Benefits, also allows the recognition of accumulated actuarial gains and losses as other comprehensive income under equity, in addition to the corridor and profit or loss approaches. The Company recognized the accumulated actuarial gains and losses as other comprehensive income under equity.

The cost of providing post-employment benefits is determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a straight-line basis over the average period until the benefits become vested.

Actuarial gains or losses arising from experience adjustments, changes in actuarial assumptions are directly recognized in other comprehensive income.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND ESTIMATES

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the management are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period are discussed below:

The Company recognized deferred tax assets on its accumulated fiscal losses. Management estimated the fiscal loss which can be compensated against the taxable income for the next five years. In preparing the forecast, management makes judgement as to the assumptions needed to estimate the future taxable income expected to be generated from the Company's operations. Any significant changes in the assumptions may materially affect the amount of deferred tax assets.

Calculation of accumulated fiscal losses and deferred tax assets is disclosed in Note 22.

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011 - Continued

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	31 Desember/ December 31, 2012	31 Desember/ December 31, 2011	
	Rp	Rp	
Kas	20.767.584	13.473.212	Cash on hand
Bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.627.754.264	145.032.835	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	173.962.242	-	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.089.176	2.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	5.311.514	-	PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
Standard Chartered Bank	64.679.979.840	-	Standard Chartered Bank
PT Bank Permata Tbk	502.760.559	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank ANZ Indonesia	478.134.648	-	PT Bank ANZ Indonesia
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia	374.737.578	558.251.434	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia
PT CIMB Niaga Tbk	86.124.162	-	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	23.303.914	-	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
PT Bank International Indonesia Tbk	4.095.233	-	PT Bank International Indonesia Tbk
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Pihak berelasi			Related party
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	210.848.935	57.621.971	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Danamon Indonesia	225.497.158.524	-	PT Bank Danamon Indonesia
Standard Chartered Bank	156.337.726.212	-	Standard Chartered Bank
PT Bank Permata Tbk	6.639.229	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	5.792.523	-	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
Jumlah	450.021.418.553	762.906.240	Total
Deposito Berjangka			Time deposits
Rupiah			Rupiah
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	280.000.000.000	397.500.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	167.500.000.000	350.000.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	52.500.000.000	-	PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia	10.000.000.000	-	PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank International Indonesia Tbk	160.000.000.000	-	PT Bank International Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	120.000.000.000	-	PT Bank Permata Tbk
PT CIMB Niaga Tbk	120.000.000.000	-	PT CIMB Niaga Tbk
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	20.000.000.000	-	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia	-	200.000.000.000	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - Cabang Indonesia
Dolar Amerika Serikat			U.S. Dollar
Pihak berelasi			Related party
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	96.700.000.000	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk	153.753.000.000	-	PT Bank UOB Buana Indonesia Tbk
PT Bank Permata Tbk	152.786.000.000	-	PT Bank Permata Tbk
Jumlah	1.333.239.000.000	947.500.000.000	Total
Jumlah	1.783.281.186.137	948.276.379.452	Total
Tingkat rata-rata bunga deposito berjangka per tahun			Average interest rate per annum of time deposit
Rupiah	4,50% - 7,25%	4,50% - 7,00%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,00% - 3,25%	-	U.S. Dollar

Jangka waktu deposito berjangka di atas berkisar antara satu bulan sampai dengan tiga bulan.

The above time deposits have terms of one month to three months.

6. UNIT PENYERTAAN REKSADANA

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan melakukan penempatan pada reksadana dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2012 Rp
Diperdagangkan:	
CIMB Principal CPF CB VII - MN	50.509.478.030
Mandiri Protected Dynamic Seri 10	101.977.254.720
Jumlah	<u>152.486.732.750</u>

Pada tanggal 25 Oktober 2012, Perusahaan membeli reksadana terproteksi CIMB Principal CPF CB VII – MN sebesar Rp 50.260.187.500 yang diterbitkan oleh PT CIMB Principal Asset Management.

Pada tanggal 27 Desember 2012, Perusahaan membeli reksadana terproteksi Mandiri Protected Dynamic Seri 10 sebesar Rp 101.425.500.000 yang diterbitkan oleh PT Mandiri Manajemen Investasi.

Investasi ini diukur pada nilai wajar, berdasarkan nilai aset bersih yang dipublikasikan oleh bank kustodian.

6. INVESTMENTS IN MUTUAL FUNDS

As of December 31, 2012, the Company has investments in the following units of mutual funds:

Trading:	
CIMB Principal CPF CB VII - MN	
Mandiri Protected Dynamic Series 10	
Total	

On October 25, 2012, the Company purchased protected mutual fund CIMB Principal CPF CB VII – MN amounting to Rp 50,260,187,500 issued by PT CIMB Principal Asset Management.

On December 27, 2012, the Company purchased protected mutual fund Mandiri Protected Dynamic Series 10 amounting to Rp 101,425,500,000 issued by PT Mandiri Manajemen Investasi.

These investments are measured at fair value, which is determined based on the net asset value published by the custodian bank.

7. PIUTANG USAHA

Piutang usaha sebagian besar merupakan tagihan kepada pihak ketiga berkaitan dengan jasa *advisory* yang dilakukan oleh Perusahaan.

Perusahaan tidak mengakui cadangan kerugian penurunan nilai, karena tidak terdapat piutang usaha yang telah lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan.

7. ACCOUNTS RECEIVABLE

Accounts receivable mainly represent amounts due from third parties in relation to advisory fee provided by the Company.

The Company did not recognize allowance for impairment losses, because there were no accounts receivable that are past due at the end of the reporting period.

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2012 Rp
Bunga	2.311.876.367
Lain-lain	76.110.646
Jumlah	<u>2.387.987.013</u>

Piutang bunga merupakan bunga yang masih harus diterima atas penempatan deposito berjangka.

8. OTHER RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2011 Rp
Interest	3.060.849.315
Others	40.634.358
Total	<u>3.101.483.673</u>

Interest receivable represents accrued interest on time deposits.

9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	31 Desember/ December 31, 2012	31 Desember/ December 31, 2011
	Rp	Rp
Sewa dan pemeliharaan	673.129.984	137.401.372
Asuransi	502.300.716	68.291.517
Lainnya	753.958.510	-
Jumlah	<u>1.929.389.210</u>	<u>205.692.889</u>

Perusahaan melakukan perjanjian sewa ruangan kantor dengan PT Api Metra Graha untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Juli 2015. Beban sewa diakui sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 20).

9. PREPAID EXPENSES

Rent and service charge
Insurance
Others
Total

The Company entered into an office lease agreement with PT Api Metra Graha for the period from January 1, 2011 to July 31, 2015. Rental expense is presented as part of general and administrative expenses (Note 20).

10. ASET TETAP

	1 Januari/ January 1, 2012	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2012	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan					Cost
Kendaraan	2.106.400.000	522.700.000	-	2.629.100.000	Vehicles
Komputer	335.299.872	357.592.499	-	692.892.371	Computers
Peralatan kantor	51.310.000	39.650.000	-	90.960.000	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	2.021.026.650	769.360.399	-	2.790.387.049	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>4.514.036.522</u>	<u>1.689.302.898</u>	<u>-</u>	<u>6.203.339.420</u>	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated depreciation
Kendaraan	702.133.332	592.693.751	-	1.294.827.083	Vehicles
Komputer	73.054.252	127.968.393	-	201.022.645	Computers
Peralatan kantor	7.768.547	18.714.548	-	26.483.095	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	470.251.046	632.616.737	-	1.102.867.783	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>1.253.207.177</u>	<u>1.371.993.429</u>	<u>-</u>	<u>2.625.200.606</u>	Total
Jumlah tercatat	<u>3.260.829.345</u>			<u>3.578.138.814</u>	Net carrying value

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011 - Continued

	1 Januari/ January 1, 2011	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2011	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Biaya Perolehan					Cost
Kendaraan	2.106.400.000	-	-	2.106.400.000	Vehicles
Komputer	214.261.472	121.038.400	-	335.299.872	Computers
Peralatan kantor	19.635.000	31.675.000	-	51.310.000	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	1.851.170.600	169.856.050	-	2.021.026.650	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>4.191.467.072</u>	<u>322.569.450</u>	<u>-</u>	<u>4.514.036.522</u>	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated depreciation
Kendaraan	175.533.332	526.600.000	-	702.133.332	Vehicles
Komputer	14.020.032	59.034.220	-	73.054.252	Computers
Peralatan kantor	1.540.005	6.228.542	-	7.768.547	Office equipment
Peralatan dan perabotan kantor	2.791.463	467.459.583	-	470.251.046	Office furniture and fixtures
Jumlah	<u>193.884.832</u>	<u>1.059.322.345</u>	<u>-</u>	<u>1.253.207.177</u>	Total
Jumlah tercatat	<u>3.997.582.240</u>			<u>3.260.829.345</u>	Net carrying value

Penyusutan aset tetap dicatat sebagai bagian dari beban umum dan administrasi (Catatan 20).

Depreciation of property and equipment is charged to general and administrative expenses (Note 20).

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, aset tetap telah diasuransikan kepada PT Chartis Insurance Indonesia dan PT Asuransi Central Asia terhadap risiko kerusakan dan kehilangan dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp 4.695.832.238.

At December 31, 2012 and 2011, property and equipment were insured with PT Chartis Insurance Indonesia and PT Asuransi Central Asia against damage and loss risks for Rp 4,695,832,238.

11. BEBAN TANGGUHAN

Beban tangguhan merupakan biaya transaksi yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman subordinasi (SLA) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terkait dengan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB). Pada tahun 2012, biaya transaksi tersebut disajikan sebagai pengurang saldo pinjaman subordinasi (Catatan 16).

11. DEFERRED CHARGES

Deferred charges represent transaction cost for the Subordinated Loan Agreement (SLA) with PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) related to loans from the Asian Development Bank (ADB) and the World Bank (WB). In 2012, such transaction cost is presented as a deduction of subordinated loan (Note 16).

12. ASET LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2012
	Rp
Perangkat lunak komputer - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp 37.861.368 tahun 2012 dan nihil tahun 2011	1.779.484.301
Lain-lain	609.195.657
Jumlah	<u>2.388.679.958</u>

12. OTHER ASSETS

	31 Desember/ December 31, 2011
	Rp
Computer software - net of accumulated amortisation of Rp 37,861,368 in 2012 and nil in 2011	1.010.348.399
Others	549.511.649
Total	<u>1.559.860.048</u>

13. UTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2012 Rp
Pihak berelasi	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	1.181.641.992
Pihak ketiga	
Lain-lain	491.240.688
Jumlah	<u>1.672.882.680</u>

Utang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan utang atas jasa *advisory* yang diberikan oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation kepada Perusahaan.

Utang lain-lain kepada pihak ketiga merupakan utang berkaitan dengan pembelian barang dan jasa untuk keperluan operasional Perusahaan.

13. OTHER PAYABLES

	31 Desember/ December 31, 2011 Rp	
Related party		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	-	
Third parties		
Others	279.067.754	
Total	<u>279.067.754</u>	

Other payables to related party represents advisory fee rendered by Sumitomo Mitsui Banking Corporation to the Company.

Other payables to third parties represents payables relating to purchase of goods and services for the Company's operations.

14. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR DAN LIABILITAS LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2012 Rp
Bonus dan insentif	4.607.160.396
Biaya profesional	1.727.846.241
Remunerasi dan beban operasional	
Dewan Komisaris	1.756.266.450
Tunjangan	1.181.259.877
Beban bunga (Catatan 16)	733.523.775
Beban komitmen	439.956.411
Perangkat lunak komputer	355.807.161
Lain-lain	94.132.834
Jumlah	<u>10.895.953.145</u>

14. ACCRUED EXPENSES AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2011 Rp	
Bonus and incentives	1.000.000.000	
Professional fees	-	
Remuneration and operational expense of Board of Commissioners	359.407.460	
Allowance	-	
Interest expense (Note 16)	-	
Commitment fee	460.956.667	
Computer software	1.010.348.399	
Others	116.476.851	
Total	<u>2.947.189.377</u>	

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka merupakan *upfront fee* yang diterima berkaitan dengan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur.

15. UNEARNED REVENUE

Unearned revenue represents upfront fee received in relation to credit facility provided to debtor.

16. PINJAMAN SUBORDINASI

Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan masing-masing USD 100.000.000 dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) (Catatan 26). Pada tanggal 31 Desember 2012, pokok pinjaman yang sudah digunakan dari fasilitas pinjaman subordinasi masing-masing sebesar USD 71.134.021 dari ADB dan USD 10.000.000 dari WB. Rincian saldo pinjaman adalah sebagai berikut:

16. SUBORDINATED LOAN

The Company obtained subordinated loan facility from SMI which represents channeling facility amounting to USD 100,000,000 each from Asian Development Bank (ADB) and World Bank (WB) (Note 26). As of December 31, 2012, loan principal withdrawn from the subordinated loan facility amounted to USD 71,134,021 and USD 10,000,000 from ADB and WB, respectively. Details of outstanding loans are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2012	31 Desember/ December 31, 2011	
	Rp	Rp	
Asian Development Bank	687.865.983.070	-	Asian Development Bank
World Bank	96.700.000.000	-	World Bank
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	(6.949.740.802)	-	Unamortized transaction cost
Jumlah	<u>777.616.242.268</u>	<u>-</u>	Total

Pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari ADB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,45% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Maret dan 1 September. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 September 2014 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2034.

The subordinated loans from SMI which represents channeling from ADB bear interest rate of LIBOR 6 months + 1.45% per annum paid semiannually on 1 March and 1 September. The first installment of the loan's principal will commence on September 1, 2014 and will mature on March 1, 2034.

Pinjaman subordinasi dari SMI yang merupakan pinjaman penerusan dari WB memiliki tingkat bunga LIBOR 6 bulan + 1,52% per tahun yang dibayarkan setiap enam bulanan pada tanggal 1 Mei dan 1 November. Pembayaran pokok pinjaman yang pertama dilakukan pada tanggal 1 November 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 November 2033.

The subordinated loans from SMI which represents channeling from WB bear interest rate of LIBOR 6 months + 1.52% per annum paid semiannually on 1 May and 1 November. The first installment of the loan's principal will commence on November 1, 2018 and will mature on November 1, 2033.

Dalam Perjanjian Pinjaman Subordinasi, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya menjaga persyaratan rasio lancar sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) sebesar 12%.

In the Subordinated Loan Agreement, the Company must satisfy the following requirements, which include among others, maintain the current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

Selain itu, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari SMI, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut, di antaranya:

In addition, unless the prior written consent of SMI has been obtained, the Company is not allowed to carry-out the following, amongst others:

1. Menjamin atau bertanggung jawab atas kewajiban utang, baik kontingen atau dengan cara lain kecuali merupakan bagian dari kegiatan usaha normal Perusahaan dan tetap memenuhi persyaratan rasio *leverage* yang ditetapkan.
2. Mengubah tahun fiskal.
3. Melakukan penggabungan, pemisahan (*spin off*), konsolidasi atau reorganisasi.
4. Membayar kembali atau membayar dimuka, membeli, menebus, mengganti atau melepaskan diri dari kewajiban utang apapun selain sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kredit.
5. Melakukan tindakan yang akan menyebabkan Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, penipuan, atau tindakan korupsi dan praktek ilegal lainnya.
6. Menimbulkan utang subordinasi apapun, jika setelah timbulnya utang subordinasi tersebut, rasio utang subordinasi terhadap ekuitas akan lebih besar dari 2,5 berbanding 1.

1. Guarantee or beliable with respect to any indebtedness, whether contingent or otherwise, unless it is in the ordinary course of the Company's business and in compliance with the leverage ratio requirements.
2. Change its financial year.
3. Undertake any merger, spin off, consolidation or reorganization.
4. Repay or prepay, purchase, redeem, reimburse or discharge any of its indebtedness other than in accordance with the provisions of the Loan Agreement.
5. Commit to any act that will cause Money Laundering, Financing of Terrorism, fraud, or other corrupt or illegal practices.
6. Incur any subordinated debt, if after the incurrence of such subordinated debt the ratio of subordinated debt to equity shall be greater than 2.5 to 1.

Pada tanggal 31 Desember 2012, Perusahaan telah memenuhi ketentuan batas minimum rasio lancar sebesar 1,2 dan rasio kecukupan modal minimum sebesar 12%.

As of December 31, 2012, the Company has complied with the minimum current ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

17. MODAL SAHAM

Nama pemegang saham/Name of Shareholders	
PT Sarana Multi Infrastruktur	
Asian Development Bank	
DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH	
International Finance Corporation	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	
Jumlah/Total	

Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 7 Maret 2012 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 1.175.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya oleh Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebesar Rp 192.500.000.000 termasuk agio sebesar Rp 17.500.000.000. SMBC telah menyetor modal tersebut pada tanggal 26 Maret 2012.

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 400.000.000.000 menjadi Rp 2.000.000.000.000 dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 100.000.000.000 menjadi Rp 1.000.000.000.000 yang diambil dan disetor seluruhnya oleh para Pemegang Saham masing-masing oleh PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp 362.700.000.000, Asian Development Bank sebesar Rp 179.100.000.000, International Finance Corporation sebesar Rp 179.100.000.000 dan DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH sebesar Rp 179.100.000.000.

17. CAPITAL STOCK

31 Desember/December 31, 2012		
Jumlah saham/ Number of Shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah/ Total Rp
403.000	34,29	403.000.000.000
199.000	16,94	199.000.000.000
199.000	16,94	199.000.000.000
199.000	16,94	199.000.000.000
175.000	14,89	175.000.000.000
1.175.000	100,00	1.175.000.000.000
31 Desember/December 31, 2011		
Jumlah saham/ Number of Shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership %	Jumlah/ Total Rp
403.000	40,30	403.000.000.000
199.000	19,90	199.000.000.000
199.000	19,90	199.000.000.000
199.000	19,90	199.000.000.000
1.000.000	100,00	1.000.000.000.000

Based on Notarial Deed No. 3 dated March 7, 2012 of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notary in Jakarta, the Shareholders of the Company had agreed to increase the issued and paid-up capital from Rp 1,000,000,000,000 to Rp 1,175,000,000,000 in which all of the new shares have been subscribed to and fully paid by Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) amounting to Rp 192,500,000,000 including premium (additional paid-in capital) of Rp 17,500,000,000. SMBC has paid the capital on March 26, 2012.

Based on Notarial Deed No. 13 dated November 28, 2011 of Utiek R. Abdurachman, SH., MLI., Mkn., notary public in Jakarta, the Shareholders of the Company agreed to increase the authorized capital of the Company from Rp 400,000,000,000 to Rp 2,000,000,000,000 and the issued and paid-up capital from Rp 100,000,000,000 to Rp 1,000,000,000,000 in which all of shares have been subscribed by and issued to the Shareholders of the Company whereby PT Sarana Multi Infrastruktur has subscribed to and paid for Rp 362,700,000,000, Asian Development Bank has subscribed to and paid for Rp 179,100,000,000, International Finance Corporation has subscribed to and paid for Rp 179,100,000,000 and DEG - Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH has subscribed to and paid for Rp 179,100,000,000.

18. PENGHASILAN INVESTASI

	2012 Rp	2011 Rp
Pendapatan bunga deposito berjangka	61.592.554.062	24.245.264.779
Pendapatan bunga rekening giro	2.000.494.303	374.457.450
Jumlah pendapatan bunga aset keuangan yang tidak diklasifikasikan dalam FVTPL	63.593.048.365	24.619.722.229
Pendapatan dari unit penyertaan reksadana	983.376.528	-
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar unit penyertaan reksadana	801.045.250	-
Jumlah pendapatan aset keuangan diklasifikasikan dalam FVTPL	1.784.421.778	-
Jumlah	65.377.470.143	24.619.722.229

18. INVESTMENT INCOME

Interest revenue from time deposit	
Interest revenue from current account	
Total interest revenue on financial assets not designated at FVTPL	
Income from investment in mutual funds	
Unrealized gain on changes in fair value of mutual funds	
Total revenue on financial assets classified as FVTPL	
Total	

19. PENDAPATAN JASA ADVISORY

Pendapatan jasa *advisory* merupakan pendapatan yang berasal dari jasa *advisory* yang diberikan kepada klien Perusahaan.

19. ADVISORY FEE

Advisory fee represents income from advisory services provided by the Company to its customers.

20. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2012 Rp	2011 Rp
Gaji dan tunjangan	30.085.071.837	10.569.121.898
Jasa profesional		
- korporasi	6.172.526.182	10.712.100.358
- transaksi investasi	3.167.573.943	-
Sewa	2.062.996.693	1.712.894.424
Akomodasi dan transport	1.688.408.767	1.102.864.350
Penyusutan (Catatan 10)	1.371.993.429	1.059.322.345
Promosi dan komunikasi	1.365.996.854	-
Imbalan kerja (Catatan 23)	909.537.951	-
Asuransi	746.518.186	279.233.611
Perlengkapan kantor	500.578.164	254.044.995
Representasi	263.427.818	246.120.377
Pelatihan dan seminar	176.388.457	-
Amortisasi (Catatan 12)	37.861.368	-
Beban pra-operasi	-	5.664.323.331
Lain-lain	1.221.618.598	330.822.495
Jumlah	49.770.498.248	31.930.848.184

20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Salaries and benefits	
Professional fee	
- corporate	
- investment transaction	
Rent	
Accommodation and transport	
Depreciation (Note 10)	
Promotion and communication	
Employee benefits (Note 23)	
Insurance	
Office supplies	
Representation	
Training and seminars	
Amortization (Note 12)	
Pre-operating expenses	
Others	
Total	

21. BEBAN BUNGA

Beban bunga untuk tahun 2012 merupakan bunga atas pinjaman subordinasi yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi (Catatan 16).

Beban bunga untuk tahun 2011 merupakan bunga yang berkaitan dengan liabilitas CSL kepada SMI. Perusahaan telah melakukan pelunasan liabilitas CSL pada tahun 2011 (Catatan 24).

21. INTEREST EXPENSE

Interest expense in 2012 represents interest on subordinated loan which is measured at amortized cost (Note 16).

Interest expense in 2011 represents interest paid to SMI related to CSL. The CSL had been fully paid by the Company in 2011 (Note 24).

22. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak dibayar dimuka

Pajak dibayar dimuka tahun 2012 dan 2011 merupakan nilai bersih pajak pertambahan nilai (PPN).

b. Utang pajak

22. INCOME TAX

a. Prepaid tax

Prepaid tax in 2012 and 2011 represents net value added tax (VAT).

b. Taxes payable

	31 Desember/ December 31, 2012	31 Desember/ December 31, 2011	
	Rp	Rp	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	492.157.955	239.998.416	Article 21
Pasal 23	10.588.037	14.324.241	Article 23
Pasal 4 ayat 2	3.377.903	3.162.261	Article 4.2
Jumlah	<u>506.123.895</u>	<u>257.484.918</u>	Total

c. Pajak penghasilan

Pajak kini

Pajak penghasilan Perusahaan pada tahun 2012 dan 2011 terdiri dari manfaat pajak tangguhan dan pajak final sebagai berikut:

c. Income tax

Current tax

The Company's income tax in 2012 and 2011 represent deferred tax benefit and final tax as follows:

	31 Desember/ December 31, 2012	31 Desember/ December 31, 2011	
	Rp	Rp	
Pajak final	(12.792.149.970)	(4.923.944.446)	Final tax
Manfaat (beban) pajak tangguhan	11.862.443.269	7.544.287.557	Deferred tax benefit (expense)
Jumlah	<u>(929.706.701)</u>	<u>2.620.343.111</u>	Total

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2012 DAN 2011 - Lanjutan

P.T. INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2012 AND 2011 - Continued

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif dengan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income (loss) before tax per statements of comprehensive income and fiscal loss of the Company is as follows:

	2012 Rp	2011 Rp	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	15.256.069.371	(20.315.150.117)	Income (loss) before tax per statements of comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Akrual bonus dan tunjangan	6.638.648.383	-	Accrued bonus and allowances
Penyisihan imbalan kerja karyawan	909.537.951	-	Provision for employee benefits
Jumlah	7.548.186.334	-	Total
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Nondeductible expenses (nontaxable income) :
Pendapatan bunga	(64.576.424.893)	(24.619.722.229)	Interest income
Kenaikan belum direalisasi reksadana	(801.045.250)	-	Unrealized increase in mutual fund units
Beban bunga	741.570.160	13.024.872.174	Interest expense
Jasa profesional	-	3.946.966.796	Professional fee
Amortisasi	-	4.235.323.331	Amortization
Lain-lain	1.930.057.536	895.997.290	Others
Jumlah	(62.705.842.447)	(2.516.562.638)	Total
Rugi fiskal Perusahaan	(39.901.586.742)	(22.831.712.755)	Fiscal loss of the Company
Rugi fiskal tahun sebelumnya	(30.177.150.228)	(7.345.437.473)	Prior year's fiscal loss carryforward
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan	(70.078.736.970)	(30.177.150.228)	Accumulated fiscal loss carryforward

Aset pajak tangguhan

Deferred tax assets

Aset pajak tangguhan Perusahaan terdiri dari:

Deferred tax assets consists of the following:

	1 Januari/ January 1, 2011 Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited to statements of comprehensive income for the year Rp	31 Desember/ December 31, 2011 Rp	Dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif/ Credited to statements of comprehensive income for the year Rp	Dikreditkan ke laporan ekuitas/ Credited to equity for the year Rp	31 Desember/ December 31, 2012 Rp	
Akrual bonus dan tunjangan	-	-	-	1.659.662.096	-	1.659.662.096	Accrued bonus and allowance
Penyisihan imbalan kerja	-	-	-	227.384.487	28.226.222	255.610.709	Post employment benefits obligation
Rugi fiskal	-	7.544.287.557	7.544.287.557	9.975.396.686	-	17.519.684.243	Fiscal loss
Aset pajak tangguhan - bersih	-	7.544.287.557	7.544.287.557	11.862.443.269	28.226.222	19.434.957.048	Deferred tax asset - net

Rekonsiliasi antara beban (manfaat) pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense (benefit) and the amounts computed by applying the effective tax rates to income (loss) before tax is as follows:

	2012 Rp	2011 Rp	
Laba (rugi) sebelum pajak menurut laporan laba rugi komprehensif	15.256.069.371	(20.315.150.117)	Income (loss) before tax per statements of comprehensive income
Beban pajak (manfaat) dengan tarif pajak efektif	3.814.017.343	(5.078.787.529)	Tax expense (benefit) at effective tax rate
Pengaruh pajak atas (beban) manfaat yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:			Tax effect of nontaxable income (nondeductible expenses):
Pendapatan bunga	(16.144.106.223)	(6.154.930.557)	Interest income
Kenaikan belum direalisasi reksadana	(200.261.313)	-	Unrealized increase in mutual fund units
Beban bunga	185.392.540	3.256.218.044	Interest expense
Jasa profesional	-	986.741.699	Professional fee
Amortisasi	-	1.058.830.833	Amortization
Lain-lain	482.514.384	223.999.323	Others
Jumlah	(15.676.460.612)	(629.140.659)	Total
Beban pajak final	12.792.149.970	4.923.944.446	Final tax expense
Penyesuaian atas rugi fiskal tahun sebelumnya	-	(1.836.359.368)	Adjustment from prior year's fiscal loss
Jumlah (manfaat) beban pajak	929.706.701	(2.620.343.111)	Total tax (benefit) expense

Pada tanggal 31 Desember 2012 manajemen berkeyakinan bahwa pendapatan kena pajak di masa depan akan dapat dikompensasikan terhadap akumulasi rugi fiskal sebesar Rp 70.078.736.970 yang terdiri dari:

As of December 31, 2012, management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses amounting to Rp 70,078,736,970 which consists of:

	Jumlah/Amount Rp	Kadaluarsa/Expiry Tahun/Year
Tahun 2010	7.345.437.473	2015 Year 2010
Tahun 2011	22.831.712.755	2016 Year 2011
Tahun 2012	39.901.586.742	2017 Year 2012
Jumlah	70.078.736.970	Total

23. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Pada tahun 2012, Perusahaan memiliki jumlah karyawan tetap sebanyak 31 orang.

23. POST-EMPLOYMENT BENEFITS OBLIGATION

The Company recognizes post-employment benefits obligation based on Labor Law No. 13/2003. In 2012, the Company had total 31 permanent employees.

Beban liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dilaporan laba rugi komprehensif pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statements of comprehensive income in respect of the post-employment benefits are as follows:

	2012 Rp	
Beban jasa servis	898.462.991	Current service cost
Beban bunga	11.074.960	Interest cost
Jumlah	<u>909.537.951</u>	Total

Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statements of financial position arising from the Company's obligation in respect of this post-employment benefit are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2012 Rp	
Nilai kini kew ajiban yang tidak didanai	1.022.442.839	Present value of unfunded obligation
Kerugian aktuarial yang belum diakui	-	Unrecognized actuarial losses
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	Unrecognized past service cost
Liabilitas bersih	<u>1.022.442.839</u>	Net liability

Mutasi liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah:

Movements in the net liability recognized in the statements of financial position are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2012 Rp	
Saldo aw al	-	Beginning of the year
Beban tahun berjalan	909.537.951	Expense current year
Kerugian aktuarial	112.904.888	Actuarial loss
Saldo akhir	<u>1.022.442.839</u>	End of the year

Beban liabilitas imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaria independen PT Padma Radya Aktuaria. Perhitungan aktuarial dilakukan dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, PT Padma Radya Aktuaria. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	31 Desember/December 31, 2012	
Tingkat diskonto	6,00%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	6,00%	Salary increase rate
Tingkat kematian	100% TMI2	Mortality rate
Tingkat Cacat	5% TMI3	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	1% per tahun hingga usia 35 tahun dan menurun secara linier sampai dengan 0% pada usia 55/ 1% per annum until age 35 years old and decreased linearly to 0% at age 55	Resignation rate
Tingkat pensiun normal	100% pada usia pensiun normal/ 100% at normal retirement age	Normal retirement rate
Umur pensiun dini	N/A	Early retirement age
Umur pensiun normal	55 tahun/ years old	Normal retirement age

24. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

Pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) adalah pemegang saham mayoritas yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).
- Asian Development Bank (ADB).
- International Financial Corporation (IFC).
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).
- Seluruh entitas yang dimiliki dan dikendalikan Pemerintah Republik Indonesia merupakan pihak berelasi.

Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

Tahun 2012:

- a. Transaksi peningkatan modal disetor yang dilakukan oleh SMBC (Catatan 17).
- b. Pada tanggal 28 November 2012 dan 14 Desember 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi ADB dan World Bank tertanggal 20 April 2011 (Catatan 26).
- c. Pada bulan Desember 2012, Perusahaan melakukan penarikan pinjaman subordinasi dari SMI sejumlah USD 81.134.021 yang berasal dari penerusan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) dan World Bank (WB) masing-masing sebesar USD 71.134.021 dan USD 10.000.000 (Catatan 16).
- d. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran beban komitmen kepada SMI.
- e. Perusahaan menempatkan deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk dan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
- f. Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana disajikan dalam Catatan 13.

24. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

The Company's shareholders are:

- PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) is the Company's majority shareholder which is owned by the Government of the Republic Indonesia.
- Deutsche Investitions – und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).
- Asian Development Bank (ADB).
- International Financial Corporation (IFC).
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).
- All entities owned or controlled by the Government of the Republic Indonesia are considered as related parties.

Transactions with Related Parties

The Company entered into certain transactions with related parties as follows:

Year 2012:

- a. Additional paid up capital which was paid by SMBC (Note 17).
- b. On November 28, 2012 and December 14, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement – ADB and World Bank dated April 20, 2011, respectively (Note 26).
- c. On December 2012, the Company has drawn subordinated loan from SMI totaling USD 81,134,021 which initially from step loans of Asian Development Bank (ADB) and World Bank (WB) amounting to USD 71,134,021 and USD 10,000,000, respectively (Note 16).
- d. The Company has liability to pay commitment fee to SMI.
- e. The Company placed time deposit at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk and PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.
- f. The Company performs transaction with related party as disclosed on Note 13.

Tahun 2011:

- a. Transaksi peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang seluruhnya diambil dan disetor oleh Para Pemegang Saham (Catatan 17).
- b. Perusahaan menempatkan deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- c. Perusahaan memperoleh dana *Convertible Subordinated Loan* (CSL) dari SMI sebesar Rp 559.700.000.000. Pada 26 April 2011, Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan perjanjian CSL tersebut (Catatan 26).
- d. Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi WB yang efektif pada 25 April 2011 (Catatan 26).
- e. Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi ADB yang efektif pada 25 April 2011 (Catatan 26).
- f. Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran beban komitmen dan transaksi dibayar dimuka kepada SMI.
- g. Biaya legal penyusunan SLA, Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham, dan lainnya yang diganti Perusahaan terhadap pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Year 2011:

- a. Capital issued and paid-up which have been subscribed by and issued to the Shareholders of the Company (Note 17).
- b. Company placed time deposits with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- c. The Company obtained *Convertible Subordinated Loan* (CSL) fund from SMI amounting to Rp 559,700,000,000. On April 26, 2011, the Company has returned the entire amount related to the CSL agreement (Note 26).
- d. On April 20, 2011, the Company and SMI entered into a Subordinated Loan Agreement (SLA) - WB which is effective on April 25, 2011 (Note 26).
- e. On April 20, 2011, the Company and SMI entered into a Subordinated Loan Agreement (SLA) - ADB which is effective on April 25, 2011 (Note 26).
- f. The Company has liability to pay commitment fee and upfront fee to SMI.
- g. The Company reimbursed legal fee to related parties for the preparation of SLA, Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement, and other charges as follows:

	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i> dalam ribuan Rupiah/ <i>in thousand Rupiah</i>				
	DEG	SMI	ADB	IFC	Total
<i>Penyedia Jasa/Service Providers</i>					
Clifford Chance	44.719	44.719	44.719	44.719	178.876
Mochtar, Karuw in & Komar	70.794	70.794	70.794	70.794	283.176
Hermaw an Prasetyo & Juniarto	-	281.600	-	-	281.600
Soemadipradja & Taher	105.011	105.011	105.011	105.011	420.044
Lain-lain/ <i>Others</i>	29.458	-	-	-	29.458
Jumlah/ <i>Total</i>	249.982	502.124	220.524	220.524	1.193.154

25. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

	2012	
	Dolar AS (jumlah penuh)/ U.S. Dollar (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Kas dan setara kas	81.209.634	785.297.165.423
Piutang usaha	22.000	212.740.000
Jumlah aset moneter	81.231.634	785.509.905.423
Liabilitas moneter		
Beban yang masih harus dibayar	380.116	3.675.721.720
Pinjaman subordinasi	81.134.021	784.565.983.070
Utang lain-lain	68	657.560
Jumlah liabilitas moneter	81.514.205	788.242.362.350
Liabilitas moneter - bersih	282.571	2.732.456.927

	2011	
	Dolar AS (jumlah penuh)/ U.S. Dollar (full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Aset moneter		
Kas dan setara kas	6.354	57.621.971
Liabilitas moneter		
Beban yang masih harus dibayar	55.908	506.970.721
Liabilitas moneter - bersih	49.554	449.348.750

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, kurs konversi 1 Dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan Perusahaan serta kurs yang berlaku pada tanggal 6 Maret 2013 masing-masing sebesar Rp 9.670, Rp 9.068 dan Rp 9.686.

25. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2012 and 2011, monetary assets and liabilities in foreign currencies are as follows:

Monetary assets
Cash and cash equivalents
Accounts receivable
Total monetary assets
Monetary liabilities
Accrued expenses
Subordinated loan
Other payables
Total monetary liabilities
Net monetary liabilities

The conversion rate of US Dollar 1 based on Bank Indonesia's middle rates used by the Company on December 31, 2012 and 2011 and the prevailing rates on March 6, 2013 amounted to Rp 9,670, Rp 9,068 and Rp 9,686, respectively.

26. IKHTISAR PERJANJIAN SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Pinjaman Subordinasi - Bank Dunia

Pada tanggal 20 April 2011, Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi Bank Dunia dan kemudian pada 25 April 2011 Bank Dunia telah mengeluarkan surat No. CD-185/IIF/IV/2011 yang menyatakan pemenuhan kondisi preseden berlakunya Perjanjian Pinjaman tanggal 15 Januari 2010 antara Republik Indonesia dan Bank Dunia sebesar USD 100.000.000. Selain itu, Bank Dunia menyatakan perjanjian pinjaman menjadi efektif 25 April 2011.

26. SUMMARY OF SIGNIFICANT AGREEMENTS

a. Subordinated Loan Agreement - The World Bank

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed The World Bank - Subordinated Loan Agreement and subsequently, on April 25, 2011 World Bank has issued letter No. CD-185/IIF/IV/2011 confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 15, 2010 between the Republic of Indonesia and the World Bank in the amount of USD 100,000,000. Furthermore, World Bank declares the Loan Agreement becomes effective as of April 25, 2011.

Pada tanggal 14 Desember 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya di antaranya perubahan suku bunga pinjaman, perubahan tanggal pembayaran pokok dan bunga dan ketentuan *Current Ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy requirement*) sebesar 12%.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan International Bank For Reconstruction And Development (Grup WB) dan SMI.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari WB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

b. Perjanjian Pinjaman Subordinasi - ADB

Pada tanggal 20 April 2011 Perusahaan dan SMI telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Subordinasi – ADB dan kemudian pada tanggal 25 April 2011, ADB telah mengeluarkan surat yang menyatakan pemenuhan persyaratan berlakunya perjanjian pinjaman tanggal 20 Januari 2010 antara Republik Indonesia dan ADB sebesar USD 100.000.000. Selain itu, ADB menyatakan bahwa semua kondisi untuk efektivitas pinjaman telah dipenuhi dan menyatakan pinjaman efektif pada tanggal 25 April 2011.

Pada tanggal 28 November 2012, Perusahaan dan SMI menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Subordinasi tertanggal 20 April 2011, yang mengubah beberapa pasal dalam perjanjian sebelumnya di antaranya perubahan suku bunga pinjaman dan ketentuan *Current Ratio* sebesar 1,2 dan persyaratan kecukupan modal (*capital adequacy requirement*) sebesar 12%.

Berkaitan dengan perjanjian ini, Perusahaan mengikatkan diri dalam Perjanjian Proyek dengan ADB dan SMI.

On December 14, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan, changes in the date of principal and interest payments, and requirements of Current Ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

In relation to this agreement, the Company had entered into Project Agreement with International Bank For Reconstruction And Development (WB Company) and SMI.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from WB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through his Letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

b. Subordinated Loan Agreement - ADB

On April 20, 2011, the Company and SMI had signed ADB-Subordinated Loan Agreement and subsequently on April 25, 2011, ADB had issued letter confirming the fulfillment of the conditions precedent to effectiveness of the Loan Agreement dated January 20, 2010 between the Republic of Indonesia and ADB in the amount of USD 100,000,000. Furthermore, ADB declared that all conditions to the effectiveness of the loan had been met and declare that the loan was effective as of April 25, 2011.

On November 28, 2012, the Company and SMI had signed the Amendment Agreement to Subordinated Loan Agreement dated April 20, 2011, which revised several articles in the previous agreement, amongst others, the change in the interest rate of the loan and requirements of Current Ratio of 1.2 and capital adequacy ratio of 12%.

In relation to this agreement, the Company has entered into Project Agreement with ADB and SMI.

Dalam Perjanjian Proyek, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan berikut, di antaranya:

1. Untuk menjalankan aktivitas pembiayaannya dengan *due diligence* dan efisien serta melakukan praktek administrasi, keuangan, teknik dan lingkungan yang baik.
2. Praktek pengadaan yang sesuai dengan Penuntun Pengadaan ADB.
3. Rencana, spesifikasi, jadwal, metode konstruksi yang sesuai dengan praktek terbaik internasional.
4. Meyakinkan bahwa tujuan dari pinjaman akan tercapai.

Pada tanggal 29 Maret 2012, Perusahaan menyampaikan surat kepada SMI perihal penyesuaian mata uang dan struktur bunga dalam penerusan pinjaman dari ADB.

Pada tanggal 3 Oktober 2012, Menteri Keuangan melalui surat No. S-729/MK.05/2012 yang ditujukan kepada SMI telah menyampaikan persetujuan perihal perubahan mata uang dan struktur suku bunga.

Berdasarkan Akta No. 7 tanggal 13 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, Notaris di Jakarta, para Pemegang Saham secara bulat menyetujui Perusahaan untuk menandatangani bersama SMI, Perjanjian Perubahan terhadap masing-masing Perjanjian Pinjaman Subordinasi dengan ADB dan WB yang berlaku efektif tanggal 30 Nopember 2012.

c. Polis Asuransi

Perusahaan telah memperoleh polis asuransi jenis *Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk* termasuk Gempa Bumi dan *Directors and Officers Liability* yang mencakup periode sampai 30 April 2013.

d. Perjanjian Para Pendiri

Pada tanggal 30 Juni 2009, seluruh pemegang saham pendiri Perusahaan melakukan perjanjian mengenai pendirian Perusahaan.

- a. Para pemegang saham pendiri bermaksud mendirikan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur berbadan hukum perseroan terbatas sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia.

In the Project Agreement, the Company must fulfill the following requirements, amongst others:

1. Carry out its financing activities with due diligence and efficiency, in accordance with sound administrative, financial, engineering and enviromental practices.
2. The procurement is in accordance with ADB's Procurement Guidelines.
3. In accordance with plans, specifications, work schedules and construction methods that meet international best practice.
4. Ensure that the purposes of the loan will be accomplished.

On March 29, 2012, the Company has submitted a letter to SMI regarding adjustment on currency and interest structure for on-lending from ADB.

On October 3, 2012, the Minister of Finance through his Letter No. S-729/MK.05/2012 to SMI has approved the adjustment on currency and interest structure.

Based on Deed No. 7 dated December 13, 2012, drawn up before Utiek R. Abdurachman, S.H., MLI, Mkn, Notary in Jakarta, the Shareholders unanimously approved the Company together with SMI to execute the Amendment of each ADB and WB Subordinated Loan Agreements, respectively, effective on November 30, 2012.

c. Insurance Policy

The Company has acquired insurance policy for Bankers Blanket Bond, Comprehensive General Liability, Property All Risk including Earthquake and Director and Officer Liability covering the period until April 30, 2013.

d. The Founders Agreement

As at June 30, 2009, all of the Company's founding shareholders entered into an agreement related to the Company's establishment.

1. The founding shareholders wished to establish the Company as an infrastructure finance company in the form of a limited liability company under the laws of the Republic of Indonesia.

b. Para pemegang saham pendiri bermaksud bahwa Perusahaan mempunyai modal dasar sebesar Rp 400.000.000.000 dengan modal awal yang ditempatkan sebesar Rp 100.000.000.000 dengan pemegang saham sebagaimana dijelaskan pada Catatan 17 yang disebut sebagai penyertaan awal.

e. Perjanjian Para Pemegang Saham Awal

Perusahaan bersama-sama dengan para pemegang saham pendiri melakukan perjanjian ini pada 15 Januari 2010.

Para Pemegang Saham Pendiri bermaksud bahwa:

1. SMI melakukan investasi dalam Perusahaan untuk sejumlah Rp 600.000.000.000 (jumlah mana termasuk penyeteran bagian awal SMI). Sebagai bagian dari komitmen SMI di atas, pada tanggal pengambilan bagian, SMI akan memberikan suatu pinjaman subordinasi yang dapat dikonversi kepada Perusahaan dalam jumlah Rp 559.700.000.000.
2. Setelah pengambilan bagian awal, (i) ADB dan IFC berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awal mereka masing-masing akan berjumlah, dalam hal IFC sampai dengan US\$ 40.000.000 dan dalam hal ADB, sampai dengan US\$ 40.000.000 dan (ii) DEG bermaksud untuk melakukan pengambilan bagian tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan dari *Founders Agreement* dan perjanjian ini, yang jumlahnya bersama dengan pengambilan bagian awalnya, akan berjumlah sampai dengan US\$ 20.000.000.

Para pemegang saham pendiri bermaksud agar para investor swasta dapat mengambil bagian dan/atau membeli saham antara tanggal perjanjian ini dan ulang tahun kelima perjanjian ini sampai dengan batas empat puluh lima persen (45%) dari jumlah seluruh modal saham yang dikeluarkan Perusahaan, dengan ketentuan bahwa batas tersebut tidak berlaku setelah Penawaran Saham Perdana.

2. It is the founding shareholders' intention that the Company shall have an authorized share capital of Rp 400,000,000,000, and an initial issued share capital of Rp 100,000,000,000 with the shareholders as described in Note 17, known as initial subscription.

e. The Original Shareholders Agreement

The Company, together with the founding shareholders, entered into this agreement on January 15, 2010.

The Founding Shareholders' intention is that:

1. SMI made an investment in the Company of IDR 600,000,000,000 (such amount include SMI's initial subscription). As part of the above SMI commitment, SMI will, on the Subscription Date, extend a convertible subordinate loan to the Company in an amount of IDR 559,700,000,000 pursuant to the SMI Convertible Subordinated Loan Agreement.
2. Subsequent to the initial subscription, (i) ADB and IFC committed to make additional subscription in accordance with the terms and conditions of the founders' agreement and this agreement, which together with their respective initial subscriptions would amount, in the case of IFC, to up to US\$ 40,000,000 and in the case of ADB, to up to US\$ 40,000,000 and (ii) DEG intends to make additional subscriptions in accordance with the term and conditions of the Founders Agreement and this agreement, which together with this initial subscription, would amount to up to US\$ 20,000,000.

It is the founder shareholders' intention that private sector investors may subscribe for and/or acquire shares between the date of this agreement and the fifth anniversary of this agreement up to a limit of forty-five percent (45%) of the total issued share capital of the Company, provided that such limits shall not apply following an Initial Public Offering.

Para Pemegang Saham mengetahui bahwa Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 Tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ("Peraturan Menkeu") mensyaratkan, sehubungan dengan Perusahaan yang akan didirikan berdasarkan Peraturan Menkeu tersebut ("Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur"), (i) modal disetor untuk pendirian Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur sedikitnya Rp 100.000.000.000 dan (ii) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur wajib meningkatkan modal disetornya sedikitnya Rp 2.000.000.000.000 dalam waktu 5 tahun sejak dikeluarkannya surat izin usaha, kecuali jika peningkatan tersebut tidak dapat dipenuhi karena kondisi pasar dan karenanya perusahaan pembiayaan infrastruktur tersebut harus mengubah rencana peningkatan modal disetor dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk menghindari ketidakpastian pada Perjanjian Para Pendiri atau Perjanjian ini:

1. DEG tidak memiliki janji atau komitmen untuk mengambil bagian atau membayar melebihi penyertaan awalnya (sebagaimana didefinisikan dalam *Founders Agreement*) (mengacu pada Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua) ; dan
2. Setiap investor supranasional memiliki hak dengan pertimbangannya sendiri untuk memberikan suara setuju atau tidak setuju atas setiap pengeluaran saham baru pada setiap rapat umum sehubungan dengan pengeluaran saham baru tersebut.

f. Perjanjian Convertible Subordinate Loan (CSL)

Perusahaan bersama-sama dengan para pemegang saham melakukan perjanjian ini pada 15 Januari 2010.

Dalam perjanjian ini, SMI setuju untuk menempatkan CSL pada Perusahaan sebesar Rp 559.700.000.000 Perusahaan telah menerima dana tersebut pada tanggal 22 April 2010. Pada 26 April 2011, Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan perjanjian CSL kepada SMI.

The Shareholders acknowledge that article 11 of Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 Regarding Infrastructure Finance Company (the "MOF regulation") requires, with respect to a company to be established thereunder (an "Infrastructure Finance Company"), (i) the paid-up capital for the establishment of such Infrastructure Finance Company to be at least Rp 100,000,000,000 and (ii) the Infrastructure Finance Company to increase its paid-up capital to become at least IDR 2,000,000,000,000 within 5 years as of the issuance of its business license, unless such increase cannot be complied due to market condition, in which case the infrastructure finance company should revise its plan for the increase of paid-up capital with the approval of the Minister of Finance.

For the avoidance of doubt, notwithstanding any other provisions of the Founders' Agreement or this agreement:

1. DEG does not have any undertaking or commitment to subscribe and pay more than its initial subscription price (as defined in the Founders Agreement) (refer to Second Amendment of The Shareholders Agreement) ; and
2. Each supranational investor has the right in its sole discretion to vote in favour of, or against, any issuance of new securities at any general meeting in connection with such issuance of new securities.

f. Convertible Subordinate Loan Agreement (CSL)

The Company, together with the shareholders entered into this agreement on January 15, 2010.

This agreement states that SMI agrees to extend a CSL to the Company amounting to Rp 559,700,000,000. The Company received the CSL fund on April 22, 2010. On April 26, 2011, the Company has returned the entire amount related to CSL agreement to SMI.

g. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham

Pada tanggal 20 April 2011, Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ("CROS") tentang Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham tanggal 15 Januari 2010. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham.

Perubahan dan Pernyataan Kembali mengakibatkan dihilangkannya sebuah artikel tentang CSL. Perusahaan telah mengembalikan seluruh dana yang terkait dengan CSL yang sejumlah Rp 559.700.000.000 dalam periode 25 April 2011 sampai 26 April 2011.

Perubahan dan Pernyataan Kembali juga mengakibatkan pengesampingan permanen terhadap Opsi Put. Perubahan dan Pernyataan Kembali menyatakan bahwa dengan efek dari awal dalam waktu satu (1) tahun setelah Tanggal Efektif Amandemen Pertama dan tanggal dimana Investor Supranasional menjadi pemegang saham Perusahaan, Investor Supranasional akan melepaskan hak-hak mereka secara permanen untuk selama Perjanjian ini berlaku untuk melaksanakan Opsi Put berdasarkan Perjanjian ini. Sehingga tidak akan ada hak lebih untuk Put dipertahankan oleh Investor Supranasional satu tahun setelah tanggal 20 April 2011.

h. Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua

Pada tanggal 16 Nopember 2011, para Pemegang Saham Perusahaan menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua. Selanjutnya pada tanggal yang sama, Perusahaan telah menandatangani Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua.

Perubahan Perjanjian Pemegang Saham Kedua mengakibatkan DEG untuk berkomitmen untuk melakukan pengambilan bagian dalam saham Perusahaan yang bersama-sama dengan penyertaan awal yang disetor menjadi sebesar Rp 200.000.000.000.

g. Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On April 20, 2011, the Shareholders of the Company signed the Circular Resolutions of Shareholders ("CROS") regarding the Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement dated January 15, 2010. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended and Restated Shareholders Agreement.

The amendment and restatement resulted to the omission of an article regarding CSL. The Company has returned to SMI the entire amount related to CSL totaling Rp 559,700,000,000 during the period of April 25, 2011 to April 26, 2011.

The amendment and restatement also resulted in Permanent Waiver of the Put Option. The amendment and restatement stated that with effect from the earlier of the date falling one (1) year after the First Amendment Effective Date and the date on which a Private Sector Investor becomes a shareholder of the Company, the Supranational Investors shall waive their rights, on a permanent basis for so long as this Agreement is in effect, to exercise the Put Option under this Agreement. So that there will be no more right for Put retained by the Supranational Investor one year after April 20, 2011.

h. Second Amendment of The Shareholders Agreement

On November 16, 2011, the Shareholders of the Company signed the Second Amendment of The Shareholders Agreement. Subsequently, on the same date, the Company has signed the Amended Shareholders Agreement.

The Second Amendment of The Shareholders Agreement resulted to the commitment of DEG to make additional subscription of the Company's share, which together with its initial subscription, would amount to Rp 200,000,000,000.

i. Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pemegang Saham Ketiga

Pada tanggal 19 Maret 2012, Pemegang Saham Pendiri Perusahaan menandatangani Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali Ketiga ("Perjanjian Perubahan Ketiga") terhadap Perjanjian Pemegang Saham Awal tanggal 15 Januari 2010, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 25 April 2011 dan sebagaimana diubah pada tanggal 16 Nopember 2011.

Perjanjian Ketiga ini memutuskan hal-hal berikut:

- mengubah dan menyatakan kembali Perjanjian Pemegang Saham Awal,
- menyatakan bahwa Perjanjian Para Pendiri diakhiri.

j. Perjanjian Pemesanan Saham

Pada tanggal 19 Maret 2012, Perusahaan dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) menandatangani Perjanjian Pemesanan Saham dimana SMBC sebagai pemesan saham telah setuju untuk mengambil bagian sebanyak 175.000 lembar atau mewakili 14,89% dari saham Perusahaan, mewakili dengan harga sebesar Rp 192.500.000.000 termasuk agio saham sebesar Rp 17.500.000.000. SMBC telah menyetorkan pemesanan saham tersebut pada tanggal 26 Maret 2012.

k. Akte Penundukkan

Pada tanggal 26 Maret 2012, Perusahaan dan SMBC menandatangani Akte Penundukkan dimana SMBC sebagai pemegang saham yang baru berjanji kepada Perusahaan sebagai *trustee* untuk pihak-pihak lain yang pada saat ini atau yang setelah ini menjadi terikat pada Perjanjian Pemegang Saham dan kepada Perusahaan sendiri untuk menundukkan diri dan terikat terhadap semua tugas, beban dan kewajiban para Pemegang Saham berdasarkan ketentuan Perjanjian Pemegang Saham.

i. Third Amendment and Restatement of The Shareholders Agreement

On March 19, 2012, the Founding Shareholders of the Company signed the Third Amendment and Restatement of the Shareholders Agreement (the "Third Amendment Agreement") to the Original Shareholders Agreement dated January 15, 2010, as amended and restated on April 25, 2011 and November 16, 2011.

The Third Amendment Agreement resulted the following decisions:

- amended and restated the Original Shareholders Agreement,
- stated that the Founders Agreement shall be terminated.

j. Share Subscription Agreement

On March 19, 2012, the Company and Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) signed Share Subscription Agreement where SMBC as the share subscriber has agreed to subscribe 175,000 shares, representing 14.89% of the total issued shares of the Company at the price of Rp 192,500,000,000 included additional paid-up capital of Rp 17,500,000,000. SMBC has fully paid the shares subscription on March 26, 2012.

k. Deed of Adherence

On March 26, 2012, the Company and SMBC signed Deed of Adherence where SMBC as the new shareholder covenants to the Company as trustee for all other persons who are at present or who may hereafter become bound by the Shareholders Agreement, and to the Company itself to adhere to and be bound by all the duties, burdens and obligations of a Shareholder imposed pursuant to the provisions of the Shareholders Agreement.

27. REKONSILIASI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS)

Perusahaan telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan Perusahaan per 31 Desember 2012 dari Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ke IFRS. Tidak terdapat perbedaan antara laporan keuangan Perusahaan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dibandingkan dengan kriteria pengakuan dan pengukuran berdasarkan IFRS.

27. INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD (IFRS) RECONCILIATION

The Company reconciled the financial statements as of December 31, 2012 from Indonesian Financial Accounting Standard to IFRS. There were no differences between the Company's financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards compared with the recognition and measurement criteria of IFRS.

28. REKLASIFIKASI AKUN

Di tahun 2012, Perusahaan mereklasifikasi sejumlah akun dalam laporan keuangan tahun 2011 untuk menyesuaikan dengan penyajian laporan keuangan tahun 2012, sebagai berikut:

	Setelah reklasifikasi/ <i>After</i> <i>reclassification</i> Rp	Sebelum reklasifikasi/ <i>Before</i> <i>reclassification</i> Rp
Penghasilan investasi	24.619.722.229	19.695.777.783
Manfaat pajak	2.620.343.111	7.544.287.557

Reklasifikasi diatas dilakukan sesuai dengan penerapan PSAK 46 (revisi 2010), Pajak Penghasilan, yang mensyaratkan beban (penghasilan) pajak terkait dengan laba rugi dari aktivitas normal disajikan tersendiri dalam laporan laba rugi komprehensif.

28. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

In 2012, the Company reclassified certain accounts in 2011 financial statements to conform with presentation of the 2012 financial statements, as follows:

	Investment income
	Tax benefit

These reclassifications in accordance with adoption of PSAK 46 (revised 2010), Income Tax, that requires tax expense (benefit) from profit or loss from normal activities are presented separately in the statement of comprehensive income.

29. KATEGORI DAN KELAS INSTRUMEN KEUANGAN

29. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS

31 Desember/ December 31, 2012				
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loan and receivables</i> Rp	Aset pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Assets at fair value through profit and loss</i> Rp	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized costs</i> Rp	Jumlah/ <i>Total</i> Rp
<u>Aset keuangan</u>				<u>Financial assets</u>
Kas dan setara kas	1.783.281.186.137	-	-	1.783.281.186.137
Unit penyertaan reksadana	-	152.486.732.750	-	152.486.732.750
Piutang usaha	644.647.850	-	-	644.647.850
Piutang lain-lain	2.387.987.013	-	-	2.387.987.013
<u>Liabilitas keuangan</u>				<u>Financial liabilities</u>
Utang lain-lain	-	-	(1.672.882.680)	(1.672.882.680)
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	(10.895.953.145)	(10.895.953.145)
Pinjaman subordinasi	-	-	(777.616.242.268)	(777.616.242.268)
Jumlah	1.786.313.821.000	152.486.732.750	(790.185.078.093)	1.148.615.475.657

31 Desember/ December 31, 2011					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loan and receivables</i>	Aset pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Assets at fair value through profit and loss</i>	Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Liabilities at amortized costs</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
<u>Aset keuangan</u>					<u>Financial assets</u>
Kas dan setara kas	948.276.379.452	-	-	948.276.379.452	Cash and cash equivalents
Piutang lain-lain	3.101.483.673	-	-	3.101.483.673	Other receivables
<u>Liabilitas keuangan</u>					<u>Financial liabilities</u>
Utang lain-lain	-	-	(279.067.754)	(279.067.754)	Other payables
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	-	-	(2.947.189.377)	(2.947.189.377)	Accrued expenses and other liabilities
Jumlah	951.377.863.125	-	(3.226.257.131)	948.151.605.994	Total

30. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO
KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

a. Manajemen Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan usaha. Struktur modal Perusahaan yang dicatat dalam ekuitas pemegang saham terdiri dari modal yang ditempatkan dan disetor (Catatan 17), agio saham, rugi komprehensif lain dan akumulasi kerugian. Sebagian besar modal Perusahaan saat ini masih ditempatkan dalam bentuk kas dan setara kas (Catatan 5) dan unit penyertaan reksadana (Catatan 6).

b. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko mata uang asing, tingkat bunga, kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Dewan Komisaris.

i. Manajemen risiko mata uang asing

Perusahaan terekspos terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar mata uang asing terutama dikarenakan transaksi yang didenominasi dalam mata uang asing atas pendapatan dan beban usahanya.

30. FINANCIAL INSTRUMENTS, FINANCIAL RISK AND
CAPITAL RISK MANAGEMENT

a. Capital Risk Management

The Company manages capital risk to ensure that it will be able to continue as going concern. The Company's capital structure recorded as shareholders' equity consists of capital stock (Note 17), additional paid-in capital, other comprehensive loss and deficit. The capital of the Company is mainly placed in form of cash and cash equivalents (Note 5) and investment in mutual funds (Note 6).

b. Financial risk management objectives and policies

The Company's overall financial risk management and policies seek to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of its business, while managing its exposure to foreign exchange risk, interest rate risk, credit and liquidity risks. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Board of Commissioner.

i. Foreign currency risk management

The Company is exposed to the effect of foreign currency exchange rate fluctuation mainly because of foreign currency denominated transactions of its revenues and operating expenses.

Perusahaan mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan menjaga, sebisa mungkin, keseimbangan komposisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Perusahaan pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 25.

Tabel berikut merinci sensitivitas Perusahaan terhadap peningkatan dan penurunan 5% dalam Rp terhadap mata uang asing yang relevan. 5% adalah tingkat sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing yang dianggap signifikan oleh manajemen. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya pada akhir periode untuk perubahan 5% dalam nilai tukar mata uang asing. Analisis sensitivitas meliputi pinjaman eksternal dalam Perusahaan dimana denominasi pinjaman adalah dalam mata uang selain mata uang fungsional. Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba dimana Rp menguat 5% terhadap mata uang yang relevan. Untuk pelemahan 5% dari Rp terhadap mata uang yang relevan, akan ada dampak yang dapat dibandingkan pada laba tahun 2012, dan saldo di bawah ini akan menjadi negatif.

The Company manages the foreign currency exposure by maintaining, as far as possible, balance in the composition of financial assets and liabilities in foreign currency. The Company's net open foreign currency exposure as of reporting date is disclosed in Note 25.

The following table details the Company's sensitivity to a 5% increase and decrease in the Rp against the relevant foreign currencies. 5% is considered as the significant sensitivity rate by management when assessing the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation at the period end for a 5% change in foreign currency rates. The sensitivity analysis includes external loans within the Company where the denomination of the loan is in a currency other than the functional currency. A positive number below indicates an increase in profit where the Rp strengthens 5% against the relevant currency. For a 5% weakening of the Rp against the relevant currency, there would be a comparable impact on the 2012 profit, and the balances below would be negative.

	Rp	
Laba rugi setelah pajak	102.467.309	Profit or loss after tax
ii. Manajemen risiko tingkat bunga		ii. Interest rate risk management
Perusahaan juga terekspos terhadap dampak perubahan tingkat bunga terutama karena adanya dampak perubahan terhadap pinjaman yang mempunyai tingkat bunga mengambang.		The Company is also exposed to changes in interest rates mainly due to the impact such changes may have on borrowings that carry floating interest rate.
Untuk mengelola risiko tingkat bunga, Perusahaan memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan yang akan memberikan campuran yang sesuai tingkat suku bunga mengambang dan tingkat bunga tetap.		To manage the interest rate risk, the Company has a policy of obtaining financing that would provide an appropriate mix of floating and fixed interest rates.
Saat ini eksposur Perusahaan atas tingkat bunga terbatas karena pinjaman subordinasi dikarenakan suku bunga mengambang.		The Company's exposure to interest rates is limited as the subordinated loan has a floating interest rate.

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk instrumen keuangan pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 50 basis poin dianggap signifikan dalam penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 50 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, laba untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2012 akan turun/naik sebesar Rp 139.942.377 setelah pajak. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Perusahaan terhadap suku bunga atas pinjaman dengan suku bunga variabel.

iii. Manajemen risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.

Saat ini risiko kredit Perusahaan terutama melekat pada penempatan pada rekening bank dan unit penyertaan reksadana. Perusahaan memiliki kebijakan yang ketat untuk menempatkan saldo bank hanya pada institusi keuangan yang memiliki peringkat yang layak serta terpercaya.

Untuk aktivitas investasi atas kelebihan dana (*idle funds*) yang tersedia, Perusahaan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan konservatif dimana Perusahaan hanya melakukan penempatan pada aset dengan *underlying investment* yang mendapatkan rating kredit yang layak serta membatasi periode maksimum satu tahun.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

	2012	
	Rp	
Kas dan setara kas	1.783.281.186.137	Cash and cash equivalents
Unit penyertaan reksadana	152.486.732.750	Investment in mutual fund units
Piutang usaha	644.647.850	Accounts receivable
Piutang lain-lain	2.387.987.013	Other receivables
Jumlah	<u>1.938.800.553.750</u>	Total

The sensitivity analyses below have been determined based on the exposure to interest rates for financial instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. A 50 basis point increase or decrease is considered significant in the management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

If interest rates had been 50 basis points higher/lower and all other variables were held constant, profit for the year ended December 31, 2012 would decrease/increase by Rp 139,942,377 after tax. This is mainly attributable to the Company's exposure to interest rates on its variable rate borrowings.

iii. Credit risk management

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company.

Currently, the Company's credit risk is primarily attributed to placement of its cash in banks and investment in mutual funds. The Company has a strict policy to place its bank balances only to the trustworthy financial institution with sufficient credit rating.

For its investment activity on excess idle funds, the Company always implements prudent and conservative principles where the Company only invests its funds on assets with underlying investment that has sufficient credit rating and limit the investment period of maximum one-year.

The carrying amount of financial assets recorded in the financial statements, net of any allowance for losses represents the Company's exposure to credit risk.

iv. Manajemen risiko likuiditas

Resiko likuiditas terutama dari pendanaan umum operasi Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan, fasilitas pinjaman dan dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan. Perusahaan juga melakukan monitor secara berkala posisi likuiditas terhadap limit maksimal.

Perusahaan memelihara kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan modal kerja yang berkelanjutan.

iv. Liquidity risk management

Liquidity risk arises from general funding of the Company's operations. The Company manages liquidity risk by maintaining adequate reserves, borrowing facilities and by continuously monitoring forecast and actual cash flows and matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. The Company also monitors the liquidity position against maximum limit.

The Company maintains sufficient funds to finance its ongoing working capital requirements.

31 Desember/ December 31, 2012					
	Dalam satu tahun/ Within one year	Lebih dari satu tahun tetapi tidak lebih dari tiga tahun/ Over one year but not longer than three years	Lebih dari tiga tahun tetapi tidak lebih dari lima tahun/ Over three years but not longer five years	Lebih dari lima tahun/ Over five years	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset keuangan					Financial assets
Kas dan setara kas	1.783.281.186.137	-	-	-	1.783.281.186.137
Unit penyertaan reksadana	152.486.732.750	-	-	-	152.486.732.750
Piutang usaha	644.647.850	-	-	-	644.647.850
Piutang lain-lain	2.387.987.013	-	-	-	2.387.987.013
Jumlah	1.938.800.553.750	-	-	-	1.938.800.553.750
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Utang lain-lain	1.672.882.680	-	-	-	1.672.882.680
Biaya yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain	10.895.953.145	-	-	-	10.895.953.145
Pinjaman subordinasi	-	17.951.169.774	28.411.589.050	738.203.224.246	784.565.983.070
Jumlah	12.568.835.825	17.951.169.774	28.411.589.050	738.203.224.246	797.134.818.895
Bersih	1.926.231.717.925	17.951.169.774	28.411.589.050	738.203.224.246	1.141.665.734.855
					Net

c. Nilai wajar instrumen keuangan

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik yang jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang dibawa berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Secara khusus, asumsi signifikan yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan ditetapkan di bawah ini.

c. Fair value of financial instruments

Management believes that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the financial statements approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.

Specifically, significant assumptions used in determining the fair value of the following financial assets and liabilities are set out below.

Pengukuran nilai wajar diakui dalam laporan posisi keuangan

Tabel berikut ini memberikan analisis dari instrumen keuangan yang diukur setelah pengakuan awal sebesar nilai wajar, dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

- Tingkat 1 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari harga kuotasian (tak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
- Tingkat 2 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga).
- Tingkat 3 pengukuran nilai wajar adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

	Tingkat 1/ Level 1 Rp	Tingkat 2/ Level 2 Rp	Tingkat 3/ Level 3 Rp	Jumlah/ Total Rp
<u>Aset keuangan pada FVTPL</u>				
Unit penyertaan reksadana	152.486.732.750	-	-	152.486.732.750
Jumlah	152.486.732.750	-	-	152.486.732.750

Tidak ada transfer antara tingkat 1 dan 2 pada tahun berjalan.

Fair value measurements recognised in the statements of financial position

The following table provides an analysis of financial instruments that are measured subsequent to initial recognition at fair value, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

- Level 1 fair value measurements are those derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.
- Level 2 fair value measurements are those derived from inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).
- Level 3 fair value measurements are those derived from valuation techniques that include inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

There were no transfers between level 1 and 2 during the year.

31. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Akta No. 14 tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat oleh Utiok R. Abdurachman, S.H., MLI., Mkn, notaris di Jakarta, para Pemegang Saham Perusahaan menyetujui pengangkatan Bapak Dono Boestami selaku Direktur Perusahaan. Susunan Direksi pada tanggal 21 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Direksi
Presiden Direktur
Direktur

Kartika Wirjoatmodjo
Harold J.D. Tjiptadjaja
Haruhiko Takamoto
Wito Krisnahadi
Dono Boestami

31. SUBSEQUENT EVENT

Based on Notarial Deed No. 14 dated January 21, 2013 of Utiok R. Abdurachman, S.H., MLI., Mkn, notary in Jakarta, the Shareholders of the Company agreed to appoint Mr. Dono Boestami as the Director of the Company. The composition of the Board of Directors as of January 21, 2013 is as follows:

Board of Directors
President Director
Directors

32. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 2 sampai 48 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 6 Maret 2013.

32. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 2 to 48 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on March 6, 2013.
